



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16A TAHUN 2016
TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 29 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 386 sampai dengan 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur *RoadMap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020;
- b. bahwa *RoadMap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 adalah Kebijakan penguatan SIDa yang harus diintegrasikan dalam RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan *RoadMap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
 2. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN 2016-2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pemangku kepentingan, kelembagaan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik).
6. Visi adalah cita-cita mengenai keadaan yang diinginkan.
7. Misi adalah peran yang diamanatkan secara mendasar dalam mewujudkan visi.
8. Sasaran strategis adalah bentuk refleksi strategis yang lebih terukur.
9. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mencapai tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai :

- a. pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan/penguatan sistem inovasi dan peningkatan daya saing daerah;
- b. pedoman dalam penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mensinergikan langkah-langkah tindakan yang berkaitan dengan sistem inovasi dan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB III
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

- a. *roadmap* Penguatan SIDA Tahun 2016-2020 adalah Dokumen Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- b. rincian *Roadmap* Penguatan SIDA Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Roadmap Penguatan SIDA Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat arah, prioritas serta kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Februari 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


SLAMET PRIHANTONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 16A TAHUN 2016
TENTANG
ROADMAP PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN
2016-2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Karena itulah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut tercantum dalam *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur RPJMD dengan keharusan mengintegrasikan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan demikian, dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadi sangat penting bagi daerah.

Pentingnya penguatan sistem inovasi daerah secara implisit juga diamanatkan oleh berbagai peraturan lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologimenjelaskan bahwa keberhasilan negara maju menumbuhkan kembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) karena negara itu mampu mensinergikan perkembangan kelembagaan

dan sumber daya iptek yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem.¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 ini juga sudah diturunkan ke dalam beberapa peraturan pemerintah, yakni :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.

Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, diperlukan dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas serta memanfaatkan iptek nasional untuk mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEK secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat unggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) iptek, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan serta

¹Terdapat pada bagian Penjelasan Butir I Umum Paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.²

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan daya inovasi dan daya saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menetapkan penguatan sistem inovasi sebagai program utama yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014. Kebijakan ini kemudian diteruskan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan kemudian berlanjut dalam RPJMN Tahun 2015-2019, iptek, inovasi dan sistem inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan dan daya saing nasional.

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi. Taufik (2005) mendeskripsikan sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi.

Arah penguatan sistem inovasi adalah mendukung pembangunan Indonesia yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka tujuan pokok penguatan sistem inovasi adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan Bangsa dan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat (*basic needs*) dan melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*).
- b. Mendukung percepatan peningkatan daya saing (*competitiveness*) dan penguatan kohesi sosial (*social cohesion*).

²Terdapat dalam Subbab IV.1.2 Butir B Poin 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

c. Mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI (*sovereignty*).

Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Penguatan sistem inovasi daerah diwujudkan untuk menunjang penguatan sistem inovasi nasional.

Penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat yang pada gilirannyadiharapkan mampu meningkatkan daya saing.³Dengan demikian, penguatan sistem inovasi daerah menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Meyakini betapa pentingnya peran sistem inovasi dalam mempercepat proses pembangunan, maka Kota Pekalongan telah memasukkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah ke dalam perencanaan pembangunannya. Dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, penguatan sistem inovasi daerah tercermin dalam salah satu pernyataan misi fase ketiga pembangunan lima tahunan yang berbunyi *Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas*.

Dengan pernyataan misi seperti di atas, maka penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan akan mendorong :

- a. Pengembangan struktur perekonomian yang berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah, terutama produk-produk berbasis ekonomi kreatif, yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas.

³Terdapat pada Butir I Umum Poin 1 Paragraf Ketiga Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Pengembangan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, standarisasi dan sertifikasi.
- c. Pengembangan promosi dan pameran produk-produk daerah, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- d. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.
- e. Pengembangan pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor perikanan, untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem rantai nilai guna menjamin ketersediaan pangan.
- f. Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, khususnya subsektor perikanan, yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera pasar, sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar.
- h. Pengembangan ekonomi kreatif dan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- i. Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas tindakan antarpelaku pembangunan (pemerintah, swasta, cendekiawan, komunitas dan masyarakat secara umum) dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat.
- j. Pengembangan promosi daerah pro investasi, pro tenaga kerja, pro kelestarian lingkungan dan pro pertumbuhan, sehingga dapat menarik investor, baik PMA maupun PMDN.
- k. Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil, sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah.
- l. Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan, pemagangan dan studi banding.

Ada beberapa fokus pembangunan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan. Di antaranya adalah fokus-fokus di bawah ini :

1. Fokus pengembangan ekosistem inovasi daerah (di Kota Pekalongan sudah dikembangkan berbagai prasarana dan sarana penguatan sistem inovasi, seperti kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif, kerja sama daerah, dan penyelarasan terhadap dinamika global).
2. Fokus pengembangan industri perbatikan (di Kota Pekalongan sudah berkembang beberapa sentra industri kecil menengah perbatikan, yakni Kampoeng Batik Kauman, Kampoeng Batik Pesindon, Kampung Canting Lindungsari, Kampung Tenun Medono).
3. Fokus pengembangan industri perikanan (di Kota Pekalongan sudah berkembang Kawasan Minapolitan dan sentra terasi Bandengan).
4. Fokus pengembangan ekonomi kreatif (di Kota Pekalongan terdapat 18 potensi ekonomi kreatif, yaitu animasi, arsitektur, desain, fotografi, musik, kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan pengembangan, penerbitan, perfilman, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, teknologi informasi, televisi dan radio, video).
5. Fokus pengembangan teknopolitan batik (di Kota Pekalongan sedang dikembangkan pusat inovasi dan budaya batik).
6. Fokus pengembangan *techno park* perikanan (di Kota Pekalongan tengah dibangun kawasan pengembangan usaha pembudidayaan ikan melalui pendekatan *techno park*).
7. Fokus pengembangan teknologi tepat guna melalui posyantek dan wartek (di Kota Pekalongan terus berkembang teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam upaya peningkatan usaha produktif).
8. Fokus pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (di Kota Pekalongan sedang dikembangkan beberapa perusahaan pemula berbasis teknologi).
9. Fokus pengembangan *business development services-provider* (di Kota Pekalongan terdapat beberapa UMKM yang potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan *business development services-provider*).

10. Fokus pengembangan SMK Incorporate (di Kota Pekalongan terdapat belasan SMK swasta dan negeri yang mampu menghasilkan puluhan jenis produk inovatif berbasis kompetensi masing-masing SMK).
11. Fokus pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (di Kota Pekalongan terus berkembang pelayanan publik di berbagai bidang pembangunan, seperti pemerintahan, kesehatan, penanaman modal, pendidikan, kependudukan, dan lain-lain dengan memanfaatkan kemajuan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi).

Selengkapnya, fokus penguatan sistem inovasi daerah di atas akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang dinamakan Roadmap Penguatan Sistem inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban Kota Pekalongan untuk menyusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 dilandasi oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta beberapa peraturan perundangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
15. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 070/7004/SJ tentang Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

19. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/257 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/346 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

1.3. FUNGSI ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Fungsi dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan MP3EI 2011-2015.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan/atau perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang disusun setiap tahun.
4. Menjadi instrumen atas kebijakan *mandatory* dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
5. Menjadi instrumen untuk melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah Kota Pekalongan menerapkan sistem inovasi daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

1.4. KEDUDUKANDOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kedudukan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Kedudukan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini memuat uraian mengenai latar belakang pentingnya penguatan sistem inovasi daerah bagi percepatan pembangunan di sebuah daerah. Kemudian dikemukakan pula landasan hukum, fungsi dan kedudukan dokumen roadmap penguatan sistem inovasi daerah. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan *Roadmap* penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

BAB II. KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN SAAT INI

Bab Kedua ini menguraikan kondisi saat ini sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan yang disusun berdasarkan hasil survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan.

BAB III. TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN

Bab Ketiga ini menguraikan tantangan dan peluang pembangunan berbasis pengetahuan, kebijakan otonomi dan daya saing daerah, serta isu-isu utama global dan nasional.

BAB IV. KONDISI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN YANG DIINGINKAN PADA TAHUN 2016-2020

Bab Keempat ini memuat uraian hasil identifikasi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang diinginkan pada tahun 2016-2020 untuk setiap pilar.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Bab Kelima ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

BAB VI. FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Bab Keenam ini memuat fokus dan program prioritas untuk setiap pilar penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan selama jangka waktu 2016-2020.

BAB VII. RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Bab Ketujuh ini memuat rencana aksi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020, yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, capaian kinerja, program dan kegiatan, target dan waktu pelaksanaan, urusan dan institusi penanggung jawab.

BAB VIII. PENUTUP

Bab terakhir ini menutup bab-bab sebelumnya dengan menguraikan mekanisme pengintegrasian Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

BAB II

KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN SAAT INI

Untuk menggambarkan kondisi sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan saat ini, maka telah dilakukan survei pemetaan kapasitas inovasi daerah di berbagai institusi di Kota Pekalongan pada akhir 2014 dan awal 2015. Survei pemetaan kapasitas inovasi tersebut menggunakan instrumen wawancara, instrumen kebijakan dan penelusuran dokumen. Ruang lingkup survei pemetaan kapasitas inovasi didasarkan pada lima pilar penguatan sistem inovasi dan enam agenda kerangka kebijakan inovasi.

Kelima pilar penguatan sistem inovasi (P_i)⁴ terdiri dari :

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah (P1).
2. Pilar Pengembangan Klaster Industri (P2).
3. Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi (P3).
4. Pilar Pengembangan Teknopreneur (P4).
5. Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi (P5).

Sedangkan enam agenda kerangka kebijakan inovasi (K_i)⁵ meliputi :

1. Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1).
2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2).
3. Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3).
4. Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4).
5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah (K5).
6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6).

Setiap agenda kerangka kebijakan inovasi di atas terdiri dari beberapa elemen (E_i)⁶, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen regulasi pengembangan inovasi dan bisnis, (2) elemen insentif

⁴ P_i = Pilar penguatan sistem inovasi dimana $i = 1, 2, \dots, 5$.

⁵ K_i = kerangka kebijakan inovasi dimana $i = 1, 2, \dots, 6$.

⁶ E_i = elemen kerangka kebijakan inovasi dimana $i = 1, 2, \dots, n$.

- pengembangan inovasi dan bisnis,(3) elemen infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa meliputi tiga elemen, yakni (1) elemen kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, (2) elemen daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa,(3) elemen daya serap IPTEKIN/Litbangyasa.
 3. Menumbuh kembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, terbagi atas tiga elemen, ialah (1) elemen kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis, (2) elemen peningkatan difusi inovasi,(3) elemen wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis.
 4. Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis, mencakup empat elemen, yaitu (1) elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, (2) elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*, (3) elemen apresiasi dan kampanye inovasi, (4) elemen penumbuhan usaha baru inovatif.
 5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan pusat-daerah, melingkupi tiga elemen, yakni (1) elemen fokus pengembangan inovasi dan bisnis, (2) elemen keterpaduan kebijakan inovasi dan bisnis, (3) elemen kelembagaan khusus.
 6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah terdiri atas empat elemen, ialah (1) elemen lingkungan, (2) elemen standarisasi, (3) elemen hak kekayaan intelektual (HKI), (4) elemen ketenagakerjaan.

Setiap elemen memiliki satu atau lebih indikator(I_i)⁷ seperti di bawah ini:

1. Elemen regulasi pengembangan inovasi dan bisnis memiliki satu indikator, ialah (1) jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis.
2. Elemen insentif pengembangan inovasi dan bisnis mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis.
3. Elemen infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnisterdiri atas duaindikator, yakni (1) jenis dokumen pengembangan inovasi dan bisnis, (2) ketersediaan database inovasi dan bisnis.

⁷ I_i = indikator elemen kerangka kebijakan inovasi dimana $i = 1, \dots, n$.

4. Elemen kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa meliputi satu indikator, yaitu (1) sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa.
5. Elemen daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa terdiri dari dua indikator, ialah (1) sebaran sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa, (2) sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa.
6. Elemen daya serap IPTEKIN/Litbangyasa mencakup satu indikator, yakni (1) sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa.
7. Elemen kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis terbagi atas satu indikator, ialah (1) sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis.
8. Elemen peningkatan difusi inovasi memiliki satu indikator, ialah (1) sebaran difusi inovasi.
9. Elemen wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis.
10. Elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan terdiri atas dua indikator, yakni (1) model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan di dalam pendidikan, (2) model penguatan budaya inovasi dan bisnis melalui pelatihan.
11. Elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain* meliputi dua indikator, yaitu (1) model pengelolaan teknologi masyarakat, (2) jenis program *reverse brain drain*.
12. Elemen apresiasi dan kampanye inovasi terdiri dari dua indikator, ialah (1) jenis apresiasi inovasi, (2) jenis media kampanye inovasi.
13. Elemen penumbuhan usaha baru inovatif mencakup satu indikator, yakni (1) model penumbuhan usaha baru inovatif.
14. Elemen fokus pengembangan inovasi dan bisnis terbagi atas satu indikator, ialah (1) bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis.
15. Elemen keterpaduan kebijakan inovasi dan bisnis memiliki satu indikator, ialah (1) sebaran kerja sama daerah.
16. Elemen kelembagaan khusus mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis kelembagaan khusus.
17. Elemen lingkungan terdiri atas satu indikator, yakni (1) sebaran program pembangunan daerah ramah lingkungan.

18. Elemen standarisasi meliputi satu indikator, yaitu (1) sebaran aplikasi standarisasi internasional.
19. Elemen hak kekayaan intelektual terdiri dari satu indikator, ialah (1) jenis hak kekayaan intelektual.
20. Elemen ketenagakerjaan mencakup satu indikator, yakni (1) sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil.

Uraian mengenai dekomposisi pilar penguatan sistem inovasi, agenda kerangka kebijakan inovasi, elemen kerangka kebijakan inovasi dan indikator elemen kerangka kebijakan inovasi di atas dapat disajikan dalam bentuk matriks penguatan sistem inovasi daerah sebagaimana tampak dalam Tabel 2.1.

Adapun hasil survei pemetaan kapasitas inovasi di Kota Pekalongan yang berfungsi sebagai gambaran mengenai kondisi saat ini penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

Tabel 2.1. Matriks Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Pilar Pengembangan Klaster Industri	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopreneur	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
<i>K_i</i>	<i>E_i</i>	<i>I_i</i>	P1	P2	P3	P4	P5
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	P1K1E1I1	P2K1E1I1	P3K1E1I1	P4K1E1I1	P5K1E1I1
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis	P1K1E2I1	P2K1E2I1	P3K1E2I1	P4K1E2I1	P5K1E2I1
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan inovasi dan bisnis	P1K1E3I1	P2K1E3I1	P3K1E3I1	P4K1E3I1	P5K1E3I1
		Ketersediaan database inovasi dan bisnis	P1K1E3I2	P2K1E3I2	P3K1E3I2	P4K1E3I2	P5K1E3I2
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	P1K2E1I1	P2K2E1I1	P3K2E1I1	P4K2E1I1	P5K2E1I1
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	P1K2E2I1	P2K2E2I1	P3K2E2I1	P4K2E2I1	P5K2E2I1
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	P1K2E2I2	P2K2E2I2	P3K2E2I2	P4K2E2I2	P5K2E2I2
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	P1K2E3I1	P2K2E3I1	P3K2E3I1	P4K2E3I1	P5K2E3I1
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis	P1K3E1I1	P2K3E1I1	P3K3E1I1	P4K3E1I1	P5K3E1I1
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi	P1K3E2I1	P2K3E2I1	P3K3E2I1	P4K3E2I1	P5K3E2I1
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	P1K3E3I1	P2K3E3I1	P3K3E3I1	P4K3E3I1	P5K3E3I1

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Pilar Pengembangan Klaster Industri	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi	Pilar Pengembangan Tekno-prener	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	P1K4E1I1	P2K4E1I1	P3K4E1I1	P4K4E1I1	P5K4E1I1
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	P1K4E1I2	P2K4E1I2	P3K4E1I2	P4K4E1I2	P5K4E1I2
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	P1K4E2I1	P2K4E2I1	P3K4E2I1	P4K4E2I1	P5K4E2I1
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	P1K4E2I2	P2K4E2I2	P3K4E2I2	P4K4E2I2	P5K4E2I2
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	P1K4E3I1	P2K4E3I1	P3K4E3I1	P4K4E3I1	P5K4E3I1
		Jenis media kampanye inovasi	P1K4E3I2	P2K4E3I2	P3K4E3I2	P4K4E3I2	P5K4E3I2
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	P1K4E4I1	P2K4E4I1	P3K4E4I1	P4K4E4I1	P5K4E4I1
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis	P1K5E1I1	P2K5E1I1	P3K5E1I1	P4K5E1I1	P5K5E1I1
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah	P1K5E2I1	P2K5E2I1	P3K5E2I1	P4K5E2I1	P5K5E2I1
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	P1K5E3I1	P2K5E3I1	P3K5E3I1	P4K5E3I1	P5K5E3I1
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	P1K6E1I1	P2K6E1I1	P3K6E1I1	P4K6E1I1	P5K6E1I1
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	P1K6E2I1	P2K6E2I1	P3K6E2I1	P4K6E2I1	P5K6E2I1
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	P1K6E3I1	P2K6E3I1	P3K6E3I1	P4K6E3I1	P5K6E3I1
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	P1K6E4I1	P2K6E4I1	P3K6E4I1	P4K6E4I1	P5K6E4I1

2.1. PILAR PENGUATAN EKOSISTEM INOVASI DAERAH

Ekosistem inovasi daerah adalah struktur dasar dalam sistem inovasi yang terbentuk oleh hubungan sistemik dan sistematis di antara berbagai elemen kerangka kebijakan inovasi. Ekosistem inovasi daerah dikatakan sebagai sebuah struktur dasar dalam sistem inovasi karena merupakan pilar yang memiliki elemen kerangka kebijakan inovasi secara lengkap, sehingga dalam pilar ini penguatan sistem inovasi berjalan sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah di Kota Pekalongan adalah pengembangan berbagai prasarana dan sarana penguatan sistem inovasi, seperti kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif, kerja sama daerah, serta penyelarasan isu lingkungan, standarisasi, hak kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan terhadap dinamika global.

Elemen kerangka kebijakan inovasi dalam pilar penguatan ekosistem inovasi daerah terdiri dari 20 elemen yang tersebar di dalam enam kerangka kebijakan inovasi. Beberapa di antaranya adalah kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif, kerja sama daerah, dan penyelarasan terhadap dinamika global. Adapun kondisi saat ini setiap elemen kerangka kebijakan inovasi tersebut secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 2.2.

2.1.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Kondisi saat ini kerangka umum pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan dapat dikatakan sudah kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh ketiga elemen yang ada di dalam kerangka kebijakan inovasi ini (lihat Tabel 2.2). *Pertama*, regulasi yang mendukung berkembangnya inovasi dan bisnis terus bertambah dari tahun ke tahun, baik yang terkait dengan pengembangan inovasi maupun berhubungan dengan pengembangan bisnis. Sementara itu, jumlah perizinan dan non perizinan usaha yang dikeluarkan oleh BPMP2T cenderung meningkat selama 2010-2014, dimana sampai dengan tahun 2014 telah diterbitkan perizinan sebanyak 14.185 izin. Adapun regulasi yang dimaksud antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2010 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Pengaduan.
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang SOP Perizinan Penanaman Modal.
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015.
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013 mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503.05/219 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan NonPerizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/219 Tahun 2011 tentang Penunjukan BPMP2T sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekalongan.
10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/140 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan.
11. Keputusan Walikota Nomor 050.05/257 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 555.05/346 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.
12. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 065/009 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.

Kedua, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengembangan inovasi dan bisnis adalah berupa pemberian bantuan modal dan dana stimulan. Sedangkan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah belum ada. Selain itu, beberapa jenis kemudahan juga diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengembangan inovasi dan bisnis, di antaranya berupa :

1. Bantuan teknis dan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual (paten dan merek).
2. Bantuan pembiayaan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek) dan warung teknologi tepat guna (wartek).

3. Percepatan pemberian izin usaha dengan cara mengurangi berkas permohonan, mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi biaya perizinan.
4. Penyediaan data dan informasi peluang usaha/investasi.
5. Fasilitasi/bantuan peralatan/mesin/prasarana dan sarana produksi/usaha.
6. Pelatihan pengembangan kreativitas-inovatif dan pengembangan usaha.

Ketiga, pengembangan inovasi dan bisnis sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 dan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 beberapa SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPMP2T, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga). Sedangkan dokumen tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai pengganti bagi Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah saat ini masih dalam proses penyusunan.

Tabel 2.2. Kondisi Saat Ini Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan, 2015

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	<p>Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pengembangan inovasi dan bisnis, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2010 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Pengaduan. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang SOP Perizinan Penanaman Modal. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503.05/219 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/219 Tahun 2011 tentang Penunjukan BPMP2T sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekalongan. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/140 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan. Keputusan Walikota Nomor 050.05/257 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 555.05/346 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
			l. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 065/009 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis	<p>Sesuai PP No. 45 Tahun 2008, jenis insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan inovasi dan bisnis di antaranya berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan modal. Pemberian dana stimulan. <p>Sedangkan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah belum dilegalkan dalam bentuk Peraturan Walikota, meskipun dalam praktiknya sudah ada. Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang diberikan pemerintah kota dalam pengembangan inovasi dan bisnis di antaranya berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bantuan teknis dan pendampingan pengurusan HKI (paten dan merk). Bantuan pembiayaan pengembangan posyantek dan wartek. Percepatan pemberian izin usaha. Penyediaan data dan informasi peluang investasi. Fasilitasi/bantuan peralatan/mesin/prasarana dan sarana produksi/usaha. Pelatihan pengembangan kreativitas-inovatif dan pengembangan usaha.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan inovasi dan bisnis	<p>Pengembangan inovasi dan bisnis sudah dimuat dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. Rencana Strategis beberapa SKPD. Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 Master plan pembangunan ekonomi daerah Perencanaan Tindak Pengembangan Ekonomi Lokal Strategi Pengembangan Ekonomi Sektor Informal

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
			Sedangkan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum ada.
		Ketersediaan database inovasi dan bisnis	Database pengembangan inovasi dan bisnis untuk level Kota Pekalongan belum dikembangkan.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga litbang pemerintah daerah(pemda) : Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi (Ristekin). Perguruan tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Universitas Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan, STMIK Widya Pratama Pekalongan, Politeknik Batik Pusmanu, Politeknik Kesehatan Semarang, Akademi Komunitas Negeri. Badan usaha : CV Cipta Indo Rekin. Lembaga penunjang: Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSID), Posyantek dan Wartek.
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari lembaga litbang pemerintah daerah(pejabat fungsional). Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari perguruan tinggi(dosen dan mahasiswa). Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari badan usaha (tenaga ahli perusahaan). Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari lembaga penunjang (anggota DRD, Anggota Tim Koordinasi PSID, masyarakat inovatif binaan Posyantek dan Wartek).
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pengkajian/penelitian/penerapan iptekin/SIDa, insentif, pelatihan dan fasilitasi, serta hibah bersaing dilitbang pemerintah daerah. Anggaran pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa di perguruan tinggi. Anggaran pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa di badan usaha. Anggaran pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa di lembaga penunjang (DRD, Posyantek dan Wartek).
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Hasil IPTEKIN/Litbangyasa sudah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, masyarakat (TTG), UMKM dan pelaku bisnis lainnya.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis	Kemitraan strategis untuk pemajuan inovasi dan bisnis di antaranya kemitraan dengan Pengelola Thamrin City di Jakarta, kemitraan dalam kerangka forum SAMPAN (Sapta Mitra Pantura) di Karesidenan Pekalongan, FEDEP, dan PTSP se-Bakorlin III Jawa Tengah. Kemudian, ada pula kemitraan pengembangan pariwisata dengan Politeknik Batik Pusmanu dan STP Trisakti, serta kerjasama sekolah dengan pelaku bisnis/badan usaha.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi	Peningkatan difusi inovasi di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun terus berkembang, baik dalam bentuk difusi input inovasi (bahan baku/penolong), difusi proses inovasi (metode/teknik produksi) dan difusi output inovasi (produk-produk inovatif).
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Wahana interaksi pelaku bisnis sudah cukup beragam, seperti pameran bisnis, pameran iptekin, forum-forum bisnis (curhat bisnis), lomba-lomba (kreanova dan gelar TTG), dan lain-lain.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Pengembangan kandungan kreativitas-keinovasian dalam mata pelajaran atau mata kuliah tertentu di jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan kewirausahaan untuk siswa dan guru SMK, mahasiswa dan dosen.• Pelatihan kewirausahaan untuk pengusaha dan calon pengusaha.• Pelatihan kewirausahaan masyarakat/pendidikan nonformal (dikelola oleh Inasaba Komputer).• Studi banding.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan teknologi masyarakat dilakukan melalui media Museum Batik sebagai pusat data dan informasi batik, pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan perbatikan, pusat koleksi batik klasik, lawasan dan kontemporer.• Pengelolaan teknologi tepat guna melalui Posyantek dan Wartek.• Media pengelolaan teknologi perikanan melalui kawasan <i>technopark</i> perikanan.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Program <i>reverse brain drain</i> baru dalam bentuk curator Museum Batik, motivator <i>success story</i> .

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	PI
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Apresiasi inovasi diselenggarakan setiap tahun melalui agenda Kreanova dan Anugerah Inovasi, gelar TTG tingkat Kelurahan, serta lomba inovasi hibah bersaing.
		Jenis media kampanye inovasi	Kampanye inovasi sudah diselenggarakan melalui media televisi (Batik TV), siaran radio, pameran (skala lokal, regional, nasional dan internasional), website/blog (SKPD, organisasi tertentu, individu), film/video dokumenter, profil/brosur/katalog, dan lain-lain.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Penumbuhan usaha baru inovatif oleh Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model insentif dana stimulan, insentif bantuan permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi HKI dan lain-lain. • Pengembangan kelurahan vokasi melalui kewirausahaan kelurahan.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan difokuskan pada berbagai bidang, di antaranya perbatikan, perikanan, ekonomi kreatif, pelayanan publik, dan lain-lain.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama antardaerah : di antaranya dengan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. • Kerja sama dengan pihak ketiga : di antaranya dengan kementerian/lembaga (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, LIPI, BPPT, BPOM, Balitbang Kementerian Kesehatan, Pustekkom Kemendikbud, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal), perguruan tinggi (Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Semarang), swasta (PT Prima Lestari Investindo, Pengelola Thamrin City), dan lain-lain. • Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri : belum teridentifikasi.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Pekalongan. • Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
			<ul style="list-style-type: none"> Relawan Muda Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan, yang terdiri dari 6 kelompok, yaitu Balarela Melek IT (di bidang IT), Balarela Banyu Biru (mangrove dan rob), Balarela Laskar Garuda Muda (limbah batik), Balarela Lingkungan Milik Kita Bersama (taman kota), Balarela Ki Bahurekso (sampah), dan Balarela Pencerah (pendidikan untuk yang putus sekolah). Pusat Sainifikasi dan Pelayanan Jamu, yang terdiri dari Pusat Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat, Pusat Ekstrak Daerah, Klinik Sainifikasi Jamu, Laboratorium Jamu.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Kota Pekalongan sudah mengembangkan beberapa program ramah lingkungan melalui pendirian TPST 3R (tempat pembuangan sampah terpadu) di setiap Kelurahan, IPAL Terpadu di sentra-sentra produksi serta mengembangkan <i>green city</i> (kawasan konservasi mangrove, ruang publik kreatif berbasis Ruang Terbuka Hijau).
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standardisasi internasional	Sejak 2006 sudah mengadopsi sistem manajemen mutu (seperti ISO 9001:2008) yang diaplikasikan di berbagai kelembagaan pelayanan publik (SKPD, rumah sakit, 12 puskesmas, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, sekolah-sekolah).
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	HKI yang sudah dimiliki para pelaku inovasi adalah paten dan merek.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja terampil belum berkembang.

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), *Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota Pekalongan Tahun 2014*; Alkadri (2015), "Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan," *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Adapun satu dari empat indikator di dalam kerangka kebijakan inovasi pertama ini yang belum dapat dipenuhi oleh Kota Pekalongan adalah ketersediaan database inovasi dan bisnis secara terpusat dan *online*. Hingga saat ini database inovasi dan bisnis masih dikelola secara manual dan tersebar di berbagai SKPD terkait, namun dalam hal urusan perizinan dan non perizinan sudah menggunakan sistem *online*.

2.1.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan inovasi dan bisnis juga sudah cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini, sebagaimana tampak pada Tabel 2.2.

Pertama, sebaran kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan tidak hanya berasal dari lembaga litbang pemerintah daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), tetapi juga ada di perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Universitas Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan, STMIK Widya Pratama, Politeknik Batik Pusmanu, Politeknik Kesehatan Semarang, Akademi Komunitas Negeri) dan SMK (Unit Produksi Bersama SMK *Incorporate*), badan usaha (CV Cipta Indo Rekin), serta di lingkup lembaga penunjang [Dewan Riset Daerah, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) dan Wartek (Warung Teknologi Tepat Guna)].

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif meningkat dan mampu mendorong penguatan daya saing Kota Pekalongan. Namun begitu, jumlah sumber daya manusia yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga IPTEKIN/Litbangyasa pemerintah Kota Pekalongan dan perguruan tinggi di kota tersebut masih terbatas. Sedangkan sumber daya manusia dari kalangan masyarakat yang menggeluti IPTEKIN/Litbangyasa terus meningkat, terutama mereka yang berada di bawah binaan Posyantek dan Wartek. Dengan demikian,

pada tahun-tahun mendatang dukungan sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan diperkuat. Di sisi lain, dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan IPTEKIN/Litbangyasa juga sudah tersebar di kalangan pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat, baik untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/SIDA, insentif, pelatihan dan fasilitasi, maupun hibah bersaing. Sekedar ilustrasi, alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 23.721.350, lalu tahun 2014 senilai Rp 674,56 juta dan tahun 2015 Rp 710,3 juta. Secara keseluruhan, anggaran untuk fasilitasi IPTEKIN mencapai Rp477,3 juta pada tahun 2013.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa sudah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah kota, masyarakat (dalam bentuk teknologi tepat guna), IKM/UMKM dan pelaku bisnis lainnya.

Dari kondisi pencapaian ketiga elemen di atas, upaya penguatan keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan inovasi dan bisnis di masa-masa mendatang harus lebih ditingkatkan lagi agar daya saing Kota Pekalongan terus menguat.

2.1.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Di dalam kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi saat ini di Kota Pekalongan. *Pertama*, sebaran kemitraan strategis dan kolablatif untuk inovasi dan bisnis tidak hanya sebatas kemitraan di dalam wilayah Kota Pekalongan, tetapi telah merambah ke luar wilayah kota. Beberapa di antaranya adalah :

- Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Bakorlin (Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota) III Jawa Tengah yang mencakup 9 kabupaten dan 2 kota.
- Sapta Mitra Pantura (SAMPAN) yang fokus pada bidang pengembangan kepariwisataan regional, promosi dan pameran produk, serta pusat informasi perdagangan regional.
- FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) tingkat Provinsi Jawa Tengah.

- Kemitraan pemasaran produk batik Kota Pekalongan dengan pengelola pusat perbelanjaan besar Thamrin City di Jakarta, Metro Dallas Plaza di Bandung, dan mal-mal lainnya di Solo dan Surabaya.

Kedua, peningkatan difusi inovasi sudah tersebar dalam bentuk difusi input inovasi (inovasi bahan baku/penolong), difusi proses inovasi (inovasi metode/teknik produksi) dan difusi output inovasi (produk-produk inovatif). Peningkatan difusi inovasi ini antara lain dilakukan melalui pendirian *telecenter* berbasis TIK (teknologi informatika dan komunikasi) yang sudah mencapai level semua kelurahan, seluruh kecamatan dan beberapa pusat bisnis di Kota Pekalongan. Selain itu, ada pula *telecenter* LPPAR, *telecenter* PKK, *telencenter* bisnis dan *telecenter* RW, yang telah terintegrasi dengan perpustakaan RW/Rumah Pintar RW.

Ketiga, jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis sudah cukup beragam, seperti pameran bisnis (Pekan Batik Nasional, Pekan Batik Internasional), pameran IPTEKIN (Pameran Kreativitas dan Inovasi dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna) yang berlangsung rutin setiap tahun. Selain itu, wahana lainnya adalah dalam bentuk pemanfaatan ruang publik kreatif di Kawasan Batik Jetayu untuk aktivitas olahraga, bisnis dan penguatan kohesi sosial di antara berbagai lapisan masyarakat.

2.1.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dan Bisnis

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnis di Kota Pekalongan hingga kini telah dikembangkan melalui empat elemen (lihat Tabel 2.2). *Pertama*, melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan inovasi dan bisnis. Penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dilakukan dengan cara membuat bahan ajar yang memuat kandungan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan untuk pelajar SMK dan perguruan tinggi. Sedangkan penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui jalur pelatihan dilakukan dengan cara menyelenggarakan :

- Pelatihan kewirausahaan untuk siswa dan guru SMK.

- Pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan dosen.
- Pelatihan kewirausahaan untuk pengusaha dan calon pengusaha.
- Pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat.
- Studi banding.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*. Pengelolaan teknologi masyarakat atau kearifan lokal dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik yang berpusat di Museum Batik. Sedangkan *reverse brain drain* baru terlaksana dalam bentuk penetapan pakar batik sebagai curator Museum Batik.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen apresiasi inovasi dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan tahunan agenda Kreanova dan Anugerah Inovasi, gelar teknologi tepat guna tingkat kelurahan, serta lomba inovasi melalui hibah bersaing. Sedangkan penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan melalui media televisi (Batik TV), siaran radio, pameran (skala lokal, regional, nasional dan internasional), website, film/video dokumenter, profil/brosur/katalog, pembuatan branding, dan lain-lain.

Keempat, melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif, yang ditempuh dengan model pemberian insentif dana stimulan, insentif bantuan permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan kewirausahaan, penyelenggaraan *technocamp*, sosialisasi HKI dan lain-lain. Penumbuhan usaha baru inovatif lainnya adalah dalam bentuk pengembangan kelurahan vokasi melalui kewirausahaan kelurahan.

2.1.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan Pembangunan Antar Daerah dan Pusat-Daerah

Kondisi saat ini fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut. *Pertama*, fokus pengembangan inovasi dan bisnis. Pengembangan inovasi dan bisnis di Kota

Pekalongan difokuskan pada bidang industri perbatikan, industri perikanan, ekonomi kreatif, pelayanan publik, dan lain-lain.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari:

- a. Kerja sama antardaerah : di antaranya dengan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Kayong Utara, dan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga : di antaranya dengan kementerian/lembaga (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Balai Besar Tekstil Bandung, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan [Pustekkom] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, LP POM Jawa Tengah), perguruan tinggi (Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Semarang), perusahaan swasta (PT Prima Lestari Investindo, Pengelola *Thamrin City*), dan lain-lain.
- c. Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri : belum teridentifikasi.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga berikut :

- Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pekalongan.
- Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.
- Relawan Muda Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan, yang terdiri dari 6 kelompok, yaitu Balarela Melek IT (di bidang IT), Balarela Banyu Biru (mangrove dan rob), Balarela Laskar Garuda Muda (limbah batik), Balarela Lingkungan Milik Kita Bersama (taman

- kota), Balarela Ki Bahurekso (sampah), dan Balarela Pencerah (pendidikan untuk yang putus sekolah).
- Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu, yang terdiri dari Pusat Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat, Pusat Ekstrak Daerah, Klinik Saintifikasi Jamu, Laboratorium Jamu.

2.1.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke Dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis Daerah

Dalam mengantisipasi isu dinamika global dan pengaruhnya terhadap pengembangan inovasi dan bisnis daerah, Kota Pekalongan berupaya melakukan penyelarasan melalui empat elemen. *Pertama*, melalui elemen isu lingkungan. Pengembangan inovasi dan bisnis daerah dilakukan melalui pengembangan berbagai program pembangunan daerah yang ramah lingkungan, seperti pendirian TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) di setiap Kelurahan, IPAL Terpadu di sentra-sentra produksi serta mengembangkan *green city* (kawasan konservasi mangrove, ruang publik kreatif berbasis ruang terbuka hijau). Kawasan konservasi di Kota Pekalongan ditetapkan dengan SK Walikota Pekalongan Nomor 523/02.A Tahun 2013. Selain itu, Kota Pekalongan juga berhasil dalam menciptakan kebersihan lingkungan (fisik) dan pengelolaan lingkungan (nonfisik) perkotaan, sehingga kota ini mendapatkan Anugrah Adipura selama empat tahun berturut-turut (2010-2012) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pekalongan juga telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kedua, penyelarasan isu standarisasi. Sejak tahun 2006, Kota Pekalongan telah menerapkan ISO 9001:2008 dari SAI Global di berbagai kelembagaan pelayanan publik (di antaranya BPMP2T, rumah sakit, balai kesehatan paru masyarakat, 4 buah SMK dan 12 unit Puskesmas). Di samping itu, pada saat ini juga sedang dikembangkan *MSTQ (measurement, standardization, testing and quality)* dan penerapan Sistem Manajemen Mutu di semua SKPD.

Ketiga, melalui elemen hak kekayaan intelektual (HKI). Di Kota Pekalongan telah dibentuk *Intellectual Property Corner (IP Corner)*.

Sedangkan HKI yang sudah dimiliki para pelaku inovasi di kota ini adalah paten dan merek.

Keempat, dalam hal isu ketenagakerjaan, di Kota Pekalongan memang belum berkembang sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja terampil atau profesional.

2.2. PILAR PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Pengembangan klaster industri merupakan alternatif pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan daya saing industri khususnya dan pembangunan daerah umumnya. Bagi pelaku ekonomi, khususnya industri/usaha kecil dan menengah (IKM/UKM), pendekatan klaster industri membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan pengembangan jaringan bisnis yang lebih luas. Sedangkan bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari kebijakan dan program, dan cakupan dampaknya yang signifikan.

Secara umum, klaster industri dapat diartikan sebagai kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun nonbisnis. Para pelaku (*stakeholders*) dalam suatu klaster industri biasanya dikelompokkan menjadi industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait, industri pembeli, serta institusi pendukung (di luar industri). Istilah inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam klaster dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.

Hingga saat ini, pengembangan klaster industri di Kota Pekalongan dalam pengertian di atas belum terjadi. Pengembangan industri yang ada baru dalam bentuk sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM). Sentra IKM yang berkembang antara lain adalah sentra industri batik (kampung batik), sentra budidaya dan pengolahan ikan (kawasan minapolitan), serta sentra industri makanan olahan (berbasis tempe dan tahu). Meskipun demikian,

Kota Pekalongan dapat menjadikan industri perbatikan dan industri perikanan sebagai fokus dalam pilar pengembangan klaster industri.

Selain pengembangan industri perbatikan, industri perikanan, dan industri makanan olahan, pengembangan ekonomi kreatif dapat pula dijadikan fokus untuk pengembangan pilar klaster industri. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kota Pekalongan memiliki potensi yang prospektif dalam 18 bidang ekonomi kreatif, yaitu animasi, arsitektur, desain, fotografi, musik, kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan pengembangan, penerbitan, perfilman, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, teknologi informasi, televisi dan radio, serta video.

Ekonomi kreatif penting untuk dikembangkan sebagai fokus strategis dalam penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan karena ekonomi kreatif diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Pekalongan, baik berkontribusi positif terhadap PDRB, penciptaan lapangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat karena produk dan karya kreatif banyak diminati oleh pasar lokal, nasional dan global, serta memberikan dampak yang positif bagi sektor lainnya. Di samping itu, ekonomi kreatif dapat pula mengangkat citra dan identitas Kota Pekalongan melalui karya dan produk, serta orang kreatif yang mendapatkan pengakuan di level nasional dan internasional serta juga menjadi media diplomasi budaya lintas daerah dan negara. Hal ini tentunya dapat memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota Pekalongan serta sekaligus memperkuat posisi Kota Pekalongan di tingkat regional Provinsi Jawa Tengah, nasional dan internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif juga dapat melestarikan sumber daya alam dan sumber daya budaya Kota Pekalongan, karena ekonomi kreatif merupakan sektor yang dapat menciptakan produk dan karya dengan nilai tambah yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Melalui ekonomi kreatif kita mampu mengemas sumber daya budaya menjadi tradisi yang hidup di dalam masyarakat dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekonomi

kreatif pun memiliki dampak positif terhadap aspek sosial, yaitu dapat meningkatkan toleransi sosial dan rasa cinta dan bangga sebagai masyarakat Kota Pekalongan.

Adapun kondisi saat ini setiap kerangka kebijakan inovasi di dalam pilar pengembangan klaster industri (dalam arti pengembangan industri/usaha kecil dan menengah perbatikan, perikanan, dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi kreatif) ditampilkan secara singkat pada Tabel 2.3.

2.2.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi Pengembangan Klaster Industri

Kondisi kerangka umum pengembangan klaster industri di Kota Pekalongan dapat dikatakan sudah kondusif, namun masih perlu dilengkapi dan dioptimalkan. Ada tiga elemen yang mendukung kondisi seperti ini sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.3. *Pertama*, regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 523/138 tentang Kawasan Minapolitan.
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 016/634 Tahun 2015 tentang Forum Rembug Klaster Industri Unggulan Kota Pekalongan.
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 514/015 Tahun 2015 tentang Forum Pewarna Alam.

Sementara itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan IKM/UKM perbatikan (Kampoeng Batik Kauman, Kampoeng Batik Pesindon, Kampung Canting Lindungsari, Kampung Tenun Medono), pengembangan IKM/UKM perikanan (Sentra Terasi Bandengan), dan pengembangan IKM/UKM makanan olahan (Kampung Tempe Kuripan Kidul, Sentra Tahu Duwet, Banyu Alit dan Banyu Agung) belum ada. Begitu juga halnya dengan regulasi tentang pengembangan ekonomi kreatif.

Kedua, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di antaranya dalam bentuk pembebasan retribusi daerah. Sedangkan insentif berupa pengurangan, keringanan atau

pembebasan pajak daerah, pemberian bantuan modal maupun pemberian dana stimulan belum ada. Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang telah diberikan pemerintah kota dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di antaranya berupa :

- a. Fasilitasi akses permodalan bagi IKM/UKM secara umum (335 UMKM).
- b. Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan IKM/UKM inovatif (66 orang).
- c. Bantuan alat produksi (seperti mesin jahit untuk usaha garmen).
- d. Fasilitasi kemasan produk IKM/UKM.
- e. Fasilitasi keikutsertaan IKM/UKM dalam pameran, expo dan sejenisnya.
- f. Fasilitasi penciptaan *branding* IKM/UKM.
- g. Fasilitasi berbagai jenis pelatihan pengembangan IKM/UKM, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pembuatan *website*.

Ketiga, pengembangan industri/usaha kecil dan menengah sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2015, serta Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan. Di samping itu ada pula dokumen kajian tentang potensi usaha baru berbasis klaster industri (3 kajian). Sedangkan dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 belum ada. Sementara itu, dokumen yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif belum ada. Kota Pekalongan hingga saat ini belum menyusun Rencana Aksi Jangka Menengah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan.

Masih dalam elemen infrastruktur dasar, Kota Pekalongan belum mengembangkan database industri/usaha kecil dan menengah

berbasis GIS (*geographic information system*). Data industri/usaha kecil dan menengah yang ada saat ini masih dikelola secara manual oleh Dinperindagkop UKM. Sedangkan pusat dan informasi batik dikelola oleh Pengelola Museum Batik. Sementara itu, database mengenai pengembangan ekonomi kreatif juga belum ada.

2.2.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna IPTEKIN/Hasil Litbangyasa dalam Pengembangan Klaster Industri

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kreatif juga sudah cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini (lihat Tabel 2.3). *Pertama*, di bidang pengembangan industri/usaha kecil dan menengah perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan berasal dari unsur lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), unsur perguruan tinggi dan pendidikan menengah, yakni Universitas Pekalongan (Fakultas Teknologi Batik), Politeknik Pusmanu (Program Studi Teknik Batik), Akademi Komunitas Negeri, STMIK Widya Pratama dan SMK Muhammadiyah. Universitas Pekalongan juga memiliki Fakultas Perikanan yang diharapkan dapat mendorong pengembangan industri/usaha kecil dan menengah yang berusaha di bidang budidaya perikanan. Selain itu, terdapat pula lembaga IPTEKIN/Litbangyasa dari unsur badan usaha (seperti CV Cipta Indo Rekin) dan lembaga penunjang (DRD, Posyantek dan Wartek). Sedangkan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, ada Kantor Ristekin, perguruan tinggi, badan usaha, DRD, Posyantek dan Wartek. Sementara itu, dari luar Kota Pekalongan ada pula lembaga IPTEKIN/Litbangyasa yang berperan mengembangkan industri/usaha kecil dan menengah, di antaranya Balai Besar Batik Kerajinan Yogyakarta dan Balai Besar Tekstil Bandung.

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif meningkat dan mampu mendorong pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di Kota Pekalongan. Sumber daya manusia

IPTEKIN/Litbangyasa tersebar terutama di kalangan dosen, pejabat fungsional dan masyarakat (sumber daya manusia yang berkecimpung di posyantek dan wartek). Di sisi lain, dukungan alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber, yakni pemerintah kota, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga penunjang.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang mendukung pengembangan industri/usaha kecil dan menengah dan pengembangan ekonomi kreatif, sudah dimanfaatkan oleh industri/usaha kecil dan menengah batik yang ada di sentra produksi batik maupun di luar sentra produksi batik. Misalnya wajan batik, plorot malam batik, mesin cap batik semi otomatis yang ketiga-tiganya dihasilkan oleh SMK Muhammadiyah serta kompor batik listrik yang dihasilkan oleh Posyantek Mitra Pantura. Pemanfaatan mesin cap batik semi otomatis telah mempercepat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan batik. Selain itu, pengrajin batik yang ada di sentra-sentra produksi batik juga mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan teknologi desain batik dan tenun.

Usaha kecil dan menengah perikanan juga telah bisa memanfaatkan hasil inovasi masyarakat, seperti termos *packing* ikan segar berlapis *Styrofoam* dan kain batik yang diciptakan oleh warga Pekalongan Utara. Alat ini memiliki keunggulan dalam durasi kesegaran ikan yang diangkut, yakni bisa mencapai 24 jam, jauh lebih lama dibandingkan termos *packing* ikan biasa yang hanya 6-7 jam. Industri/usaha kecil dan menengah bidang makanan juga telah mengadopsi beberapa hasil IPTEKIN/Litbangyasa, di antaranya teknologi *packing* produk makanan dan alat perajang singkong otomatis.

2.2.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Klaster Industri

Kondisi saat ini kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah diindikasikan oleh tiga elemen.

Tabel 2.3. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Klaster Industri Kota Pekalongan, 2015

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
K_i	E_i	I_i	P2
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan ekonomi kreatif	Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Minapolitan (Keputusan Walikota Pekalongan No. 523/138). • Forum Rembug Klaster Industri Unggulan Kota Pekalongan (Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 016/634 Tahun 2015). • Forum Pewarna Alam (Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 514/015 Tahun 2015).
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan IKM/UKM dan ekonomi kreatif	Sesuai PP No. 45 Tahun 2008, jenis insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi kreatif adalah dalam bentuk pembebasan retribusi daerah. Sedangkan insentif berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, pemberian bantuan modal maupun pemberian dana stimulan belum ada. Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang diberikan pemerintah kota di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi akses permodalan bagi IKM/UKM secara umum (335 UMKM). • Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan ukm inovatif (66 orang). • Bantuan alat produksi (seperti mesin jahit untuk usaha garmen). • Fasilitasi kemasan produk IKM/UKM. • Fasilitasi keikutsertaan IKM/UKM dalam pameran, expo dan sejenisnya. • Fasilitasi penciptaan <i>branding</i>. • Fasilitasi berbagai jenis pelatihan pengembangan IKM/UKM.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan IKM/UKM dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pengembangan IKM/UKM sudah dimuat dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan IKM/UKM perbatikan dan IKM/UKM makanan olahan : Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. b. Pengembangan IKM/UKM perikanan : Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 dan Master Plan Pengembangan Minapolitan Kota Pekalongan. c. Kajian potensi usaha baru berbasis klaster industri (3 kajian).

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pengembangan ekonomi kreatif belum ada.
		Ketersediaan database IKM/UKM dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Database IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan yang berbasis GIS belum ada. Sedangkan data IKM/UKM yang ada saat ini dikelola secara manual oleh Dinperindagkop UKM dan DPPK. Sedangkan pusat dan informasi batik dikelola oleh Museum Batik. Database pengembangan ekonomi kreatif belum ada.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<p>Lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan IKM/UKM perbatikan : Kantor Ristekin, Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Program Studi Teknik Batik Politeknik Pusmanu, SMK Muhammadiyah, DRD, Posyantek dan Wartek. Pengembangan IKM/UKM perikanan : Kantor Ristekin, Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan, CV Cipta Indo Rekin, DRD, Posyantek dan Wartek. Pengembangan IKM/UKM makanan : Kantor Ristekin, CV Cipta Indo Rekin, Posyantek dan Wartek. Pengembangan ekonomi kreatif : Kantor Ristekin, perguruan tinggi, badan usaha, DRD, Posyantek dan Wartek.
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	Sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang berperan dalam mendorong pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan, dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi kreatif, tersebar di kalangan pejabat fungsional, dosen, mahasiswa, tenaga ahli perusahaan, anggota DRD, anggota Tim Koordinasi PSID, dan masyarakat inovatif di Posyantek dan Wartek.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa untuk pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan, dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi kreatif bersumber dari pemerintah kota, perguruan tinggi, perusahaan swastadan lembaga penunjang.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa sudah menjangkau IKM/UKM yang bergerak di bidang usaha perbatikan, perikanan, dan makanan olahan, serta beberapa sektor ekonomi kreatif.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Kluster Industri
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis IKM/UKM dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan strategis untuk pemajuan IKM/UKM sudah dijalin oleh para pelaku bisnis IKM/UKM dengan berbagai mitra (6 kemitraan antardaerah) ; <ol style="list-style-type: none"> a. IKM/UKM perbatikan : dengan pengelola mal-mal di Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya untuk pemasaran, <i>event organizer</i> untuk pameran/sejenisnya. b. IKM/UKM perikanan : dengan posyantek untuk pengepakan ikan segar, dengan dunia perbankan. c. IKM/UKM makanan : dengan perguruan tinggi untuk pengembangan produk makanan higienis (tempe). • Kemitraan strategis untuk pemajuan ekonomi kreatif baru berkembang untuk beberapa sektor, seperti televisi, radio, desain, kuliner, mode, riset, dan kerajinan.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi IKM/UKM dan ekonomi kreatif	Sebaran difusi inovasi di Kota Pekalongan : <ul style="list-style-type: none"> • IKM/UKM perbatikan : wajan batik, plorot malam batik, mesin cap batik semi otomatis, teknologi desain batik dan tenun, kompor batik listrik. • IKM/UKM perikanan : termos <i>packing</i> ikan segar (TPI) berlapis <i>styrofoam</i>, teknologi budidaya udang tertutup. • IKM/UKM makanan : teknologi <i>packing</i> produk makanan, alat perajang singkong otomatis. • Ekonomi kreatif : beberapa sektor ekonomi kreatif.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis IKM/UKM dan ekonomi kreatif	Wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan serta pelaku ekonomi kreatif di antaranya adalah pameran IKM/UKM, forum-forum IKM/UKM, pameran iptekin, gelar TTG, sekretariat posyantek, sekretariat wartek, lainnya.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Model penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbatikan : pendirian Fakultas Teknologi Batik di Universitas Pekalongan dan Program Studi Teknik Batik di Politeknik Pusmanu. • Perikanan : pendirian Fakultas Perikanan di Universitas Pekalongan. • Makanan olahan : secara spesifik belum ada. • Ekonomi kreatif : pendirian beberapa jurusan/program studi yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi kreatif di berbagai perguruan tinggi dan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	<p>sekolah menengah.</p> <p>Model penguatan budaya kreatif-inovatif di kalangan pelaku IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan serta pelaku ekonomi kreatif melalui jalur pelatihan di antaranya adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pembuatan IT (website/blog), pengayaan desain, pengepakan, dan lain-lain.</p>
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Model pengelolaan teknologi masyarakat di kalangan pelaku IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan dilakukan melalui pembelajaran turun temurun. • Model pengelolaan teknologi masyarakat di kalangan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui penciptaan nilai tambah berbasis ide orang-orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program <i>reverse brain drain</i> di lingkup IKM/UKM belum berkembang, baik untuk bidang usaha perbatikan, perikanan maupun makanan olahan. • Program <i>reverse brain drain</i> di lingkup ekonomi kreatif juga belum berkembang. <p>Agenda apresiasi inovasi khusus untuk para pelaku IKM/UKM perbatikan, perikanan, dan makanan olahan serta sektor-sektor ekonomi kreatif secara spesifik belum ada.</p>
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Jenis media kampanye inovasi	<p>Media kampanye inovasi IKM/UKM dan ekonomi kreatif adalah televisi, radio, pameran, film/video dokumenter, <i>website/blog</i>, profil/brosur/katalog, dan lain-lain.</p> <p>Penumbuhan usaha baru inovatif di sektor IKM/UKM dan sektor-sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui :</p> <p>a. Model pemberian insentif pembebasan retribusi daerah, pemberian fasilitas bantuan alat dan mesin, percepatan dan pembebasan biaya pelayanan perizinan, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.</p>
		Model penumbuhan usaha baru inovatif	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Kluster Industri
			b. Model pengembangan kampung wisata batik, wisata kuliner, pertunjukan seni, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan IKM/UKM dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan IKM/UKM berbasis sentra industri di Kota Pekalongan difokuskan pada bidang perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan. • Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan belum difokuskan pada sektor-sektor apa saja, tetapi potensinya terdapat di dalam 18 sektor ekonomi kreatif.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan IKM/UKM dan ekonomi kreatif	<p>Kerja sama daerah yang dijalin Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya ialah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan IKM/UKM perbatikan : dengan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan (KSAD), dengan LIPI, Politeknik Pusmanu, Thamrin City Jakarta, Metro Dallas Plaza Bandung (KSPK). • Pengembangan IKM/UKM perikanan : dengan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal (KSPK). • Pengembangan IKM/UKM makanan olahan : belum teridentifikasi. • Pengembangan ekonomi kreatif : dengan perancang dan rumah mode Italia (KSLN).
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Rembug Kluster Industri (6 forum). • Pengurus Forum Pewarna Alam Kota Pekalongan (Keputusan Walikota Pekalongan No. 534/015 Tahun 2015). • Paguyuban-paguyuban batik (seperti Paguyuban Kampoeng Wisata Batik Pesindon, Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan). • Himpunan Pengusaha Ikan Pekalongan (HPIP). • Kelompok Usaha Bersama Pengolah Ikan. • Asosiasi Pecinta Ikan Hias Pekalongan (APHIKAL). • Kelompok seni daerah (519 unit).
Menyelaraskan dinamika global ke	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • IPAL terpadu/komunal dan IPAL individu di sentra-sentra produksi batik di Jenggot, Kauman, Duwet dan Keradenan.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan konsep produksi bersih (<i>green production</i>) dalam proses produksi batik dan tahu-tempe. • Pemakaian zat pewarna alam dalam memproduksi batik.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi internasional untuk produk IKM/UKM belum ada. • Standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan higienis. • Standarisasi produk halal. • Pelatihan sertifikasi proses dan produk industri makanan.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	<p>HKI yang sudah dimiliki IKM/UKM adalah merek. Setiap tahun Kota Pekalongan menargetkan pendaftaran paten, merek dan label batik bagi 20 IKM batik.</p> <p>HKI yang terkait dengan ekonomi kreatif belum berkembang.</p>
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja terampil di lingkungan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan makanan olahan serta sektor-sektor ekonomi kreatif belum ada.

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), *Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota Pekalongan Tahun 2014*; Alkadri (2015), "Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan," *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan industri/usahakecil dan menengah dan pemajuan ekonomi kreatif sudah dijalin dengan berbagai mitra, seperti dengan pengelola mal-mal di Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya untuk pemasaran produk batik, dengan *event organizer* untuk pameran/sejenisnya, dengan posyantek untuk pengepakan ikan segar, dengan perbankan serta dengan Forum Tempe Indonesia, Forum Rembug Klaster, Universitas Negeri Semarang dan Institut Pertanian Bogor untuk pengembangan tempe higienis. Kemitraan strategis untuk pemajuan ekonomi kreatif baru berkembang untuk beberapa sektor, seperti televisi, radio, desain, kuliner, mode, riset, dan kerajinan.

Kedua, sebaran difusi inovasi di Kota Pekalongan sudah menjangkau industri/usaha kecil dan menengah perbatikan, perikanan, makanan olahan, serta beberapa sektor ekonomi kreatif seperti kerajinan, desain, dan mode. Di lingkup industri/usaha kecil dan menengah batik, difusi inovasi yang sudah diterapkan antara lain hasil inovasi wajan batik, plorot malam batik, mesin cap batik semi otomatis dan kompor batik listrik. Di bidang usaha budidaya udang, telah diterapkan teknologi budidaya udang tertutup dengan *biosecurity* yang ketat seperti penggunaan benih bebas virus, pemasangan pagar di sekeliling tambak dan penggunaan plastik mulsa di dasar tambak. Difusi inovasi lainnya di kalangan industri/usaha kecil dan menengah dilakukan melalui pelatihan teknologi produk tempe, pelatihan teknologi desain batik dan tenun, diversifikasi pengolahan ikan serta pelatihan dan fasilitasi kemasan produk.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku industri/usaha kecil dan menengah serta antarpelaku ekonomi kreatif di antaranya adalah pameran industri/usaha kecil dan menengah, forum-forum industri/usaha kecil dan menengah, pameran iptekin, gelar teknologi tepat guna, posyantek, wartek, telecenter, dan lain-lain. Di bidang industri/usaha kecil dan menengah perikanan, salah satu forum

yang rutin dilaksanakan adalah Forum Diskusi Jejaring Klaster Perikanan Kota Pekalongan. Secara umum, ada juga wahana interaksi antar pelaku industri/usaha kecil dan menengah yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bertajuk Curhat Bisnis.

2.2.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam Pengembangan Klaster Industri

Empat elemen yang dikembangkan dalam penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnis di kalangan industri/usaha kecil dan menengah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.3. *Pertama*, melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan inovasi dan bisnis. Penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dilakukan dengan cara mendirikan Fakultas Teknologi Batik (Universitas Pekalongan), Program Studi Batik (Politeknik Pusmanu) dan Fakultas Perikanan (Universitas Pekalongan) serta pendirian beberapa jurusan/program studi yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi kreatif di berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah. Sedangkan penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan bagi kalangan industri/usaha kecil dan menengah melalui jalur pelatihan dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, seperti kewirausahaan, desain, pembuatan *website*, dan lain-lain.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*. Di dalam industri perbatikan, pengelolaan teknologi dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik secara pembelajaran turun temurun. Begitu pula halnya di industri perikanan dan makanan. Sedangkan model pengelolaan teknologi masyarakat di kalangan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui penciptaan nilai tambah berbasis ide orang-orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sementara itu, *reverse brain drain* belum berkembang, baik untuk

bidang usaha perbatikan, perikanan, makanan olahan maupun ekonomi kreatif.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen apresiasi inovasi secara umum dilakukan dalam bentuk melibatkan industri/usaha kecil dan menengah dan pelaku ekonomi kreatif dalam agenda Kreanova dan Anugerah Inovasi serta gelar teknologi tepat guna tingkat kelurahan. Namun, agenda apresiasi inovasi yang khusus ditujukan untuk para pelaku industri/usaha kecil dan menengah perbatikan, perikanan, makanan olahan dan sektor-sekto ekonomi kreatif hingga kini belum ada. Sedangkan penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan dalam bentuk menampilkan industri kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif yang berprestasi dalam program-program tertentu, baik melalui media televisi lokal (Batik TV), siaran radio lokal, maupun pameran produk unggulan daerah (skala lokal, regional, nasional dan internasional).

Keempat, melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan usaha baru inovatif di sektor industri/usaha kecil dan menengah serta sektor-sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui model insentif pembebasan retribusi daerah, pemberian fasilitasi bantuan alat dan mesin, percepatan dan pembebasan biaya perizinan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, pertunjukan seni, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.

2.2.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri

Kondisi saat ini fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut. *Pertama*, fokus pengembangan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif. Pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di Kota

Pekalongan difokuskan pada bidang industri perbatikan, industri perikanan dan industri pengolahan makanan. Sedangkan pengembangan ekonomi kreatif belum difokuskan pada sektor-sektor tertentu.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan industri/usaha kecil dan menengah serta pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari :

- a. Kerja sama antardaerah, yakni antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan :
 - (1). Pemerintah Kota Medan tentang pengembangan produk batik.
 - (2). Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang penanganan limbah produksi batik melalui pengembangan instalasi pembuangan air limbah (IPAL).
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan beberapa mitra berikut :
 - (1). Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang supervisi pembinaan dan fasilitasi kemitraan.
 - (2). Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemanfaatan dan pengembangan tambak terlantar di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
 - (3). BPPP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan) Tegal.
 - (4). LIPI tentang penelitian dan penerapan teknologi pengolahan limbah batik.
 - (5). Pengelola Thamrin City Jakarta tentang pemanfaatan secara gratis tiga bulan pertama kios-kios di lantai satu dan dua.
 - (6). Pengelola Metro Dallas Plaza Bandung tentang pemanfaatan secara gratis selama setahun 84 kios di lantai satu.

- (7). Politeknik Pusmanu tentang pewarna alam batik.
- c. Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri, yakni antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan perancang dan rumah mode di Italia.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga berikut :

- Forum Rembug Klaster (ada 6 forum).
- Pengurus Forum Pewarna Alam Kota Pekalongan (Keputusan Walikota Pekalongan No. 534/015 Tahun 2015).
- Paguyuban-paguyuban batik (seperti Paguyuban Kampoeng Wisata Batik Pesindon, Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan).
- Himpunan Pengusaha Ikan Pekalongan (HPIP).
- Kelompok Usaha Bersama Pengolah Ikan.
- Kelompok Pembudidaya Ikan (Podakan).
- Asosiasi Pecinta Ikan Hias Pekalongan (APHIKAL).
- Kelompok Seni Daerah (519 unit).

2.2.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam Pengembangan Klaster Industri

Dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah, upaya penyelarasan dinamika global dilakukan melalui empat elemen.

Pertama, melalui elemen isu lingkungan. Dalam hal ini, pelaku industri/usahakecil dan menengah telah :

- a. Membuat IPAL terpadu/komunal dan IPAL individu di sentra-sentra produksi batik di Jenggot, Kauman, Duwet dan Kradenan.
- b. Menerapkan konsep produksi bersih dalam proses produksi batik dan produksi tahu-tempe.

- c. Mengembangkan pemakaian zat pewarna alami oleh industri/usaha kecil dan menengah perbatikan dalam memproduksi batik.

Kedua, penyelarasan isu standarisasi. Hingga saat ini juga telah dilakukan standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan higienis. Di samping itu, dilakukan pula standarisasi produk halal serta pada setiap tahun dilaksanakan pelatihan sertifikasi proses dan produk industri makanan olahan.

Ketiga, melalui elemen hak kekayaan intelektual (HKI). HKI yang sudah dimiliki industri/usaha kecil dan menengah adalah paten dan merek. Setiap tahun Kota Pekalongan menargetkan pendaftaran paten, merek dan label batik bagi 20 industri/usaha kecil dan menengah perbatikan. Sedangkan HKI yang terkait dengan ekonomi kreatif belum berkembang.

Keempat, dalam hal isu ketenagakerjaan, memang belum berkembang sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja di industri/usaha kecil dan menengah perbatikan, perikanan, makanan olahan, maupun sektor-sektor ekonomi kreatif.

2.3. PILAR PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

Jaringan inovasi adalah interaksi antaraktor/pelaku/komponen dalam proses pengembangan inovasi dan bisnis melalui berbagai media atau infrastruktur tertentu. Aktor/pelaku/komponen yang dimaksud adalah lembaga IPTEKIN/Litbangyasa (milik pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat), industri (berbagai industri terkait skala mikro, kecil, menengah dan besar), dan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Interaksi antaraktor/pelaku/komponen ini dapat beraneka ragam, baik itu bersifat teknik, akademis, politis, komersial, sosial, maupun finansial.

Di Kota Pekalongan, fokus pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui (1) pembangunan kawasan teknopolitan batik, (2)

kawasan *techno park* perikanan, dan (3) pendirian pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek) di level kecamatan dan warung teknologi tepat guna (wartek) di jenjang kelurahan.

Di bawah ini, sebagaimana tampak pada Tabel 2.4, akan dijabarkan secara singkat tentang kondisi saat ini pilar pengembangan jaringan inovasi (kawasan teknopolitan batik, kawasan *techno park* perikanan, serta posyantek dan wartek) menurut enam elemen kerangka kebijakan inovasi.

2.3.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi Pengembangan Jaringan Inovasi

Ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi kerangka umum pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan sebagaimana tampak dalam Tabel 2.4. *Pertama*, elemen regulasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan teknopolitan batik adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.
- b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Lembaga Pengelola Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.

Tabel 2.4. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi Kota Pekalongan, 2015

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
K_i	E_i	I_i	P3
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan jaringan inovasi	Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi pengembangan kawasan teknopolitan batik: <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan. b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Lembaga Pengelola Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan. • Regulasi pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Lokasi <i>Techno Park</i> Perikanan Kota Pekalongan. b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. c. Keputusan Walikota Pekalongan tentang SOP Perizinan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan. d. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Nomor 523.05/054 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Mitra Pendamping Pengembangan "Techno Park" Perikanan Kota Pekalongan • Regulasi pengembangan posyantek dan wartek adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Walikota Pekalongan No. 413.5/004 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna. b. Keputusan Walikota Pekalongan No. 413.5/168 Tahun 2012 tentang Pembentukan Posyantek Mitra Pantura di Kecamatan Pekalongan Utara. c. Keputusan Lurah Krpyak Kidul No. 211/012 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wartek Mitra Sejahtera Kelurahan Krpyak Kidul.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan jaringan inovasi	Sesuai PP No. 45 Tahun 2008, insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan kawasan teknopolitan batik,

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
			<p>pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan maupun pengembangan posyantek dan wartek belum ada.</p> <p>Sedangkan kemudahan yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : belum ada. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : percepatan pelayanan dan pembebasan biaya perizinan usaha pembudidayaan ikan bagi Pokdakan yang berlokasi di kawasan <i>techno park</i> perikanan. • Pengembangan posyantek dan wartek :(1) fasilitasi ruang kantor sekretariat berikut prasaranan dan sarana perkantoranannya, (2) fasilitasi keikutsertaan posyantek dalam lomba TTG, menjadi narasumber, pelaksanaan pelatihan, studi banding, pembinaan usaha produktif, lainnya.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan jaringan inovasi	<p>Dokumen perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan tentang pengembangan kawasan teknopolitan batik : (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015,(2) Master Plan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan, (3) Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan Tahun 2015-2019. • Dokumen perencanaan tentang pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : belum ada. Pada tahun 2015 ini sedang disusun dokumen <i>master plan</i> dan beberapa dokumen lainnya. • Dokumen perencanaan tentang pengembangan posyantek dan wartek : Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. Rencana Aksi Daerah tentang Penguatan Posyantek dan Wartek Kota Pekalongan belum ada.
		Ketersediaan database jaringan inovasi	<p>Ketersediaan database :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Database pengembangan kawasan teknopolitan batik sedang dikembangkan, data yang ada dikelola secara manual oleh Bappeda dan Dinas PU.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Database pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan sedang dikembangkan, data yang ada dikelola secara manual oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bappeda dan Kantor Ristekin. • Database pengembangan posyantek dan wartek sedang dikembangkan, data yang ada dikelola secara manual oleh BPMP2AKB, posyantek di empat kecamatan dan wartek-wartek di kelurahan.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<p>Lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Kantor Ristekin (lembaga litbang pemda), Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Program Studi Teknik Batik Politeknik Pusmanu (perguruan tinggi). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : Kantor Ristekin (lembaga litbang pemda), Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan (perguruan tinggi). • Pengembangan posyantek dan wartek : Kantor Ristekin (lembaga litbang pemda), STAIN dan STMIK Widya Pratama (perguruan tinggi).
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa	<p>Daya dukung sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : para dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Program Studi Teknik Batik Politeknik Pusmanu. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : para dosen dan mahasiswa di Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan • Pengembangan posyantek dan wartek : wirausaha dan masyarakat kreatif-inovatif.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<p>Anggaran IPTEKIN/Litbangyasa yang dialokasikan pemerintah kota (APBD) untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Rp200,9 juta (2013). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : Rp12,51 miliar (2015, <i>committed</i>). • Pengembangan posyantek dan wartek : Rp400 juta untuk pembentukan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	<p>posyantek.</p> <p>Sebaran penyerapan hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan pengunjung lainnya melalui Museum Batik (terutama dalam bentuk absorpsi ilmu pengetahuan perbatikan). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan maupun kelompok usaha bersama perikanan. • Pengembangan posyantek dan wartek : IKM/UKM, masyarakat, kelompok usaha/wirausahawan.
	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis jaringan inovasi	<p>Kemitraan strategis untuk pemajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik :dengan pusat riset dan perguruan tinggi, sentra produksi batik, pusat pemasaran batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : dengan lembaga litbang (BPPT), perguruan tinggi (Universitas Pekalongan), badan usaha (PT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan). • Pengembangan posyantek dan wartek : dengan perguruan tinggi (STAIN Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama), sekolah menengah (SMK Muhammadiyah), kelompok usaha, posyantek di kabupaten/kota lain, wirausahawan, forum LPM, dan lain-lain.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	<p>Sebaran difusi inovasi melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : <i>display</i> hasil inovasi perbatikan di Museum Batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : penerapan teknologi budidaya nila salina (<i>aline Indonesian tilapia</i>) dan teknologi budidaya perikanan terintegrasi multitropik berbasis metode <i>sato umi</i> (masih dalam tahap diseminasi pada tahun 2015 ini). Sudah ada penerapan teknologi budidaya udang tertutup dan teknik <i>silvio fishery</i>. • Pengembangan posyantek dan wartek : teknologi tepat guna yang diserap oleh masyarakat dan pelaku bisnis adalah berupa alat pembuat BBM plastik, alat perajang kentang spiral, kompor batik listrik, blong

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
			fermentasi, alat duplikat ukiran, alat tambal ban listrik, alat perajang singkong otomatis, parut kelapa mini, TPI (termos <i>packing</i> ikan), <i>septic tank</i> apung, kupu-kupu batik (dari daun), mikro bakteri penyubur tanah, batak limbah batu bara dan teknologi pembuatan sirup mangrove.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku jaringan inovasi	Wahana interaksi bagi pelaku : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Pusat Inovasi dan Budaya Batik, RPK Kawasan Taman Batik Jetayu. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : Pusat Inovasi <i>Techno Park</i> Perikanan (dalam tahap perancangan). • Pengembangan posyantek dan wartek : Sekretariat Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Sekretariat Warung Teknologi Tepat Guna. • Wahana interaksi berbasis TIK : aplikasi knowledge management berbasis Android, aplikasi kolaborasi berbasis web.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Model penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pendidikan dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : diseminasi pengetahuan membatik di Museum Batik (Mulok Batik). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : diseminasi teknik budidaya ikan di kolam/tambak percobaan milik Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. • Pengembangan posyantek dan wartek : pemanfaatan fasilitas <i>workshop</i> lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Model penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pelatihan dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : demo ketrampilan membatik di Museum Batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : pelatihan teknik budidaya ikan di kolam/tambak percobaan milik Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. • Pengembangan posyantek dan wartek : pelatihan dan sosialisasi pengelolaan posyantek.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Model pengelolaan teknologi masyarakat dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Museum Batik sebagai

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
	<i>brain drain</i>		wadah untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan batik. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek :-
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Program <i>reverse brain drain</i> dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : pengangkatan curator Museum Batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek :-
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Apresiasi inovasi dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Cipta Award 2012. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek : Lomba/Gelar TTG Tingkat Kelurahan.
		Jenis media kampanye inovasi	Media kampanye dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Batik TV, surat kabar, pameran. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek : TV Batik, stasiun televisi nasional, siaran radio lokal, video/film dokumenter, surat kabar, web, pamflet.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik : - • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : <i>demonstration farm</i>. • Pengembangan posyantek dan wartek : pembinaan usaha produktif.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan jaringan inovasi	Bidang fokus pengembangan jaringan inovasi : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan. • Pengembangan posyantek dan wartek.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan jaringan inovasi	Sebaran kerja sama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama antardaerah : -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Kerja sama dengan pihak ketiga : BPPT, Asosiasi Pengusaha Batik, Politeknik Pusmanu, Akademi Komunitas Negeri. c. Kerja sama luar negeri : - • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama antardaerah : - b. Kerja sama dengan pihak ketiga : KKP, BPPT, PT PPNP. c. Kerja sama luar negeri : - • Pengembangan posyantek dan wartek: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama antardaerah : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. Kerja sama dengan pihak ketiga : Kementerian Dalam Negeri. c. Kerja sama luar negeri : -
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus jaringan inovasi	Kelembagaan khusus dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: BLUD PIBB (tahap pengkajian). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan :Pusat Inovasi Perikanan,Lembaga Pendamping, Kelompok Usaha Bersama (tahap pembentukan). • Pengembangan posyantek dan wartek : Kelompok Usaha Bersama.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: Program Kali Bersih di Sungai Loji, Pengembangan ruang publik kreatif (RPK) berbasis ruang terbuka hijau (RTH). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : Kawasan Konservasi Mangrove. • Pengembangan posyantek dan wartek : Kampung Hijau, Inovasi Mikro Bakteri Penyubur Tanah, <i>septic tank</i> apung dan BBM plastik.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Aplikasi standarisasi internasional dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan Museum Batik. • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek : -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: - • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek : paten sederhana termos packing ikan
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja terampil dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: - • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : - • Pengembangan posyantek dan wartek : -

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), *Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota Pekalongan Tahun 2014*; Alkadri (2015), "Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan," *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Regulasi yang telah dikeluarkan terkait dengan pengembangan kawasan *techno park* perikanan adalah:

- a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Lokasi *Techno Park* Perikanan Kota Pekalongan.
- b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- c. Keputusan Walikota Pekalongan tentang SOP Perizinan Pelayanan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- d. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Nomor 523.05/054 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Mitra Pendamping Pengembangan “Techno Park” Perikanan Kota Pekalongan.

Sedangkan regulasi lainnya masih menunggu penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan *techno park* perikanan (rencana induk kawasan, rencana aksi kawasan, kelembagan pengelola kawasan, lembaga pusat inovasi lembaga pusat riset perikanan, dan kelembagaan lainnya).

Sementara itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan posyantek dan wartek terdiri dari :

- a. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 413.5/004 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
- b. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 413.5/168 Tahun 2012 tentang Pembentukan Posyantek Mitra Pantura di Kecamatan Pekalongan Utara.
- c. Keputusan Lurah Krpyak Kidul Nomor 211/012 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wartek Mitra Sejahtera di Kelurahan Krpyak Kidul.

Kedua, elemen insentif. Jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengembangan kawasan teknopolitan batik, kawasan *techno park* perikanan maupun posyantek dan wartek hingga kini juga belum ada, baik insentif dalam bentuk pembebasan retribusi daerah, pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, pemberian bantuan

modal ataupun pemberian dana stimulan. Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang telah diberikan pemerintah kota untuk pengembangan posyantek di antaranya berupa (1) fasilitasi ruang kantor sekretariat berikut prasaranan dan sarana perkantorannya dan (2) fasilitasi keikutsertaan posyantek dalam lomba teknologi tepat guna, menjadi narasumber, pelaksanaan pelatihan, studi banding, pembinaan usaha produktif, dan lainnya. Sedangkan kemudahan yang terkait pengembangan kawasan *techno park* perikanan adalah berupa penyelenggaraan program percepatan pelayanan dan pembebasan biaya perizinan usaha pembudidayaan ikan bagi Pokdakan. Dalam pengembangan kawasan teknopolitan batik, belum ada kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

Ketiga, pengembangan kawasan teknopolitan batik sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (2) Master Plan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan, (3) Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan Tahun 2015-2019. Sedangkan dokumen tentang pengembangan kawasan *techno park* perikanan masih dalam tahap penyusunan pada tahun 2015 ini. Sementara itu, dokumen perencanaan pengembangan posyantek dan wartek dimuat dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2015.

Dalam hal ketersediaan database, saat ini data yang sudah tersedia dikelola secara manual oleh SKPD yang bersangkutan. Database pengembangan kawasan teknopolitan batik dikelola secara manual oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, database pengembangan kawasan *techno park* perikanan dikelola Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Menengah, Bappeda dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, sedangkan database pengembangan posyantek dan wartek tersebar di BPMP2AKB, posyantek di empat kecamatan, dan wartek-wartek di kelurahan.

2.3.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna IPTEKIN/Hasil Litbangyasa dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan kawasan teknopolitan batik, kawasan *techno park* perikanan maupun posyantek dan wartek sudah cukup baik. Ada tiga elemen yang menunjukkan hal ini. *Pertama*, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang terkait dengan pengembangan kawasan teknopolitan batik berasal dari lembaga litbang pemerintah daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), unsur perguruan tinggi (Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Program Studi Teknik Batik Politeknik Pusmanu, Akademi Komunitas Negeri). Kemudian, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan kawasan *techno park* perikanan adalah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Sedangkan lembaga IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan posyantek dan wartek adalah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pekalongan, STMIK Widya Pratama, serta badan usaha (CV Cipta Indo Rekin).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif meningkat dan mampu mendorong pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di Kota Pekalongan. Sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa tersebar terutama di kalangan dosen, mahasiswa dan masyarakat (sumber daya manusia yang berkecimpung di posyantek dan wartek). Di sisi lain, dukungan alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber, yakni pemerintah kota (APBD), perguruan tinggi dan masyarakat. Pada tahun 2013 lalu, pemerintah kota mengeluarkan anggaran senilai Rp 200,9 juta untuk penyusunan rencana induk pengembangan kawasan teknopolitan batik. Sedangkan pada tahun 2015 ini pemerintah kota berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan *techno park* perikanan sebesar Rp12,51 miliar. Sementara itu, untuk pembentukan posyantek di empat kecamatan pemerintah kota mengeluarkan dana sebesar Rp400 juta. Selain itu, ada juga

alokasi anggaran untuk pembinaan posyantek yang setiap tahunnya bervariasi sekitar Rp20-100 juta.

Ketiga, sebaran penyerapan hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui pengembangan kawasan teknopolitan batik di antaranya adalah para pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan pengunjung lainnya. Mereka menyerap hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui Museum Batik, terutama dalam bentuk absorpsi ilmu pengetahuan perbatikan. Kemudian, hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui pengembangan kawasan *techno park* perikanan diserap oleh nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun kelompok usaha bersama perikanan. Sedangkan IKM/UKM, masyarakat umum dan wirausahawan lainnya merupakan para penyerap hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui posyantek dan wartek.

2.3.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Kondisi saat ini kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan kawasan teknopolitan batik, kawasan *techno park* perikanan maupun posyantek dan wartek diindikasikan oleh tiga elemen.

Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan kawasan teknopolitan batik terdiri dari pusat riset dan perguruan tinggi, sentra produksi batik, dan pusat pemasaran batik. Untuk pemajuan kawasan *techno park* perikanan meliputi lembaga litbang (BPPT), perguruan tinggi (Universitas Pekalongan), serta badan usaha (PT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan CV Cipta Indo Rekin). Sedangkan untuk pengembangan posyantek dan wartek di antaranya mencakup perguruan tinggi (STAIN Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama), sekolah menengah (SMK Muhammadiyah), kelompok usaha, posyantek di kabupaten/kota lain, wirausahawan, forum LPM, dan lain-lain.

Kedua, sebaran difusi inovasi di Kota Pekalongan melalui pengembangan kawasan teknopolitan batik memang belum ada. Akan tetapi, di dalam pengembangan kawasan *techno park* perikanan sudah ada implementasi teknologi budidaya udang tertutup,

sedangkan penerapan teknologi budidaya ikan nila salina (*Saline Indonesian Tilapia*) yang dapat tumbuh optimal pada salinitas 20-25 ppt dan teknologi budidaya perikanan terintegrasi multitropik (satu umi) masih dalam tahap diseminasi (*demonstration farm*) pada tahun 2015 ini.

Sementara itu, hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui pengembangan posyantek dan wartek yang telah diserap masyarakat maupun IKM/UKM di Kota Pekalongan dalam bentuk teknologi tepat guna (TTG) antara lain berupa alat pembuat BBM plastik, alat perajang kentang spiral, kompor batik listrik, blong fermentasi, alat duplikat ukiran, alat tambal ban listrik, alat perajang singkong otomatis, parut kelapa mini, TPI (*termos packing* ikan), *septic tank* apung, kupu-kupu batik (dari daun), mikro bakteri penyubur tanah, batako limbah batu bara, dan teknologi pembuatan sirup mangrove.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku inovasi dan bisnis melalui pengembangan kawasan teknopolitan batik adalah Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan serta ruang publik kreatif (RPK) yang terdapat di Kawasan Taman Batik Jetayu. Wahana interaksi melalui pengembangan kawasan *techno park* perikanan ialah di kawasan manajemen *techno park* perikanan. Sedangkan wahana interaksi melalui pengembangan posyantek dan wartek adalah Sekretariat Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di setiap kecamatan dan Sekretariat Warung Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan yang sudah berdiri warteknya.

2.3.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Empat elemen yang dikembangkan dalam penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnisterkait dengan pengembangan jaringan inovasi (pengembangan kawasan teknopolitan batik, pengembangan kawasan *techno park* perikanan, pengembangan posyantek dan wartek) di Kota Pekalongan dapat dilihat kembali pada Tabel 2.4.

Pertama, melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan. Model penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan

teknopolitan batik hingga kini baru dalam bentuk demo pengetahuan dan ketrampilan membatik yang diselenggarakan secara rutin/berkala oleh Pengelola Museum Batik. Sedangkan model penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan *techno park* perikanan adalah dalam bentuk diseminasi dan pelatihan teknik budidaya ikan di kolam/tambak percobaan yang dikelola oleh Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Sementara itu, penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan dalam pengembangan posyantek dan wartek dalam bentuk pemanfaatan fasilitas *workshop* lembaga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pelatihan dan sosialisasi tentang model pengelolaan posyantek.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*. Dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan batik, pengelolaan teknologi dilakukan melalui Museum Batik yang berfungsi sebagai wadah untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan batik serta menjadi pusat data dan informasi batik, pusat riset dan pengembangan ilmu dan desain batik, dan perpustakaan batik. Sedangkan program *reverse brain drain* yang sudah ada ialah dalam bentuk pengangkatan seorang ahli batik sebagai curator Museum Batik. Lalu, dalam konteks pengembangan kawasan *techno park* perikanan dan pengembangan posyantek dan wartek belum teridentifikasi bagaimana pengelolaan teknologi masyarakat dan program *reverse brain drain* dilaksanakan.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi inovasi secara khusus belum ada, kecuali dalam bentuk lomba atau gelar TTG tingkat kelurahan serta beberapa penghargaan yang diterima Museum Batik. Sedangkan penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui media televisilokal (Batik TV), televisi nasional, siaran radio lokal, surat kabar, video/film dokumenter, *website*, pamflet, maupun pameran produk unggulan daerah (skala lokal, regional, nasional dan internasional).

Keempat, melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan usaha baru inovatif dalam konteks pengembangan kawasan *techno park* perikanan dilakukan melalui model *demonstration farm*. Dalam konteks pengembangan posyantek dan wartek dilakukan melalui model pembinaan usaha produktif. Sedangkan dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan batik belum ada model penumbuhan usaha baru inovatif.

2.3.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut. *Pertama*, fokus pengembangan jaringan inovasi adalah pengembangan kawasan teknopolitan batik, pengembangan kawasan *techno park* perikanan serta pengembangan posyantek dan wartek.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan jaringan inovasi dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri. Dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan batik, kerja sama daerah yang telah dilakukan baru dengan pihak ketiga, yakni dengan BPPT, Asosiasi Pengusaha Batik dan Politeknik Pusmanu (penyediaan sarana dan prasarana kegiatan). Begitu pula dalam pengembangan kawasan *techno park* perikanan, yang ada baru kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT dan PT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Sedangkan dalam pengembangan posyantek dan wartek sudah ada kerja sama antar daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dan kerja sama dengan pihak ketiga (Kementerian Dalam Negeri).

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan daerah-pusat melalui elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga berikut :

- a. Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Badan Layanan Umum Daerah Pusat Inovasi dan Budaya Batik (masih dalam tahap pengkajian).
- b. Pengembangan kawasan *techno park* perikanan : Pusat Inovasi, Pusat Riset Perikanan, Lembaga Pendamping, Tenaga Pendamping, Kelompok Usaha Bersama (dalam tahap pembentukan).
- c. Pengembangan posyantek dan wartek : Kelompok Usaha Bersama.

2.3.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Dalam pengembangan jaringan inovasi, upaya penyelarasan dinamika global dilakukan melalui empat elemen. *Pertama*, penyelarasan isu lingkungan. Dalam hal ini, program ramah lingkungan yang dilaksanakan adalah program kali bersih di Sungai Loji dan pengembangan ruang publik kreatif berbasis ruang terbuka hijau di Kawasan Taman Batik Jetayu (dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan batik), serta program pengembangan kawasan konservasi mangrove (dalam konteks pengembangan kawasan *techno park* perikanan).

Kedua, penyelarasan isu standarisasi. Hingga saat ini belum ada aplikasi standarisasi internasional di dalam pengembangan kawasan teknopolitan batik (kecuali penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan Museum Batik), kawasan *techno park* perikanan maupun pengembangan posyantek dan wartek. Namun demikian, pengembangan TTG di lingkup posyantek dan wartek sudah memperhatikan standar nasional (SNI).

Ketiga, penyelarasan isu hak kekayaan intelektual (HKI). HKI yang sudah dimiliki adalah dalam bentuk paten sederhana, yakni untuk hasil inovasi termos *packing* ikan segar yang diraih oleh inovator dari Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara.

Keempat, penyelarasan isu ketenagakerjaan. Hingga kini belum ada sertifikasi keahlian dalam pengembangan kawasan teknopolitan

batik, kawasan *techno park* perikanan maupun pengembangan posyantek dan wartek.

2.4. PILAR PENGEMBANGAN TEKNOPRENER

Teknoprener (*technopreneurship*) berasal dari dua kosa kata, yakni *technology* dan *entrepreneur*. *Technology* (teknologi) dapat diartikan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan *entrepreneur* (wiraswasta) berarti orang yang melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dengan demikian, secara sederhana teknoprener adalah wirausaha yang menjalankan bisnisnya dengan basis teknologi, inovasi dan/atau kreativitas.

Teknoprener mempunyai karakter sebagai berikut :

- Pengusaha yang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menghasilkan produk hasil inovasi secara sendiri atau berkelompok.
- Memulai usaha skala kecil atau menengah.
- Permodalan dimulai dari modal sendiri dan lingkungan terdekat.

Pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan dilaksanakan melalui tiga kelembagaan, yakni :

1. Inkubator bisnis dan teknologi, merupakan wahana yang dibentuk untuk menjalankan peran sebagai pusat rekayasa bisnis untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang memiliki daya saing, tangguh dan mandiri.
2. *Business development services-provider* (BDS-P), yaitu lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah).
3. Unit Produksi Bersama (UPB) SMK Incorporate, adalah wahana percepatan pembentukan wirausaha mandiri yang berasal dari kalangan pelajar melalui peningkatan kemampuan wirausaha di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Adapun kondisi saat ini pilar pengembangan teknopreneur – sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.5 – di Kota Pekalongan dapat diuraikan di bawah ini.

2.4.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi Pengembangan Teknopreneur

Tiga elemen yang mengindikasikan kondisi kerangka umum pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan adalah, *pertama*, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan ketiga kelembagaan di atas (inkubator bisnis dan teknologi, *business development services-provider* dan UPBSMK Incorporate) terdiri dari :

- a. Keputusan Walikota Pekalongan Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator, Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Nomor 560/1250 Tahun 2012 tentang Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan.
- c. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan tentang Pembentukan *Business Development Services-Provider* (BDS-P).
- d. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2109.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.
- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2146 Tahun 2014 tentang Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.
- f. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2150 Tahun 2014 tentang Pengelola Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.
- g. Instruksi Walikota Pekalongan Tahun 2014 tentang Pengembangan Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.

Tabel 2.5. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Teknopreneur Kota Pekalongan, 2015

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
<i>K</i>	<i>E</i>	<i>I</i>	P4
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan tekopreneur	Regulasi daerah yang sudah ada di antaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Walikota Pekalongan Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator, Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan. b. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Nomor 560/1250 Tahun 2012 tentang Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan. • Terkait dengan pengembangan BDS-P : <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tentang Pembentukan <i>Business Development Services-Provider</i> (BDS-P). • Terkait dengan UPB SMK Incorporate : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2109.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan. b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2146 Tahun 2014 tentang Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan. c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 420/C/2150 Tahun 2014 tentang Pengelola Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan. d. Instruksi Walikota Pekalongan Tahun 2014 tentang Pengembangan Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan tekopreneur	Sesuai PP No. 45 Tahun 2008, jenis insentif (pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah, bantuan modal, dana stimulan) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan :

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopreneur
			<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) : bantuan modal kepada UMKM wirausaha baru melalui kemitraan dengan lembaga keuangan. • Penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM: belum ada. • UPBSMK Incorporate : belum ada. <p>Sedangkan jenis kemudahan yang diberikan pemerintah kota dalam pengembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan pemula berbasis teknologi : skema program fasilitasi calon wirausaha baru (insentif wirausaha baru) yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, skema uji produksi bagi tenant yang dikelola oleh Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan. • Penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM : belum ada. • UPBSMK Incorporate :(1) alokasi anggaran 25% (dua puluh lima persen) untuk dibelanjakan ke UPB SMK Incorporate, (2) penyediaan sarana dan prasarana usaha dan bantuan biaya operasional untuk UPB SMK Incorporate.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan teknopreneur	<p>Dokumen perencanaan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi : Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, SOP Inkubator Bisnis dan Teknologi. • Pengembangan BDS-P : Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, SOP Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis. • Pengembangan UPB SMK Incorporate :Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. Dokumen studi kelayakan dan rencana bisnis belum ada.
		Ketersediaan database teknopreneur	<p>Database pengembangan teknopreneur berbasis web belum dikembangkan, saat ini data yang tersedia masih dikelola secara manual oleh SKPD yang bersangkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Database pengembangan inkubator bisnis dan teknologi : dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan dan Politeknik Pusmanu. • Database pengembangan BDS-P : dikelola oleh Dinas Perdagangan,

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
			<p>Industri, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Database pengembangan UPB SMK Incorporate : dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), perguruan tinggi, lembaga penunjang (DRD, Tim Koordinasi PSID, Posyantek dan Wartek).
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	Sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan teknopreneur tersebar di kalangan pejabat fungsional pemerintahan, dosen, mahasiswa, guru, pelajar, anggota DRD dan pelaku bisnis inovatif.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran berasal dari pemerintah kota, perguruan tinggi, pelaku bisnis inovatif dan pihak ketiga (di antaranya BPPT).
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Hasil pengembangan teknopreneur sudah ada dan sudah diabsorpsi oleh PPBT, KUMKM, masyarakat dan pelajar/mahasiswa melalui wadah balai inkubator dan teknologi, BDS-P dan UPB SMK Incorporate. Selama periode 2013-2014 sudah terbentuk tenant PPBT sebanyak 15 orang yang diseleksi melalui program <i>technocamp</i> .
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur	Kemitraan strategis antara tenant dengan pihak lain (BPPT, Kemenpora, Universitas Pekalongan, STIMIK Widya Pratama dan Politeknik Pusmanu) sudah dikembangkan, baik dalam bentuk MOU maupun PKS.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi teknopreneur	<p>Sebaran peningkatan difusi inovasi dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan dan workshop, di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan TOT (<i>training of trainer</i>) pengelolaan dan manajemen inkubator bisnis untuk pengusaha pemula dan pemuda. • Penyelenggaraan workshop <i>technocamp</i> bagi calon wirausahawan baru (tenant) 1-2 kali dalam setahun. • Sosialisasi tentang fungsi BDS-P pada Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). • Sosialisasi HKI bagi calon pengelola BDS-P, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan SKPD.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku teknopreneur	Seminar/workshop kewirausahaan, program <i>technocamp</i> , TOT, ruang workshop kewirausahaan.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Pengembangan kandungan <i>technopreneurship</i> (kewirausahaan) dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi, dimana pada tahun 2016 diharapkan sudah diimplementasikan di Politeknik Pusmanu.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tematik, seperti pelatihan desain, pelatihan aplikasi teknologi pemasaran secara <i>online</i> bagi siswa SMK, dan pelatihan <i>technopreneurship</i> bagi pemuda.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Belum ada.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Belum ada.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Belum ada.
		Jenis media kampanye inovasi	<i>Technocamp, leaflet, website.</i>
Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Penumbuhan usaha baru (calon teknopreneur) dilakukan melalui model hibah bersaing, <i>technocamp, capacity building</i> dan bantuan pengembangan usaha bagi wirausaha baru (PPBT).	
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan teknopreneur	Fokus pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan : 1. Pengembangan pengusaha pemula berbasis teknologi. 2. Pengembangan KUMKM yang tangguh dan mandiri. 3. Pengembangan UPB SMK Incorporate.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan teknopreneur	Kerja sama daerah yang digalang Pemerintah Kota Pekalongan dalam konteks: • Inkubator bisnis dan teknologi (PPBT) : a. Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada. b. Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) : Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPPT, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, IIPA (International Intellectual Property Alliance). c. Kerja sama luar negeri : belum ada. • BDS-P (KUMKM yang tangguh dan mandiri) : a. Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada. b. Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) : Kementerian Koperasi dan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
			UKM. c. Kerja sama luar negeri : belum ada. • UPB SMK Incorporate : a. Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada. b. Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) : belum ada. c. Kerja sama luar negeri : belum ada.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	• Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi. • Tim Pengelola BDSP. • Tim Pengelola UPB SMK Incorporate.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Belum ada.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Belum ada, baru tahap pembekalan pengetahuan tentang standarisasi produk ekspor.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Belum ada, baru tahap pembekalan pengetahuan tentang HKI.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Belum ada.

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), *Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota Pekalongan Tahun 2014*; Alkadri (2015), "Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan," *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan baru dalam bentuk bantuan modal kepada UKM berstatus wirausahaan baru melalui kemitraan dengan lembaga keuangan. Untuk pengembangan *business development services-provider* dan UPB SMK Incorporate hingga kini belum ada, baik insentif dalam bentuk pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah, pengurangan/keringanan/ pembebasan retribusi daerah, pemberian bantuan modal ataupun pemberian dana stimulan.

Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang telah diberikan pemerintah kota untuk pengembangan inkubator bisnis dan teknologi di antaranya berupa (1) skema program fasilitasi calon wirausaha baru (insentif wirausaha baru) yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, (2) skema uji produksi bagi tenant yang dikelola oleh Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan. Sedangkan kemudahan untuk pengembangan UPB SMK Incorporate adalah berupa (1) instruksi pengalokasian anggaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk dibelanjakan ke Unit Produksi Bersama SMK Incorporate, (2) penyediaan sarana dan prasarana usaha serta bantuan biaya operasional (gedung, biaya pemeliharaan, peralatan inventaris, listrik dan keamanan gedung) UPB SMK Incorporate.

Ketiga, pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, *business development services-provider* dan UPB SMK Incorporate sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (2) Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (3) Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. Selain itu, juga sudah ada dokumen tentang SOP Inkubator Bisnis dan Teknologi serta SOP Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis.

Dalam hal ketersediaan database, saat ini data yang sudah tersedia dikelola secara manual oleh SKPD yang bersangkutan. Database pengembangan PPBT dikelola secara manual oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, database penyediaan layanan pengembangan bisnis dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan database pengembangan UPB SMK Incorporate dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2.4.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknopreneur

Sejauhmana keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen. *Pertama*, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang terkait dengan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, *business development services-provider* dan UPB SMK Incorporate berasal dari lembaga litbang Pemerintah Daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), unsur perguruan tinggi (Politeknik Pusmanu) dan lembaga penunjang (DRD).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif meningkat dan mampu mendorong pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate di Kota Pekalongan. Sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa tersebar di beberapa unsur, terutama di kalangan dosen, pelajar dan pengusaha inovatif. Di sisi lain, dukungan alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber, di antaranya Pemerintah Kota, perguruan tinggi, pelaku bisnis inovatif, dan swadana masyarakat inovatif.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan sudah diabsorpsi oleh berbagai pihak seperti PPBT, UMKM, masyarakat dan pelajar/mahasiswa melalui wadah balai inkubator dan teknologi, BDS-P, UPB SMK Incorporate dan ruang workshop kewirausahaan. Selama periode 2013-2014 sudah terbentuk tenant PPBT sebanyak 15 orang yang diseleksi melalui penyelenggaraan beberapa kali *technocamp*.

2.4.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknopreneur

Kondisi kini interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (PPBT), *business development services-provider* (KUMKM) dan UPB SMK Incorporated di Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen.

Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan PPBT, KUMKM, dan UPB SMK Incorporate terdiri dari pusat riset pemerintah (seperti BPPT) dan perguruan tinggi (misalnya Universitas Pekalongan, Politeknik Pusmanu, Akademi Komunitas Negeri, dan STMIK Widya Pratama). Kemitraan strategis ini antara lain dalam bentuk seleksi tenant, pemanfaatan prasarana dan sarana ruang workshop kewirausahaan, penyelenggaraan hibah bersaing untuk kewirausahaan baru dan penguatan UMKM, pengembangan website, perluasan kurikulum TIK (teknologi informasi dan komunikasi) menjadi Teknologi dan Kewirausahaan, serta intermediasi ke lembaga pembiayaan (perbankan).

Kedua, sebaran peningkatan difusi inovasi di Kota Pekalongan terkait dengan pengembangan teknopreneur dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan, workshop dan sosialisasi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan TOT (*training of trainer*) pengelolaan dan manajemen inkubator bisnis untuk pengusaha pemula dan pemuda.
- b. Penyelenggaraan workshop *technocamp* bagi calon wirausahawan baru (tenant) sebanyak 1-2 kali dalam setahun.
- c. Sosialisasi tentang fungsi BDS-P pada Klinik Konsultasi Bisnis (KKB).
- d. Sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi calon pengelola BDS-P, LSM, Perguruan Tinggi, dan SKPD.

Ketiga, jenis wahana interaksi antarpelaku inovasi dan bisnis bagi pengembangan teknopreneur di antaranya adalah dalam bentuk penyelenggaraan workshop kewirausahaan, program *technocamp*, serta pemanfaatan ruang workshop yang terdapat di perguruan tinggi.

2.4.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam Pengembangan Teknopreneur

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnis dalam pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan diindikasikan oleh empat elemen.

Pertama, elemen pendidikan dan pelatihan. Model penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan adalah berupa pengembangan kandungan *technopreneurship* (kewirausahaan) dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan. Sedangkan melalui jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan-pelatihan tematik, seperti pelatihan desain, pelatihan *technopreneurship* bagi pemuda dan pelatihan aplikasi teknologi pemasaran secara *online* bagi siswa SMK.

Kedua, elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*. Dalam konteks pengembangan teknopreneur, baik terkait dengan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, pengembangan BDS-P maupun pengembangan UPB SMK Incorporate, model pengelolaan teknologi dan program *reverse brain drain* hingga kini belum dikembangkan.

Ketiga, elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi inovasi secara khusus (spesifik untuk bidang tertentu) belum diselenggarakan. Sedangkan penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen kampanye inovasi dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui *website*, *leaflet*, maupun *technocamp*.

Keempat, elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan usaha baru (calon teknopreneur) dilakukan melalui model hibah bersaing, *technocamp*, *capacity building* dan bantuan pengembangan usaha bagi wirausaha baru berbasis teknologi.

2.4.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Teknopreneur

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut.

Pertama, fokus pengembangan teknopreneur adalah :

1. Pengembangan pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT).
2. Pengembangan KUMKM yang berdaya saing, tangguh dan mandiri.
3. Pengembangan SMK Incorporate.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan teknopreneur dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri. Dalam konteks pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (PPBT), kerja sama daerah yang telah dilakukan baru dengan pihak ketiga, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPPT, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*). Begitu pula dalam pengembangan BDS-P, yang ada baru kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan dalam pengembangan UPB SMK Incorporate belum ada kerja sama daerah yang dijalin oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga berikut :

1. Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi.
2. Tim Pengelola BDS-P.
3. Tim Pengelola UPB SMK Incorporate.

2.4.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam Pengembangan Teknopreneur

Penyelarasan dinamika global dalam pengembangan teknopreneur dilakukan melalui empat elemen, yaitu lingkungan, standarisasi, hak kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan. Dari keempat elemen ini, belum ada penyelarasannya terhadap pengembangan teknopreneur. Aktivitas yang ada baru berupa pembekalan pengetahuan tentang standarisasi produk ekspor dan pembekalan pengetahuan tentang HKI.

2.5. PILAR PENGUATAN TEMATIK SISTEM INOVASI

Tematik sistem inovasi adalah penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Salah satu tematik yang gencar dikembangkan di Kota Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir adalah

pengembangan pelayanan publik. Ada tiga kategori pelayanan publik yang dikembangkan, yakni :

- a. Pelayanan administratif publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran, izin mendirikan bangunan, perizinan usaha, sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah, dan sebagainya.
- b. Pelayanan prasarana publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis prasarana yang digunakan oleh publik, misalnya pengembangan prasarana dan sarana informasi, prasarana komunikasi, ruang publik, prasarana perdagangan, balai latihan kerja, transportasi, tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
- c. Pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Pola pelayanan publik yang diterapkan oleh Kota Pekalongan terhadap ketiga jenis pelayanan publik di atas adalah :

- a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Pola pelayanan satu pintu, yakni pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu satuan kerja pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari satuan kerja pemerintah daerah terkait lainnya.
- c. Pola pelayanan elektronik, adalah pola pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan bersifat online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pengguna (publik).

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan Kota Pekalongan ditempuh dengan cara mengembangkan suprastruktur, infrastruktur maupun infastruktur TIK. Suprastruktur TIK berkaitan dengan kelembagaan, kebijakan/regulasi, sumber daya manusia, *e-leadership*, tata kelola/standar operasional prosedur, dukungan anggaran dan kemitraan. Infrastruktur TIK berhubungan dengan sarana dan

prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK, seperti jaringan komunikasi (*local area network, wide area network*, akses internet), pusat data (*data center*), perangkat keras pengguna (*desktop, notebook*), saluran layanan (*service delivery channel*) berbasis *web*, telepon, *short message service gateway*, fasilitas pendukung (ruangan khusus, AC, *uninterruptible power supply*, genset dan sarana pengamanan fasilitas lainnya). Sedangkan infrastruktur TIK bertalian dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan perangkat lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-government*, baik secara langsung (*front office*) maupun tidak langsung (*back office*).

Berbagai bidang pembangunan daerah di Kota Pekalongan sudah diperkuat dengan infrastruktur TIK, baik dalam bentuk aplikasi G2G (*government to government*), G2B (*government to business*) maupun G2C (*government to citizen*). Sebagai ilustrasi, dalam aplikasi G2G ada SIM Keuangan Daerah, SIM Penggajian, SIM Barang, Kantor Maya (KANTAYA), SIM Hukum, SIM LEPPK (Laporan, Evaluasi, Program dan Kegiatan), SIM Perencanaan (Renja SKPD), SIM Kepegawaian, SIM Monitoring Jaringan Batik-Net, SIM Monitoring Raskin, Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Aplikasi G2B berupa SIM Monitoring Menara Telekomunikasi, SIMPADU pelayanan perizinan, LPSE, BKO. Aplikasi G2C berupa SIM Kependudukan, SSKO TKLN, SMS Center.

Di samping itu, ada juga berbagai aplikasi *e-government* seperti *e-office, digital office, mobile office, paperless office*, lalu aplikasi di bidang kesehatan (*e-health*) semisal SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), serta SERUNI (sistem rujukan *online* antara RS dan Puskesmas). Di bidang pendidikan pun ada *e-learning* (e-pembelajaran) berupa buku sekolah elektronik (BSE), aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*, *e-administrasi*, pemanfaatan portal rumah belajar, penyiaran program radio dan televisi edukasi (Batik TV), perpustakaan digital (www.digilib.pekalongankota.go.id). Implementasi TIK di bidang pendidikan telah menghasilkan penghargaan bagi Kota Pekalongan berupa Ki Hajar Award tahun 2013. Sedangkan di bidang politik terdapat *rekapitulasi*. Penerapan TIK di berbagai aspek pembangunan di atas ditujukan untuk mendorong *good governance/public service*,

pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif.

Sementara itu, pelayanan publik yang bukan berbasis TIK juga terus dikembangkan oleh berbagai satuan kerja pemerintah daerah. Di antaranya :

- Ruang publik kreatif di enam lokasi yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- Balai latihan kerja yang dikembangkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Instalasi pengolahan limbah komunal maupun industri yang dikembangkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan beberapa satuan kerja pemerintah daerah terkait lainnya.

Dalam konteks penguatan sistem inovasi daerah, khususnya pilar penguatan tematik sistem inovasi daerah, tema pelayanan publik yang akan diuraikan di bawah ini adalah pelayanan publik berbasis TIK. Adapun kondisi saat ini pelayanan publik berbasis TIK di Kota Pekalongan untuk keenam kerangka kebijakan inovasi dapat dijabarkan di bawah ini.

2.5.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi saat ini kerangka umum yang kondusif bagi penguatan pelayanan publik berbasis TIK. *Pertama*, regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tentang penerapan pelayanan publik berbasis suprastruktur, infrastruktur dan infastruktur TIK terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Integrasi-Interoperabilitas Antar-SIM/Database dan Aplikasi.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penggunaan Nama Sub Domain *pekalongankota.go.id* bagi Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan.
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Pekalongan.

4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9a Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Layanan *Mobile Community Access Point (M-CAP)* Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2010 tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis *Free Open Source Software (FOSS)* Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 20/08 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2009-2013.
8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota Pekalongan.
9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/024 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Free Open Source Software (FOSS)* di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/026 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis *Free Open Source Software (FOSS)* Pemerintah Kota Pekalongan.
11. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/101 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Help Desk Perangkat Lunak Legal Berbasis *Free Open Source Software (FOSS)* Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/102 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perangkat Lunak Legal Berbasis *Free Open Source Software (FOSS)* Pemerintah Kota Pekalongan.
13. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/184 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penegak Kepatuhan Penerapan Software Legal dalam Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
14. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/185 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerapan Software Legal

berbasis *Free Open Source Software* (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.

15. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/064 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Mobile Community Access Point* (M-CAP) Pemerintah Kota Pekalongan.
16. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/070 Tahun 2011 tentang Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013.
17. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/035 Tahun 2011 tentang *Chief Information Office* dan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan.
18. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/071 Tahun 2011 tentang Integrasi dan Migrasi Aplikasi/SIM Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis *Free Open Source Software* (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.
19. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/142 Tahun 2011 tentang Integrasi dan Migrasi SIMKEUDA Berbasis *Free Open Source Software* (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.
20. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555/09 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan.

Kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008, belum ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, baik dalam bentuk insentif pajak daerah, insentif retribusi daerah, insentif bantuan modal maupun insentif dana stimulan. Sedangkan jenis kemudahan yang diberikan adalah berupa fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang TIK dalam bentuk pelatihan-pelatihan serta fasilitasi pembangunan VoIP (*Voice over Internet Protocol*).

Ketiga, pengembangan TIK sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni :

- a. RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
- b. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
- c. Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2008-2013.

Dalam hal ketersediaan *database* TIK, telah dibangun infrastruktur pusat data (*data center*) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

2.5.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen. *Pertama*, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa yang ada di Kota Pekalongan terkait dengan pengembangan TIK berasal dari lembaga litbang pemerintah kota (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), perguruan tinggi (STMIK Widya Pratama, SMK negeri dan swasta) dan lembaga penunjang (Dewan Riset Daerah).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, terhadap pengembangan TIK. Dalam hal sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa, pengembangan TIK didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari aparatur pemerintah kota (Dinas Komunikasi dan Informatika serta SKPD lainnya), dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi (STMIK Widya Pratama), serta masyarakat yang memiliki keahlian/kepakaran di bidang TIK. Sedangkan dukungan anggaran yang berasal dari pemerintah kota untuk pembiayaan program dan kegiatan di seluruh SKPD mencapai Rp 4,978 miliar pada tahun 2011, yang berarti naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,493 miliar.

Tabel 2.6. Kondisi Saat Ini Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi Kota Pekalongan, 2015

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
<i>K_i</i>	<i>E_i</i>	<i>I_i</i>	P5
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Regulasi daerah yang terkait dengan TIK di antaranya : 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penggunaan Nama Sub Domain <i>pekalongankota.go.id</i> bagi Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan. 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Pekalongan. 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9a Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Layanan <i>Mobile Community Access Point (M-CAP)</i> Pemerintah Kota Pekalongan. 4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2010 tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis <i>Free Open Source Software (FOSS)</i> Pemerintah Kota Pekalongan. 5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 20/08 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota Pekalongan. 6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Teknologi Informasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2009-2013. 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota Pekalongan. 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/024 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan <i>Free Open Source Software (FOSS)</i> di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/026 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis <i>Free Open Source Software (FOSS)</i> Pemerintah Kota Pekalongan. 10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/101 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Help Desk Perangkat Lunak Legal Berbasis <i>Free Open</i>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
			<p><i>Source Software</i> (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/102 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perangkat Lunak Legal Berbasis <i>Free Open Source Software</i> (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan. 12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/184 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penegak Kepatuhan Penerapan Software Legal dalam Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 13. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/185 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerapan Software Legal berbasis <i>Free Open Source Software</i> (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan. 14. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/064 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola <i>Mobile Community Access Point</i> (M-CAP) Pemerintah Kota Pekalongan. 15. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/070 Tahun 2011 tentang Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013. 16. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/071 Tahun 2011 tentang Integrasi dan Migrasi Aplikasi/SIM Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis <i>Free Open Source Software</i> (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan. 17. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/142 Tahun 2011 tentang Integrasi dan Migrasi SIMKEUDA Berbasis <i>Free Open Source Software</i> (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan. 18. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555/09 Tahun 2011 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan. 19. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/035 Tahun 2011 tentang CIO dan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan TIK	Sesuai PP No. 45 Tahun 2008, tidak ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan jenis kemudahan yang diberikan adalah berupa :

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang TIK dalam bentuk pelatihan-pelatihan. • Fasilitasi pembangunan VoIP (<i>Voice over Internet Protocol</i>).
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan TIK	<p>Dokumen perencanaan yang terkait dengan TIK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. • Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2010-2015. • Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2008-2013.
		Ketersediaan database TIK	Database TIK dikelola melalui pusat data (<i>data center</i>) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), perguruan tinggi, lembaga penunjang (Dewan Riset Daerah, Posyantek dan Wartek).
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	Sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan TIK tersebar di pemerintah kota (Dinkominfo dan SKPD lainnya) dan perguruan tinggi (mahasiswa dan dosen STMIK Widya Pratama) dan masyarakat ahli TIK.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa terutama berasal dari APBD pemerintah kota. Pada tahun 2011 anggaran untuk belanja program dan kegiatan TIK di seluruh SKPD sebesar Rp4,978 miliar, naik dari Rp1,493 miliar pada tahun 2010.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Absorpsi hasil pengembangan TIK tersebar di pemerintahan, pendidikan dan masyarakat, baik dalam bentuk migrasi FOSS, layanan M-CAP maupun CAP (<i>telecenter</i>).
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis TIK	Kemitraan dengan berbagai stakeholder TIK, antara lain Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, LIPI, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Dewan Pendayagunaan TIK Kota Pekalongan, PT Telkom, Asosiasi TIK, Komunitas TIK, Komunitas Open Source, Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama, SMK Negeri 2, SMK Syafi'i Akrom, SMK Muhammadiyah,

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
			MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) TIK SMP, MGMP TIK SMA, MGMP TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) SMK, dan MGMP KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi) SMK.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi TIK	<ul style="list-style-type: none"> Difusi inovasi TIK berupa migrasi penggunaan legal software berbasis FOSS tersebar di pemerintahan (14 SKPD, 47 kelurahan), pendidikan (7 SMA/SMK Negeri, 17 SMP Negeri, 99 SD Negeri), kesehatan (RSUD), dan lain-lain. Difusi inovasi TIK dalam bentuk CAP terdiri dari telecenter LPM di 47 kelurahan dan 4 kecamatan, percontohan telecenter RW, telecenter UKM Batik City di Pasar Grosir Batik Setono, telecenter Museum Batik, telecenter LPPAR, telecenter PKK, telecenter TIK Batik-Net (Broadband Learning Center), dan telecenter Kampong Batik Kauman dan Kampong Wisata Batik Pesindon. Juga ada difusi inovasi melalui M-CAP.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku TIK	<ul style="list-style-type: none"> ICT Executive Forum diperuntukkan bagi Kepala SKPD. ICT Technical Forum diperuntukkan bagi Tim TIK SKPD. Telecenter/Broadband Learning Center. Forum <i>e-Government</i> Nasional.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kandungan TIK dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah. Pendirian pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK (<i>internet based</i>) ditingkat RW melalui integrasi perpustakaan dan telecenter di tingkat RT/RW.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pemanfaatan TIK bagi pengguna sistem (PNS/CPNS/Tenaga Honor, masyarakat) melalui program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang diselenggarakan di BLC.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Model pengelolaan TIK dilakukan melalui Metropolitan Area Network BATIK-Net, yang dibagi menjadi enam klaster, yaitu klaster A Network Operating Control (NOC) sejumlah 35 titik, klaster B Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 17 titik, klaster C Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 13 titik, klaster D Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 16 titik, klaster E Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 13 titik, dan klaster F Dinas

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
			Kesehatan sejumlah 15 titik.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Belum ada.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Ki Hajar Award, Indonesia Open Source Award, e-Government Award, ICT Pura Award, Innovative Regional Award, Innovating Leadership Awards, MURI.
		Jenis media kampanye inovasi	Website, stasiun televisi lokal dan nasional, surat kabar lokal dan nasional, lainnya.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Penumbuhan usaha baru dilakukan melalui model Wirausaha Berbasis TIK.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan TIK	Fokus pengembangan TIK di Kota Pekalongan : 1. TIK untuk mendorong pendidikan berkualitas. 2. TIK untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. 3. TIK untuk mendorong <i>good governance/public service</i> . 4. TIK untuk mendorong ekonomi kreatif.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan TIK	Kerja sama daerah yang digalang Pemerintah Kota Pekalongan: • Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada. • Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) :Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPPT, LIPI, PT Telkom, Komunitas TIK, KPLI. • Kerja sama luar negeri : belum ada.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	• Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK). • Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (KTIK). • Chief Information Officer (CIO). • Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD. • Pusat Komunikasi Masyarakat
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	<i>Paperless office</i> .
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standardisasi internasional	Pengembangan TIK sudah menerapkan standar internasional melalui penggunaan perangkat lunak (<i>software</i>) legal.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan	Belum ada, baru tahap pembekalan pengetahuan tentang HKI.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
		intelektual	
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Belum ada.

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), *Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota Pekalongan Tahun 2014*; Alkadri (2015), "Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan," *Makalah*, tidak dipublikasikan.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan TIK sudah diabsorpsi oleh berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pelaku bisnis maupun masyarakat.

2.5.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Kondisi interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan TIK di Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen. *Pertama*, jalinan kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholder* TIK, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, LIPI, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), PT Telkom, Dewan Pendayagunaan TIK Kota Pekalongan, Asosiasi TIK, Komunitas TIK, Komunitas Open Source, Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama, SMK Negeri 2, SMK Syafi'i Akrom, SMK Muhammadiyah, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) TIK SMP, MGMP TIK SMA, MGMP TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) SMK, dan MGMP KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi) SMK.

Kedua, sebaran peningkatan difusi inovasi TIK di antaranya dalam bentuk :

- Migrasi penggunaan *legal software* berbasis FOSS, yang tersebar di pemerintahan (14 SKPD, 4 kecamatan, 47 kelurahan), pendidikan (7 SMA/SMK Negeri, 17 SMP Negeri, 99 SD Negeri), kesehatan (RSUD), dan lain-lain. Bentuk-bentuk aplikasinya antara lain aplikasi SIM (SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Monitoring dan Evaluasi Program, SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, SIM Monitoring Menara Telekomunikasi, SIM Monitoring Program Raskin, SIM Rujukan Online antara RS dan Puskesmas, SIM Perencanaan Pembangunan Daerah), aplikasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) secara *online* (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud),

aplikasi buku sekolah elektronik (BSE), serta beberapa aplikasi lainnya.

- CAP (*community access point*) terdiri dari telecenter LPM di 47 kelurahan dan 4 kecamatan, percontohan telecenter RW, telecenter UKM Batik City di Pasar Grosir Batik Setono, telecenter Museum Batik, telecenter LPPAR, telecenter PKK, telecenter TIK Batik-Net (*Broadband Learning Center*), dan telecenter Kampoeng Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon.
- M-CAP (*mobile community access point*) yang berfungsi sebagai unit pembelajaran TIK, akses internet, akses layanan telepon dan kegiatan diseminasi informasi secara audio visual.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku inovasi dan bisnis dalam konteks pengembangan TIK di antaranya adalah :

- *ICT Executive Forum* diperuntukkan bagi Kepala SKPD.
- *ICT Technical Forum* diperuntukkan bagi Tim TIK SKPD.
- *Telecenter/Broadband Learning Center*.
- Forum *e-Government* Nasional.

2.5.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnis dalam konteks pengembangan TIK di Kota Pekalongan diindikasikan oleh empat elemen. *Pertama*, elemen pendidikan dan pelatihan. Model penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan adalah berupa :

- Pengembangan kandungan TIK dalam kurikulum pendidikan, baik di level perguruan tinggi maupun jenjang sekolah menengah (SMA/SMK). Seluruh SMA/MA/SMK negeri dan swasta (30 sekolah) telah memiliki Laboratorium Komputer dan 92,58% gurunya telah terlatih memanfaatkan TIK. Pada jenjang SMP/MTs negeri dan swasta yang berjumlah 27 sekolah, semuanya juga sudah mempunyai Laboratorium Komputer dan 92,58% gurunya sudah mengikuti pelatihan pemanfaatan TIK. Begitu pula halnya di level SD/MI negeri dan swasta dimana seluruh 148 sekolah telah punya

Laboratorium Komputer dan 70,64% gurunya telah terlatih memanfaatkan TIK.

- Pendirian pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK (*internet based*) ditingkat RW melalui integrasi perpustakaan dan *telecenter* di tingkat RT/RW.

Sedangkan melalui jalur pelatihan adalah dalam bentuk pelatihan-pelatihan pemanfaatan TIK secara rutin bagi pengguna sistem (PNS/CPNS/Tenaga Honor, masyarakat) melalui program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang diselenggarakan di BLC (*broadband learning center*). Dengan adanya pelatihan secara terus menerus, pegawai pemerintah dan masyarakat akan terbiasa berkeaktivitas melalui pemanfaatan TIK tersebut.

Kedua, elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan *reverse brain drain*. Dalam konteks pengembangan TIK, model pengelolaan TIK dilakukan melalui *Metropolitan Area Network BATIK-Net*, yang dibagi menjadi enam klaster, yaitu klaster A *Network Operating Control (NOC)* sejumlah 35 titik, klaster B Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 17 titik, klaster C Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 13 titik, klaster D Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 16 titik, klaster E Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 13 titik, dan klaster F Dinas Kesehatan sejumlah 15 titik. Sedangkan program *reverse brain drain* belum ada.

Ketiga, elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi inovasi di antaranya melalui penyelenggaraan *Ki Hajar Award*, *Indonesia Open Source Award*, *e-Government Award*, *ICT Pura Award*, *Innovative Regional Award* dan *Innovating Leadership Awards*. Sedangkan penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui website, stasiun televisi lokal dan nasional, surat kabar lokal dan nasional, lainnya.

Keempat, elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan usaha baru dilakukan melalui model pengembangan wirausaha berbasis TIK.

2.5.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam pengembangan TIK di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut. *Pertama*, fokus pengembangan TIK adalah :

1. TIK untuk mendorong pendidikan berkualitas.
2. TIK untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
3. TIK untuk mendorong *good governance/public service*.
4. TIK untuk mendorong ekonomi kreatif.

Melalui keempat fokus pengembangan TIK di atas, Kota Pekalongan bersiap menuju kota digital atau kota *broadband (e-Pekalongankota)*. Ada empat pilar yang ditempuh untuk mewujudkan kota digital tersebut, yakni :

1. Pengembangan infrastruktur TIK.
2. Peningkatan *e-literacy* atau melek TIK.
3. Pengembangan regulasi dan tata kelola.
4. Penguatan kelembagaan pengembangan infostruktur/aplikasi/SIM *open source*.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan TIK dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari :

- Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada.
- Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) : Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPPT, LIPI, LKPP, PT Telkom, Komunitas TIK, KPLI.
- Kerja sama luar negeri : belum ada.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan membentuk beberapa lembaga berikut :

1. Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK).
2. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (KTIK).
3. Chief Information Officer (CIO).

4. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD.
5. Pusat Komunikasi Masyarakat

2.5.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Penyelarasan dinamika global di dalam pengembangan TIKbaru dilakukan melalui elemen lingkungan (dalam bentuk *paperless office*), elemen standarisasi (berupa penggunaan perangkat lunak legal) dan elemen hak kekayaan intelektual (pembekalan pengetahuan tentang HKI). Sedangkan penyelarasan dalam elemen ketenagakerjaan belum ada.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN

Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam membawa Indonesia ke era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu menjadikan penguatan sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan penghematan sumber daya, baik pada skala nasional maupun daerah.

Kota Pekalongan yang mempunyai posisi strategis⁸ dan penghasil batik nomor satu di Indonesia, membutuhkan penguatan sistem inovasi daerah agar proses percepatan pembangunan di kota ini dapat diwujudkan segera. Dalam mengimplementasikan penguatan sistem inovasi daerah, Kota Pekalongan tentu harus mengenali tantangan dan peluang yang dihadapinya. Adapun tantangan dan peluang penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan akan diuraikan di bawah ini.

3.1. PEMBANGUNAN BERBASIS PENGETAHUAN

Pengetahuan merupakan modal penting bagi suatu daerah dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi di zaman sekarang dan masa mendatang. Penerapan pengetahuan dalam pembangunan perekonomian suatu daerah akan memberi kesempatan tumbuhnya sistem ekonomi yang mempunyai daya saing dan inovatif.

Bank Dunia pun telah merumuskan empat pilar penting yang dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pengetahuan. *Pertama*, sebuah rezim ekonomi dan kelembagaan yang memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan yang ada dan baru dan berkembangnya kewirausahaan. *Kedua*, populasi yang terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi dan menggunakan pengetahuan dengan baik. *Ketiga*, sebuah sistem inovasi efisien perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan dan organisasi

⁸Berada di jalur utara Pulau Jawa (Pantura) yang dikenal sebagai salah satu jalur transportasi terpadat di negeri ini.

lain. *Keempat*, teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan fasilitatif.

Salah satu prinsip dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan adalah inovasi.⁹ Ekonomi di Kota Pekalongan sudah seharusnya bergerak dari ekonomi yang mendorong pada investasi menjadi inovasi. Pemerintah, swasta dan universitas di kota ini harus saling bersinergi guna mewujudkan sistem ekonomi inovatif di kota tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan sekolah kejuruan dan sekolah teknis, harus menghidupkan kembali perannya sebagai pemimpin penelitian dan inovasi, lebih proaktif dalam melayani penciptaan pengetahuan dari pada sekedar transfer pengetahuan.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara maju adalah memperkuat sistem inovasi. Sistem inovasi mampu membangkitkan kreativitas dan inovasi yang diperlukan agar produk-produk sebuah daerah dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan menggunakan berbagai indikator pembandingan, posisi relative penguatan sistem inovasi Kota Pekalongan ternyata lebih berkembang dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya.

Dengan mencermati persoalan yang dihadapi oleh Kota Pekalongan dan memetik pelajaran berharga dari negara/daerah lain yang dinilai berhasil, dapat diidentifikasi empat elemen strategis yang perlu diperbaiki dalam penguatan sistem inovasi di Kota Pekalongan guna menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu :

1. Perbaiki dalam kondisi dasar sebagai prasyarat penguatan sistem inovasi, yakni terkait hal-hal berikut :
 - a. Masih terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di Kota Pekalongan tentang penguatan sistem inovasi.

⁹Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Penerapan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

- b. Masih sedikitnya kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada penguatan sistem inovasi di berbagai bidang dan/atau tataran/konteks tertentu.
 - c. Belum adanya sinkronisasi penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh SKPD-SKPD di Kota Pekalongan.
 - d. Keterbatasan basis data dan indikator sistem inovasi yang berkualitas sebagai landasan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.
2. Perbaikan dalam enam isu pokok kerangka kebijakan penguatan sistem inovasi, yaitu perbaikan dalam hal :
- a. Kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis, terutama berkaitan dengan elemen basis data (*database*), regulasi, insentif, infrastruktur dasar pengembangan klaster industri, penembangan jaringan inovasi dan pengembangan teknopreneur.
 - b. Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa serta kemampuan absorpsi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini masih terbatas.
 - c. Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan klaster industri dan pengembangan teknopreneur yang hingga kini juga masih terbatas.
 - d. Pengembangan budaya kreatif-inovatif dalam masyarakat Kota Pekalongan (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, para pelaku litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum), terutama dalam mendukung pengembangan klaster industri, pengembangan teknopreneur dan pengembangan tematik sistem inovasi.
 - e. Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam hal pengembangan klaster industri (perikanan dan perbatikan) yang hingga kini belum berjalan sebagaimana diharapkan, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur (wirausaha baru) dan pengembangan tematik sistem inovasi.

- f. Internalisasi dinamika global, terutama berkaitan dengan aspek lingkungan, standarisasi, HKI dan ketenagakerjaan.
4. Perbaiki dalam kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun nonformal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.
5. Perbaiki koherensi kebijakan di berbagai bidang pembangunan daerah, baik dalam konteks urusan wajib maupun urusan pilihan.

3.4. OTONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Diberlakukannya era otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada Kota Pekalongan untuk lebih leluasa mengelola daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Untuk merealisasikan tujuan pemberian otonomi daerah ini, Kota Pekalongan dapat menerapkan seluruh elemen penguatan sistem inovasi ke dalam berbagai proses pembangunan kota. Melalui penguatan sistem inovasi, segenap potensi dan pelaku ekonomi di Kota Pekalongan dapat dikerahkan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi pada tingkat nasional maupun global. Bagaimanapun juga, melalui otonomi daerah Kota Pekalongan tetap dihadapkan pada :

- Intensitas persaingan nasional (antardaerah otonom) dan global yang terus meningkat.
- Intensitas persaingan pasar domestik dan pasar luar negeri yang semakin cepat dan kompleks.
- Siklus produk yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan/selera konsumen.

3.4. ISU-ISU UTAMA NASIONAL

3.3.1. Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2015 merupakan fokus pemerintah dalam pembangunan Indonesia kedepan menuju 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 dan 8 besar pada tahun 2045, dengan target pendapatan per kapita berkisar USD14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) berkisar USD4,0 – USD4,5 triliun. Untuk mewujudkan target-target ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sekitar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, lalu 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. MP3EI juga mengamanatkan pentingnya penguatan kapasitas inovasi untuk mendukung tercapainya kondisi ekonomi nasional yang lebih maju.

Salah satu langkah untuk mencapai kekuatan besardunia tadi adalah memacu dan memperluas perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah telah membagi wilayah NKRI menjadi enam koridor ekonomi, yaitu :

1. Koridor Ekonomi Sumatera yang berperan sebagai sentra produksi dan hasil bumi dan lumbung energi nasional.
2. Koridor Ekonomi Jawa yang mengemban peran sebagai pendorong industri dan jasa nasional.
3. Koridor Ekonomi Kalimantan dengan peran menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
4. Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional.
5. Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara dengan peran sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.
6. Koridor Ekonomi Papua dan Maluku yang mendapat peran sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

Sebagai pendorong industri dan jasa nasional, Koridor Ekonomi Jawa dibagi menjadi lima pusat ekonomi, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Kegiatan ekonomi utama yang diusung Koridor Ekonomi Jawa adalah :

1. Makanan dan minuman.
2. Tekstil.
3. Peralatan transportasi.
4. Perkapalan.
5. Telematika.
6. Alutsista.

Merujuk pada sebaran pusat ekonomi dan kegiatan ekonomi utama yang terdapat di Koridor Ekonomi Jawa di atas, maka Kota Pekalongan berpeluang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan pusat ekonomi Semarang serta memacu dan memperluas kegiatan ekonomi industri dan jasa tekstil, makanan dan minuman dan telematika.

3.3.2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) di Kota Pekalongan baru tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergi. Interaksi dan kemitraan tersebut dapat berkembang jika ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. *Good governance* akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan Walikota yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Pemerintah Kota Pekalongan akan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan nasional dan global melalui manajemen pemerintahan yang efisien dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang teruji. Implementasi *good governance* di Kota Pekalongan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja, pemantapan sistem manajemen, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Penataan organisasi pemerintah kota didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan,

program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan pada terbangunnya struktur birokrasi yang ramping, efisien, efektif, bertanggung jawab dan terbuka. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

Pengembangan sistem manajemen pemerintahan Kota Pekalongan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan akuntabel, disertai dukungan sistem informasi manajemen yang handal. Saat ini Kota Pekalongan sudah mengembangkan dan mengaplikasikan beberapa sistem informasi manajemen di bidang pemerintahan. Peran birokrasi di Kota Pekalongan sebaiknya lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan profesionalisme aparatur Kota Pekalongan harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, yakni (a) memiliki komitmen yang tinggi mewujudkan *good governance*, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas dan produktivitas.

Arah kebijakan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* pada Pemerintah Kota Pekalongan diarahkan untuk reformasi birokrasi melalui penataan organisasi pemerintah kota, pemantapan sistem manajemen yang terintegrasi dan terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

3.3.3. Pengarusutamaan Sistem Inovasi

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan bagi pewujudan kesejahteraan rakyat (kemakmuran) yang semakin tinggi dan semakin adil. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus. Karena itu, daya saing semakin ditentukan oleh sistem inovasi dalam upaya mengembangkan potensi spesifiknya.

Bagi Kota Pekalongan, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Kota Pekalongan, sehingga memerlukan pendekatan penguatan sistem inovasi, yaitu :

1. Pengembangan potensi ekonomi, pengembangan iklim usaha, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) serta penguatan sistem inovasi di daerah.

Isu ini berkaitan dengan belum optimalnya upaya pengembangan potensi ekonomi daerah, rendahnya daya saing beberapa produk industri (termasuk UMKM) dan ketergantungan terhadap impor bahan baku pada industri tekstil dan produk tekstil. Di samping itu, juga berkaitan dengan masih terbatasnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah pada pengembangan potensi ekonomi. Hal ini terjadi akibat terbatasnya kapasitas inovatif daerah dan belum kuatnya sistem inovasi daerah.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam peningkatan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah di Kota Pekalongan adalah *branding*, promosi, pemanfaatan iptekin, mengembangkan kewirausahaan dan iklim usaha. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

2. Infrastruktur dan kerja sama dalam pengembangan potensi daerah. Pentingnya isu infrastruktur terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal bagi pengembangan usaha di daerah, prasarana dan sarana penunjang transportasi,

untuk mendukung perikanan dan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, serta untuk pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, juga untuk ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan medis, pelayanan KB, dan juga untuk optimalisasi pengelolaan persampahan. Juga sangat penting penyediaan prasarana dan sarana untuk peningkatan kinerja pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Isu strategis lain dalam pengembangan potensi daerah adalah terbatasnya kerjasama dalam penanaman modal, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perlu dikembangkan kerja sama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan kementerian dan kelembagaan pemerintah pusat dan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri. Upaya mengatasi isu strategis ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan kerjasama dalam berbagai bidang guna menunjang pengembangan potensi ekonomi daerah untuk menjadi kota jasa, pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan dan olahraga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung Pekalongan sebagai Kota Jasa.

Isu strategis di bidang pendidikan terkait dengan akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan. Juga terkait dengan integritas moral penyelenggaraan pendidikan serta peranserta masyarakat. Pendidikan yang dikembangkan adalah yang mampu menyediakan sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama pencapaian dan berkembangnya Pekalongan sebagai Kota Jasa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dilakukan dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat di semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah kota untuk mencapai

kualitas sumberdaya manusia Kota Pekalongan yang berbasis religiusitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.

4. Kemiskinan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Angka pengangguran yang cukup tinggi dapat menyebabkan kemiskinan meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing Kota Pekalongan.

Isu ini terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup keluarga miskin, indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat. Untuk mengatasinya harus dilakukan dengan pendataan akurat dan sinergi program penanggulangan kemiskinan, diantaranya tersedianya *database* kemiskinan, bantuan produktif untuk keluarga miskin yang tepat sasaran dan manfaat, upaya akses keluarga miskin untuk sekolah, sehat dan berusaha dan berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

5. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis (sinergi antar wilayah dan antar instansi) serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Pengendalian pemanfaatan ruang, baik didalam pengendalian izin dan pengawasan kesesuaian izin, ditandai dengan adanya koordinasi diantara instansi terkait. Isu ini sangat terkait dengan kesadaran dan sikap peduli masyarakat dalam pelestarian lingkungan, kemampuan aparat dalam pengelolaan lingkungan, pengurangan tingkat kerusakan lingkungan serta penurunan daya dukung lingkungan.

6. Pembangunan inklusif dan kesetaraan gender.

Pembangunan inklusif di Kota Pekalongan juga berkaitan dengan isu tentang disparitas gender, keadilan gender, serta peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Hal lain adalah keberpihakan dalam kesetaraan dan keadilan gender, meningkatnya kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dan berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga.

7. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Pekalongan semakin dituntut untuk menunjukkan kinerja baik yang akuntabel, transparan dan responsif. Beberapa indikasi kinerja yang baik ditandai dengan meningkatnya supremasi hukum, aparatur yang semakin kompeten dan profesional, serta meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah kota. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pekalongan di antaranya adalah untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien.

3.4. ISU-ISU UTAMA GLOBAL

3.4.1. Pemanasan Global dan Pembangunan Berbasis Ekologi

Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya temperatur rata-rata di seluruh permukaan bumi yang disebabkan karena akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Akibat pemanasan global adalah memicu terjadinya perubahan iklim. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunannya Kota Pekalongan harus berupaya mengantisipasi dampak dari perubahan iklim melalui penyediaan infrastruktur berbasis ekologi guna meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumberdaya air, infrastruktur dan permukiman, pertanian dan wilayah pesisir kelautan.

Penataan ruang Kota Pekalongan sebaiknya juga ditujukan untuk mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan pemanasan iklim mikrokota. Pembangunan yang seimbang antara

pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan dilaksanakan untuk mewujudkan lingkungan kota yang sehat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan Kota Pekalongan harus mempunyai tiga orientasi pembangunan, yakni berorientasi pada pemerataan pertumbuhan, berorientasi pada kepentingan kelestarian lingkungan, serta berbasis pada kepentingan masyarakat.

Penyediaan infrastruktur kota berbasis ekologi memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan atas penyediaan infrastruktur di Kota Pekalongan harus memperhatikan dan mempertimbangkan akan keberlangsungan dan kelestarian fungsi ekologi kota. Dalam penyediaan sistem angkutan umum, misalnya, harus diarahkan kepada penggunaan angkutan umum yang mampu mengurangi emisi gas buang carbon (CO_2). Sedangkan dalam penyediaan infrastruktur yang lain, seperti pengelolaan sanitasi dan drainase kota serta upaya penanggulangan rob, harus memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan, keseimbangan ekologis, serta melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Dalam penyediaan infrastruktur kota, saat ini Kota Pekalongan juga dituntut mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi. Penguatan jaringan telekomunikasi dan internet diharapkan dapat merata dan berfungsi secara optimal di seluruh wilayah kota. Keberadaan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas pelayanan publik, aktivitas perkantoran serta aktivitas kemasyarakatan secara luas.

3.4.2. Smart City

Tantangan ke depan yang dihadapi Kota Pekalongan adalah bagaimana mengelola kota tersebut dengan cerdas (*smart city*), sehingga ke depan Kota Pekalongan menjadi lebih kompetitif dan layak huni. Kota Pekalongan sudah mulai membangun *smart city* melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Kota hijau yang dimaksud di sini adalah pengefektifan dan mengefisienkan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, yang berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

Ke depan, pengembangan kota hijau di Kota Pekalongan perlu dilengkapi dengan pengembangan teknologi hijau. Teknologi hijau mulai marak sejak beberapa tahun yang lalu seiring dengan kesadaran berbagai pihak akan kelestarian alam. Teknologi hijau adalah teknik untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memelihara alam sekitar dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih ramah lingkungan.

Teknologi hijau merujuk pada produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- Meminimalkan penurunan kualitas lingkungan, pembebasan gas rumah kaca rendah atau tidak ada, aman digunakan dan membuat lingkungan sehat serta lebih baik untuk semua kehidupan.
- Menghemat tenaga dan sumber asli.
- Menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui.

Teknologi hijau mencakup bidang-bidang berikut :

- Energi terbarukan (*renewable energi*). Kebutuhan energi yang terus meningkat berbanding terbalik dengan keberadaan sumber energi. Sampai saat ini sumber energi utama di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, dimana diperkirakan akan habis dalam waktu 12 tahun. Permasalahan ini ditambah dengan munculnya permasalahan perubahan iklim akibat pemborosan energi melahirkan kantechnologi hijau di bidang energi terbarukan.
- Bangunan hijau/ramah lingkungan (*green building*), yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur ramah lingkungan. Penerapannya dimulai sejak

pemilihan bahan bangunan hingga lokasi pendirian diharapkan mempertimbangan kelestarian lingkungan hidup.

- Kimiahijau (*green chemistry*), yaitu penemuan, rancangan dan aplikasi produknya termasuk proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan.
- Teknologi nano hijau (*green nano technology*), yaitu penerapan kimia hijau tingkat lanjut dengan prinsip-prinsip rekayasa teknologi yang ramah lingkungan (*environment friendly*).

Beberapa tujuan utama dari penerapanteknologi hijau,yaitu:

- Keberlanjutan, dimana penerapanteknologi hijau tidak akan mengancam kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.
- Desain daur ulang, dimana produk yang dihasilkan harus dapat didaur ulang untuk menghasilkan produk sejenis.
- Konservasi sumber daya, ialah mengurangi limbah dan polusi dengan cara mengubah pola produksi dan konsumsi.
- Inovasi, yakni dengan cara mengembangkan teknologi alternatif terhadap teknologi yang telah terbukti merusak kesehatan dan lingkungan.
- Viabilitas, yaitu menciptakan pusat kegiatan ekonomi di sekitar teknologi dan produk yang bermanfaat bagi lingkungan, mempercepat pelaksanaannya dan menciptakan karier baru yang benar-benar melindungi planet bumi.

Teknologi hijau sangat penting bagi bumi, namun produk-produk inovasi tidak akan banyak bermanfaat jika tidak didukung oleh konsumen yang peduli terhadap alam. Seluruh pihak yang terkait, baik produsen, konsumen, maupun distributor harus sama-sama menerapkan/mendukung teknologi hijau demi masa depan yang lebih baik.

3.4.3. Millenium Development Goals

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen global para pemimpin dunia, yang meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan sampai dengan tahun 2015, yaitu :

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua.

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sampai dengan tahun 2014, Kota Pekalongan telah berhasil mencapai beberapa target yang terdapat di tujuh tujuan (lihat Gambar 3.1). Sedangkan target yang relatif berat untuk dicapai terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir berlakunya MDGs.

TUJUAN	Jumlah Indikator	●	▶	▼	Belum Bisa Dihitung
TUJUAN 1	9	4	2	1	2
TUJUAN 2	3	1	-	1	1
TUJUAN 3	7	4	2	-	1
TUJUAN 4	4	2	2	-	-
TUJUAN 5	8	-	5	1	2
TUJUAN 6	13	3	2	-	8
TUJUAN 7	15	4	1	-	10
TUJUAN 8 *	4	-	4	-	-
TOTAL	63	17	19	3	24
Persentase	100,00	26,98	30,16	4,76	38,10

* Di dalam RAD MDGs Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 Tujuan 8 ini tidak ada

● Sudah tercapai sebelum 2015 ▶ Akan tercapai pada 2015 ▼ Diperlukan kerja keras untuk mencapai target pada tahun 2015

Gambar 3.1. Hasil Pencapaian MDGs Kota Pekalongan Hingga Tahun 2014

3.4.4. Sustainable Development Goals

Setelah berakhirnya era MDGs tahun 2015 ini, Kota Pekalongan dihadapkan pada era *sustainable development goals* (SDGs). Sampai saat ini, rumusan mengenai tujuan, target dan indikator SDGs belum disepakati. Dalam laporan *A New Global Partnership : Eradicate Poverty and Transformation Economies Through Sustainable Development* yang dirilis oleh HLPEP (*High-Level Panel of Eminent Persons*) pada bulan Mei 2013 di Denpasar, diusulkan tujuan SDGs sebanyak dua belas dengan 54 target, yakni :

1. Mengakhiri kemiskinan (*endpoverty*).

2. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta mencapai kesetaraan gender (*empower girls and women and achieve gender equality*).
3. Menyediakan pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup (*provide quality education and lifelong learning*).
4. Menjamin kehidupan yang sehat (*ensure healthy lives*).
5. Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik (*ensure food security and good nutrition*).
6. Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi (*achieve universal access to water and sanitation*).
7. Menjamin energi yang berkelanjutan (*secure sustainable energy*).
8. Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan (*create jobs, sustainable livelihoods, and equitable growth*).
9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan (*manage natural resource assets sustainably*).
10. Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif (*ensure good governance and effective institutions*).
11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai (*ensure stable and peaceful societies*).
12. Menciptakan lingkungan pemungkin global dan mendorong keuangan jangka panjang (*create a global enabling environment and catalyze long-term finance*).

Selanjutnya, berdasarkan hasil serangkaian konferensi, mulai dari Rio+20 di Rio Janeiro bulan Juni 2012 hingga pertemuan ke-13 OWG on SDGs (*Open Working Group on Sustainable Development Goals*) di New York tanggal 19 Juli 2014, telah dihasilkan 17 target SDGs – tanpa dirinci target – sebagai berikut (BPS, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals*, 2014:12-13) :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya (*end poverty in all its forms everywhere*).
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan (*end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*).

3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua pada segala usia (*ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*).
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (*ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*).
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (*achieve gender equality and empower all women and girls*).
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua (*ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*).
7. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua (*ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*).
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ekonomi, menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan menyediakan pekerjaan yang layak untuk semua (*promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*).
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, memajukan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi (*build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation*).
10. Mengurangi ketimpangan di dalam negara sendiri dan di antara negara-negara di dunia (*reduce inequality within and among countries*).
11. Menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (*make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*).
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*ensure sustainable consumption and production patterns*).
13. Mengambil tindakan penting untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (*take urgent action to combat climate change and its impacts*).

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan (*conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*).
15. Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*).
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*).
17. Memperkuat pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development*).

Kemudian, SDSN (*Sustainable Development Solutions Network*) yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 20 Maret 2015 di bawah kepemimpinan Jeffrey Sach, merilis sebuah laporan (*revised working draft version 7*) pada tanggal 25 Juli 2014 dengan judul *Indicators and a Monitoring Framework for SDGs : Launching a Data Revolution for SDGs*. Di dalam laporan ini, SDSN mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator. Ke-10 tujuan tersebut terdiri dari :

1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.
3. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak dan remaja bagi kehidupan dan lingkungannya.
4. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua.

5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia.
6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan.
7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh.
8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan.
9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan, hutan dan sumber daya alam dengan baik.
10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan.

Setelah mengemukakan 10 tujuan di atas, di dalam laporan tersebut SDSN juga memadukan usulannya tersebut dengan SDGs hasil OWG, dengan cara mendetilkan 17 tujuan ke dalam 100 indikator utama dan 111 indikator tambahan.

Seberapa banyak tujuan, target dan indikator SDGs yang diimplementasikan pada tahun 2016 nanti, baru akan diputuskan dalam pertemuan *OWG on SDGs* pada bulan September 2015.

3.4.5. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada KTT ke-9 di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menandatangani *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*. Dalam kesepakatan tersebut, para pemimpin berkomitmen mewujudkan tiga pilar *ASEAN Vision*, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Kemudian, pada tanggal 20 November 2007, ketika KTT ke-13 ASEAN digelar di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penandatanganan kedua dokumen tersebut menandai pengaturan yang lebih formal bagi ASEAN, dan menyatakan kesepakatan tersebut berdasarkan aturan main ASEAN.

Pembentukan MEA dilakukan melalui empat pilar kerangka strategis, dimana setiap kerangka strategis terdiri dari beberapa elemen, yaitu (lihat Gambar 3.2) :

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal, dengan lima elemen utama (a) aliran bebas barang, (b) aliran bebas jasa, (c) aliran bebas investasi, (d) aliran modal yang lebih bebas dan (e) aliran bebas tenaga kerja terampil. Selain itu, pilar ini juga mencakup dua komponen penting lainnya (a) 12 sektor prioritas dan (b) kerja sama di bidang, pangan, pertanian dan kehutanan. Ke-12 sektor prioritas adalah produk pertanian, angkutan udara, otomotif, *e-ASEAN*, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan *apparel*, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik.
2. ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global, dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.



Gambar 3.2. Empat Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN

Keempat pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di atas saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Karena itu, pilar-pilar tersebut membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah elemen-elemen dari setiap pilar, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Selain itu, keempat pilar tadi perlu didukung oleh riset, *capacity building* sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan dan *political will*.

Babak baru kerja sama ekonomi ASEAN melalui MEA di atas tentu saja berimplikasi langsung pada strategi dan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia. Beberapa pertanyaan di bawah ini pun menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan :

- Bagaimanakah kesiapan Kota Pekalongan dalam menghadapi integrasi ekonomi regional tersebut ?
- Apakah Kota Pekalongan bisa mendapat manfaat dan keuntungan dari perluasan pasar dan basis produksi tunggal tersebut atau hanya akan menjadi penonton ?
- Apa saja langkah yang telah dilakukan dan yang akan ditempuh oleh Kota Pekalongan ?
- Di sektor barang dan jasa apa saja Kota Pekalongan mempunyai keunggulan ekspor, peluang investasi ?
- Bagaimana kesiapan tenaga kerja terampil (*skilled labour*) seperti jasa perawat, apoteker, arsitek, akuntan, dokter, pelaut, ahli konstruksi, tenaga perhotelan, akademisi, *programmer*, pakar IT, serta profesional dan teknisi lainnya dalam mendukung aktivitas perdagangan barang, jasa dan investasi ?

3.4.6. Perdagangan Bebas

Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Hal ini terutama dipacu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sehingga transaksi informasi bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi.

Globalisasi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan liberalisasi perdagangan serta mendorong persaingan

dalam perdagangan di pasar global. Dengan diberlakukannya kesepakatan internasional tentang pengaturan perdagangan bebas, baik untuk wilayah regional, nasional maupun internasional, maka Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan kesiapan sarana dan prasarana sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

Keunggulan kompetitif perekonomian Kota Pekalongan dapat diraih melalui peningkatan daya saing produk-produk lokal, peningkatan efisiensi produk, peningkatan infrastruktur perdagangan, dan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing serta hambatan perdagangan bebas secara sistematis dihilangkan, dalam konteks melindungi dan mempersiapkan daya saing produk lokal di pasar bebas.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi pengembangan ekonomi Kota Pekalongan, yang dapat diartikan sebagai suatu usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan kemandirian ekonomi Kota Pekalongan dalam hal menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
2. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
3. Terbangun dan berkembangnya pola kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
4. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
5. Terwujudnya (pertumbuhan dan pengembangan) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) yang berdaya saing dan berkelanjutan.
6. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

7. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
8. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antarsektor dan antarwilayah.

Upaya kongkret dalam menghadapi globalisasi ekonomi, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, yang berdaya saing global berbasis potensi ekonomi lokal, dengan jalan menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkeadilan dan beretika dengan pola kerja sama yang sinergis.

Kebijakan tersebut harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur perdagangan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Kota Pekalongan dalam menghadapi perdagangan bebas. Infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya produksi sehingga peluang pengusaha dapat bersaing menghadapi produk asing dalam perdagangan bebas. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan memberikan dukungan dan fasilitas bagi produk-produk lokal dalam meningkatkan daya saing industri terhadap produk-produk impor.

3.4.7. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut sumber daya manusia untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif untuk beradaptasi dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Kota Pekalongan harus diprioritaskan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, beriman, peduli, sehat jasmani dan rohani), memiliki keterampilan, kreatif-inovatif serta berdaya saing tinggi.

BAB IV
KONDISI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN
YANG DIINGINKAN PADA TAHUN 2016-2020

Penentuan kondisi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang diinginkan untuk periode 2016-2020 didasarkan pada kondisi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan saat ini sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2. Di dalam bab ini, kondisi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang diinginkan untuk periode 2016-2020 dikemukakan secara kualitatif. Sedangkan kondisi kuantitatifnya setiap tahun akan dijabarkan di dalam rencana aksi.

4.1. PILAR PENGUATAN EKOSISTEM INOVASI DAERAH

Sebagaimana dikemukakan dalam Subbab 2.1, ekosistem inovasi daerah dikatakan sebagai sebuah struktur dasar dalam sistem inovasi karena merupakan pilar yang memiliki elemen kerangka kebijakan inovasi secara lengkap, sehingga dalam pilar ini penguatan sistem inovasi berjalan sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Berdasarkan hal ini, maka kondisi pilar penguatan sistem inovasi daerah yang diinginkan pada tahun 2016-2020 pada intinya difokuskan pada beberapa aspek di bawah ini :

1. Melengkapi elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang belum ada.
2. Menata dan memperkuat elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang sudah terbentuk.
3. Mensinergikan elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang ada dalam pilar penguatan ekosistem inovasi daerah dengan elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang ada di empat pilar sistem inovasi lainnya.

Adapun kondisi kualitatif yang diinginkan dalam pilar penguatan ekosistem inovasi daerah untuk periode 2016-2020 disajikan secara ringkas dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kondisi Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang Diinginkan pada Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Regulasi yang diinginkan terkait dengan pengembangan inovasi dan bisnis terdiri dari: a. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020. b. Peraturan Walikota Pekalongan tentang pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis. c. Peraturan Walikota Pekalongan tentang penetapan lokasi ruang publik kreatif. d. Keputusan Walikota Pekalongan tentang pembentukan kelembagaan pengelola ruang publik kreatif.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif yang diinginkan terkait dengan pengembangan inovasi dan bisnis terdiri dari : a. Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian bantuan modal dan/atau; d. Pemberian dana stimulan. jenis kemudahan terkait dengan pengembangan inovasi dan bisnis meliputi : a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau; e. Percepatan pemberian perizinan.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan inovasi dan bisnis yang diinginkan : a. Integrasi Roadmap PSID Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ke dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2020. b. Sinkronisasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2020 dengan RPJMD Tahun 2016-2020 yang sudah mengintegrasikan Roadmap PSID Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
		Ketersediaan database inovasi dan bisnis	Pengembangan <i>database</i> inovasi dan bisnis untuk level Kota Pekalongan secara terpusat dan <i>online</i> .
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran lembaga litbang pemerintah daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi) dalam mengimplementasikan PSID. • Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam pengembangan iptekin. • Pembentukan unit/divisi/laboratorium IPTEKIN/Litbangyasa dibadan usaha. • Penguatan kelembagaan dan peran lembaga penunjang (Dewan Riset Daerah, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Posyantek dan Wartek) dalam implementasi PSID.
		Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah pejabat fungsional tertentu di lembaga litbang pemda. • Meningkatnya peran dosen dan mahasiswa dalam pengembangan IPTEKIN/Litbangyasa. • Berkembangnya pelaku IPTEKIN/Litbangyasa di kalangan badan usaha. • Meningkatnya inovator TTG dari kalangan masyarakat.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah kota untuk pengkajian/penelitian/penerapan iptekin/SIDA, insentif, pelatihan dan fasilitasi, serta hibah bersaing. • Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa. • Adanya alokasi anggaran pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa di lingkup badan usaha. • Meningkatnya anggaran pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa di masyarakat (Posyantek dan Wartek).

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Meningkatnya hasil IPTEKIN/Litbangyasa lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang diserap oleh pemerintah kota, masyarakat (TTG), industri, UMKM dan pelaku bisnis lainnya.
	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis	Perluasan sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan.
	Peningkatan difusi inovasi		Meningkatnya difusi inovasi di Kota Pekalongan, baik dalam bentuk difusi input inovasi (bahan baku/penolong), difusi proses inovasi (metode/teknik produksi) dan difusi output inovasi (produk-produk inovatif).
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Semakin beragamnya wahana interaksi pelaku bisnis, tidak hanya pameran bisnis, pameran iptekin, forum-forum bisnis (curhat bisnis), lomba-lomba (kreativa dan gelar TTG), tetapi juga wahana-wahana inovatif lainnya.
	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Berkembangnya kandungan kreativitas-keinovasian dan kompetensi tertentu dalam mata pelajaran atau mata kuliah tertentu di jenjang SMK dan perguruan tinggi.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Meningkatnya frekuensi pelatihan kewirausahaan dan studi banding untuk siswa dan guru SMK, mahasiswa dan dosen, serta pengusaha dan calon pengusaha.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Berkembangnya Museum Batik sebagai pusat data dan informasi batik, pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan perbatikan, pusat koleksi batik klasik, lawasan dan kontemporer.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> , terutama di sektor unggulan.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Terselenggaranya agenda apresiasi inovasi secara berkala oleh Pemerintah Kota Pekalongan, baik untuk skala lokal, karesidenan, maupun nasional.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
K_i	E_i	I_i	P1
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)		Jenis media kampanye inovasi	Terselenggaranya kampanye inovasi melalui berbagai jenis media secara berkala.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Berkembangnya penumbuhan usaha baru inovatif melalui model insentif, fasilitasi, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi HKI dan lain-lain.
	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bertambahnya bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis di luar bidang industri perbatikan, industri perikanan dan industri pengolahan makanan.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, terutama terkait dengan bidang-bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis. • Meningkatnya sebaran kerja sama dengan pihak ketiga. • Mengembangkan kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Pekalongan. • Berfungsinya Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan. • Menguatnya kelembagaan Relawan Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan.
	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Meluasnya program ramah lingkungan di Kota Pekalongan.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Meningkatnya penggunaan standar internasional dan manajemen mutu di berbagai lembaga pelayanan publik dan dunia usaha.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Meningkatnya jumlah HKI yang dimiliki oleh para pelaku inovasi di Kota Pekalongan, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sumber : Hasil Analisis (2015).

4.2. PILAR PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Selama periode 2016-2020 ke depan, pilar pengembangan klaster industri di Kota Pekalongan difokuskan pada pengembangan sentra-sentra industri/usaha kecil dan menengah (UKM). Sentra-sentra produksi UKM yang sudah ada saat ini akan dikembangkan lebih baik lagi dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan peran UKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Arah pengembangan sentra UKM seperti ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk mengembangkan minimal satu sentra industri kecil dan menengah. Di Kota Pekalongan, sentra IKM yang sudah berkembang adalah sentra industri perbatikan di beberapa lokasi, sentra industri perikanan (berbasis perikanan tangkap dan budidaya) dan sentra industri pengolahan makanan. Ketiga sentra industri UKM tersebut sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan yang relatif baik, namun nilai tambah dan daya saingnya masih perlu dioptimalkan. Optimalisasi tersebut terutama dari sisi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, penguasaan IPTEKIN dan peningkatan kreativitas-keinovasian sumber daya manusianya.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk periode 2016-2020 pilar pengembangan klaster industri difokuskan pada pengembangan sentra industri perbatikan, industri perikanan dan industri pengolahan makanan.

Secara singkat, kondisi kualitatif pilar pengembangan klaster inovasi di Kota Pekalongan untuk periode 2016-2020 dikemukakan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kondisi Pilar Pengembangan Klaster Industri Kota Pekalongan yang Diinginkan pada Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
K_i	E_i	I_i	P2
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan industri kecil dan menengah (UKM)	Dikeluarkannya regulasi berikut : a. Peraturan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah Perbatikan (4 sentra industri). b. Peraturan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah Perikanan (1 sentra industri) c. Peraturan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Makanan (2 sentra industri). d. Keputusan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Kelembagaan Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah (untuk setiap sentra industri).
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan UKM	Jenis insentif yang diinginkan terkait dengan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (UKM) terdiri dari : a. Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian bantuan modal dan/atau; d. Pemberian dana stimulan. Jenis kemudahan yang diinginkan meliputi : a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau; e. Percepatan pemberian perizinan.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan IKM/UKM	Dokumen perencanaan pengembangan UKM yang dibutuhkan : • Master Plan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota Pekalongan Tahun 2016-2035 (8 sentra industri).

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Kluster Industri
			<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Perbatikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (4 sentra industri). • Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (2 sentra industri). • Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Makanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (2 sentra industri).
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Ketersediaan database IKM/UKM Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Pengembangan <i>database</i> IKM/UKM secara terpusat dan <i>online</i> berbasis GIS (<i>Geographic Information System</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya peran lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi) dalam pengembangan IKM/UKM. • Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam pengembangan IKM/UKM. • Terbentuknya unit/divisi/laboratorium kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa badan usaha dalam pengembangan IKM/UKM. • Meningkatnya peran DRD, Tim Koordinasi PSID, Posyantek dan Wartek dalam pengembangan IKM/UKM.
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya aparatur pemerintah kota yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait IKM/UKM. • Berkembangnya jumlah dosen/mahasiswa dan guru/siswa yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait IKM/UKM. • Berkembangnya SDM di IKM/UKM yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait IKM/UKM. • Meningkatnya inovator dari kalangan masyarakat (binaan Posyantek dan Wartek) yang fokus pada pengembangan IKM/UKM.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah kota untuk pengkajian/penelitian/penerapan iptekin/SIDa, insentif, pelatihan dan fasilitasi, serta hibah bersaing pengembangan IKM/UKM.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Kluster Industri
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait pengembangan IKM/UKM. • Dialokasikannya anggaran oleh IKM/UKM untuk pengkajian/penelitian. • Meningkatnya anggaran Posyantek dan Wartek untuk pengembangan TTG yang mendukung pengembangan IKM/UKM.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Meningkatnya daya absorpsi IKM/UKM terhadap hasil IPTEKIN/Litbangyasa.
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis IKM/UKM	Perluasan sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan IKM/UKM di Kota Pekalongan, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan di Kota Pekalongan.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis IKM/UKM	Semakin beragamnya wahana interaksi bagi pelaku bisnis IKM/UKM.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya kompetensi Fakultas Teknologi Batik di Universitas Pekalongan dan Program Studi Teknik Batik di Politeknik Pusmanu. • Menguatnya kompetensi Fakultas Perikanan di Universitas Pekalongan.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Meningkatnya frekuensi pelatihan, pemagangandan studi banding pengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan yang terkait dengan pengembangan IKM/UKM.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Berkembangnya fungsi sentra IKM sebagai pusat pengelolaan teknologi IKM/UKM.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pengembangan IKM/UKM.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Kluster Industri
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Terselenggaranya agenda apresiasi inovasi yang khusus ditujukan untuk kalangan IKM/UKM.
		Jenis media kampanye inovasi	Terselenggaranya kampanye inovasi IKM/UKM melalui berbagai jenis media secara berkala.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Menumbuhkembangkan usaha baru inovatif IKM/UKM melalui skemainsentif dana stimulan, insentif bantuan permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi HKI dan lain-lain.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan IKM/UKM	Menguatnya fokus pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan IKM/UKM	Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkait dengan bidang-bidang fokus pengembangan IKM/UKM.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	Meningkatnya peran kelembagaan khusus yang bergerak di bidang perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan dalam pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan di Kota Pekalongan.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah IPAL terpadu/komunal dan IPAL individu di sentra-sentra produksi batik. • Meluasnya produksi bersih (higienis) dalam proses produksi batik dan makanan olahan. • Berkembangnya pemakaian zat pewarna alami dalam memproduksi batik.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Berkembangnya aplikasi standarisasi internasional dan manajemen mutu untuk produk IKM/UKM.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Meningkatnya jenis dan jumlah pendaftaran HKI oleh IKM/UKM.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Klaster Industri
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil di lingkungan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sumber : Hasil Analisis (2015).

4.3. PILAR PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

Jaringan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan secara faktual sebenarnya sudah berkembang. Di antaranya dalam bentuk kawasan minapolitan di Kecamatan Pekalongan Utara, pengembangan posyantek dan wartek di empat kecamatan dan beberapa kelurahan, serta sudah mulai dirintis sejak tahun lalu pengembangan kawasan teknopolitan batik yang dipusatkan di kawasan cagar budaya Jetayu.

Agar ketiga faktual jaringan inovasi dan bisnis di atas dapat berperan sebagaimana mestinya, yakni sebagai pusat interaksi antaraktor/pelaku/komponen dalam proses pengembangan inovasi dan bisnis, maka ke depan pengembangannya perlu dikemas secara apik melalui pendekatan penguatan sistem inovasi. Pendekatan ini diterapkan karena sistem inovasi mempunyai elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi dan bisnis yang cukup komprehensif. Mulai dari kerangka kebijakan yang kondusif, dukungan kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, jaringan kemitraan, pengembangan budaya kreatif-inovatif, hingga mampu menyelaraskan diri dengan dinamika global, baik terkait isu lingkungan, standarisasi, hak kekayaan intelektual maupun ketenagakerjaan.

Penerapan pendekatan sistem inovasi dalam pengembangan ketiga faktual jaringan inovasi di atas akan dirancang sedemikian rupa sehingga ketiga dapat menjadi pusat interaksi antaraktor/pelaku/komponen dalam proses pengembangan inovasi dan bisnis yang sesungguhnya. Selengkapnya, Tabel 4.3 akan mengetengahkan kondisi kualitatif pilar pengembangan jaringan inovasi yang diinginkan, khususnya untuk periode waktu 2016-2020, yang dirinci menurut enam elemen kerangka kebijakan inovasi.

Tabel 4.3. Kondisi Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi Kota Pekalongan yang Diinginkan Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
K_i	E_i	I_i	P3
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan jaringan inovasi	Diterbitkannya regulasi terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek, yakni: a. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan. b. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan di Kota Pekalongan. c. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Kelembagaan Pengelola Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan. d. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kelembagaan Pengelola Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan di Kota Pekalongan e. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Wartek.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan jaringan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya berbagai jenis insentif untuk pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah; c. Pemberian bantuan modal dan/atau; d. Pemberian dana stimulan. • Diberikannya beragam kemudahan untuk pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau; e. Percepatan pemberian perizinan.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan jaringan inovasi	Dokumen perencanaan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan dan (3) posyantek dan wartek yang dibutuhkan :

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
		Ketersediaan database jaringan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020. • Rencana Aksi Pengembangan Posyantek dan Wartek di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020. <p>Dikembangkannya <i>database</i>(1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek secara terpusat dan <i>online</i>.</p>
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya peran lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi) dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Terbentuknya divisi IPTEKIN/Litbangyasa di badan usaha, terutama terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik dan (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan. • Berkontribusinya kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa penunjang (DRD, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Posyantek dan Wartek) dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek itu sendiri.
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran sumber daya manusia IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya aparatur pemerintah kota yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Berkembangnya jumlah dosen yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Berkembangnya SDM di sektor swasta yang berkontribusi pada pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya innovator TTG dari kalangan masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek itu sendiri.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya alokasi APBD untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/SIDa, insentif, pelatihan, fasilitasi, hibah bersaing pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan. • Dialokasikannya anggaran dari badan usaha untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek. • Meningkatnya anggaran pengembangan TTG untuk mendukung pemajuan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Meningkatnya daya absorpsi terhadap hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis jaringan inovasi	Meluasnya sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Meningkatnya difusi inovasi untuk pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku jaringan inovasi	Semakin beragamnya wahana interaksi bagi pelaku bisnis yang terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya kompetensi Fakultas Teknologi Batik di Universitas Pekalongan dan Program Studi Teknik Batik di Politeknik Pusmanu dalam mendukung pengembangan kawasan teknopolitan batik.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
	jalur pendidikan dan pelatihan		<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya kompetensi Fakultas Perikanan di Universitas Pekalongan dalam mendukung pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Meningkatnya frekuensi pelatihan, pemagangandan studi banding pengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan yang terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Berkembangnya fungsi (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek sebagai pusat pengelolaan IPTEKIN, termasuk IPTEKIN masyarakat.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Terselenggaranya agenda apresiasi inovasi yang terkait dengan inovasi perbatikan, perikanan dan TTG secara berkala.
		Jenis media kampanye inovasi	Terselenggaranya kampanye inovasi perbatikan, perikanan dan TTG melalui berbagai jenis media secara berkala.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Menumbuhkembangkan usaha baru inovatif di bidang usaha perbatikan, perikanan dan bidang usaha lainnya melalui skema insentif dana stimulan, insentif bantuan permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi HKI dan lain-lain.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan jaringan inovasi	Menguatnya fokus pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan jaringan inovasi	Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkait dengan bidang-bidang fokus pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus jaringan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran kelembagaan khusus yang bergerak di bidang perbatikan, perikanan dan teknologi tepat guna. Terbentuknya forum-forum khusus yang terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Menguatnya program ramah lingkungan dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan teknopolitan batik: Program Kali Bersih di Sungai Loji, Pengembangan Ruang Publik Kreatif (RPK) berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH). • Pengembangan kawasan <i>techno park</i> perikanan : Kawasan Konservasi Mangrove, Program Penataan Pantai Berbasis <i>Green Development</i>. • Pengembangan posyantek dan wartek : Kampung Hijau (Penanganan Daerah Air Rob), Program Pengembangan Inovasi Mikro Bakteri Penyubur Tanah.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Berkembangnya aplikasi standarisasi internasional dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Berkembangnya jenis hak kekayaan intelektual dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan <i>techno park</i> perikanan, dan (3) posyantek dan wartek, terutama untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sumber : Hasil Analisis (2015).

4.4. PILAR PENGEMBANGAN TEKNOPRENER

Dalam lima tahun ke depan, pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan masih difokuskan pada :

1. Inkubator bisnis dan teknologi, dimana pengembangannya difokuskan menjadi pusat rekayasa bisnis untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang memiliki daya saing, tangguh dan mandiri.
2. *Business development services-provider* (BDS-P), dimana pengembangannya difokuskan menjadi lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah).
3. Unit Produksi Bersama (UPB) SMK Incorporate yang akan dikembangkan menjadi Koperasi SMK Incorporate, dengan fokus pengembangan sebagai pusat percepatan pembentukan wirausaha mandiri melalui peningkatan kemampuan wirausaha di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kondisi kualitatif tahun 2016-2020 yang diinginkan untuk pilar pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan dapat diuraikan menurut enam elemen kerangka kebijakan sebagaimana tampak pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Kondisi Pilar Pengembangan Teknopreneur Kota Pekalongan yang Diinginkan Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
K_i	E_i	I_i	P4
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan teknopreneur	Diterbitkannya regulasi terkait dengan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate, yakni : a. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan. b. Peraturan tentang Pendirian Koperasi SMK Incorporate Kota Pekalongan.
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan teknopreneur	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya berbagai jenis insentif bagi pelaku inovasi dan bisnis yang terkait dengan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate, dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah; Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah; Pemberian bantuan modal dan/atau; Pemberian dana stimulan. Diberikannya beragam kemudahan bagi pelaku inovasi dan bisnis yang terkait dengan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; Penyediaan sarana dan prasarana; Penyediaan lahan atau lokasi; Pemberian bantuan teknis; dan/atau; Percepatan pemberian perizinan.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan teknopreneur	Dokumen perencanaan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate yang dibutuhkan : <ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Daerah Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kota Pekalongan. Rencana Aksi Daerah Pengembangan BDS-P di Kota Pekalongan. Proposal Pembentukan Koperasi SMK Incorporate Kota Pekalongan. Rencana Bisnis Pengembangan SMK Incorporate Kota Pekalongan.
			Ketersediaan database teknopreneur

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya peran lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi) dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Terbentuknya divisi IPTEKIN/Litbangyasa badan usaha, terutama terkait dengan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Berkontribusinya kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa penunjang(DRD, Tim Koordinasi PSID, Posyantek dan Wartek) dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya aparatur pemerintah kota yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Berkembangnya jumlah dosen dan mahasiswa yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Berkembangnya SDM di sektor badan usaha yang berkontribusi pada pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Berkembangnya SDM di kalangan masyarakat/LSM yang berkontribusi pada pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah kota untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/SIDa, insentif, pelatihan dan fasilitasi, serta hibah bersaing dalam mendukung pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. • Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
			<p>Incorporate.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dialokasikannya anggaran dari pihak badan usaha untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa bagi pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate. Dialokasikannya anggaran dari masyarakat/LSM untuk pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Meningkatnya daya absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi teknopreneur	Meningkatnya difusi inovasi untuk pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku teknopreneur	Semakin beragamnya wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis yang terkait dengan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya kompetensi Politeknik Pusmanudan perguruan tinggi lainnya dalam mendukung pengembangan inkubator bisnis dan teknologi. Menguatnya kompetensi Universitas Pekalongan dan perguruan tinggi lainnya dalam mendukung pengembangan BDS-P. Menguatnya kompetensi semua SMK di Kota Pekalongan dalam pengembangan SMK Incorporate.
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Meningkatnya frekuensi pelatihan, pemagangandan studi banding pengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan yang terkait dengan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Pengelolaan teknologi	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Berkembangnya peran (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate dalam mengelola iptekin masyarakat.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Pengembangan Teknopener
	masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Terselenggaranya agenda apresiasi inovasi yang melibatkan pelaku inovasi dan bisnis yang berasal dari pembinaan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
		Jenis media kampanye inovasi	Terselenggaranya kampanye inovasi (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate melalui berbagai jenis media secara berkala.
	Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Menumbuhkembangkan usaha baru inovatif melalui skema (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan teknopreneur	Menguatnya fokus pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan teknopreneur	Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkait dengan bidang-bidang fokus pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	Meningkatnya peran kelembagaan khusus yang bergerak dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Berkembangnya program ramah lingkungan dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Berkembangnya aplikasi standarisasi internasional dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Berkembangnya jenis hak kekayaan intelektual dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate, terutama untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sumber : Hasil Analisis (2015).

4.5. PILAR PENGUATAN TEMATIK SISTEM INOVASI

Pengembangan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih menjadi fokus dalam pilar penguatan tematik sistem inovasi daerah Kota Pekalongan untuk rentang waktu 2016-2020. Jika pada periode sebelumnya pembangunan TIK sebagai bagian integral dari pembangunan daerah ditekankan pada penataan kebijakan, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, kemudian dilanjutkan dengan penerapan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, maka memasuki masa waktu 2016-2020 pengembangan TIK harus ditekankan pada pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh bidang atau urusan pembangunan daerah.

Di samping TIK, masih ada beberapa tematik sistem inovasi daerah lainnya yang bisa dikembangkan di Kota Pekalongan. Di antaranya terkait dengan transportasi, air bersih, energi dan lain-lain. Tematik-tematik ini tidak diulas secara dalam pilar kelima ini, melainkan nantinya akan dikaitkan dengan program-program tertentu yang terdapat di pilar-pilar lainnya.

Seperti apa pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersebut pada periode 2016-2020 ditinjau menurut enam elemen kerangka kebijakan inovasi, dapat disimak pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kondisi Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi Kota Pekalongan yang Diinginkan Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
K_i	E_i	I_i	P5
Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis (K1)	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Diterbitkannya regulasi terkait dengan pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK di antaranya : a. Peraturan Walikota Pekalongan tentang <i>e-Pekalongankota</i> . b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Lembaga/TIM Pengelola <i>e-Pekalongankota</i> .
	Insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis insentif pengembangan TIK	Diberikannya insentif dan kemudahan kepada pihak swasta dan masyarakat yang berprestasi mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis TIK.
	Infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis	Jenis dokumen perencanaan pengembangan TIK	Dokumen perencanaan yang terkait dengan : • Rencana Induk <i>e-Pekalongankota</i> . • Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2023.
		Ketersediaan database TIK	<i>Data center</i> bisa diakses secara online oleh berbagai pihak.
Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa (K2)	Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya peran lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi) dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. • Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. • Terbentuknya divisi IPTEKIN/Litbangyasa badan usaha, terutama terkait dengan pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. • Berkontribusinya kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa penunjang (Dewan Riset Daerah, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah) dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
		Sebaran SDM IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya aparat pemerintah kota yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
			<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya jumlah dosen dan mahasiswa yang melakukan pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk mendukung pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. Berkembangnya SDM di sektor badan usaha yang berkontribusi pada pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa untuk pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. Berkembangnya SDM di masyarakat/LSM yang kreatif dalam pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur IK.
		Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah kota untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/SiDa, insentif, pelatihan dan fasilitasi, serta hibah bersaing dalam mendukung pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa terkait pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. Dialokasikannya anggaran dari pihak badan usaha untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/Litbangyasa bagi pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK. Dialokasikannya anggaran dari masyarakat/LSM untuk pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Daya serap IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Meningkatnya daya absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis (K3)	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis TIK	Meluasnya sebaran kemitraan strategis untuk pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
	Peningkatan difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi TIK	Meningkatnya difusi inovasi untuk pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Jenis wahana interaksi pelaku TIK	Semakin beragamnya wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis yang terkait dengan pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4)	Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya kandungan TIK dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar. Semakin berkembangnya pemanfaatan pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK (<i>internet based</i>).
		Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Meningkatnya frekuensi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berbasis TIK bagi aparatur pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pelajar dan lain-lain.
	Pengelolaan teknologi masyarakat dan <i>reverse brain drain</i>	Model pengelolaan teknologi masyarakat	Berkembangnya model pengelolaan teknologi masyarakat berbasis TIK.
		Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jenis agenda apresiasi inovasi	Semakin beragamnya agenda apresiasi inovasi di bidang TIK.
		Jenis media kampanye inovasi	Semakin beragamnya media kampanye inovasi di bidang TIK.
Penumbuhan usaha baru inovatif	Model penumbuhan usaha baru inovatif	Berkembangnya penumbuhan usaha baru melalui model Wirausaha Berbasis TIK.	
Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar-daerah dan pusat-daerah (K5)	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Bidang fokus pengembangan TIK	Semakin mantapnya fokus pengembangan TIK di Kota Pekalongan : <ol style="list-style-type: none"> TIK untuk pendidikan berkualitas. TIK untuk pemberdayaan masyarakat. TIK untuk <i>good governance/public service</i>. TIK untuk ekonomi kreatif.
	Keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis	Sebaran kerja sama daerah untuk pengembangan TIK	Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkait dengan bidang-bidang fokus pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi	Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah (K6)	Kelembagaan khusus	Jenis kelembagaan khusus	Meningkatnya peran kelembagaan khusus dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Lingkungan	Sebaran program ramah lingkungan	Berkembangnya program ramah lingkungan dalam pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Standarisasi	Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Berkembangnya aplikasi standarisasi internasional dalam pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.
	Hak Kekayaan Intelektual	Jenis hak kekayaan intelektual	Berkembangnya jenis hak kekayaan intelektual di bidang TIK.
	Ketenagakerjaan	Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang TIK, terutama untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sumber : Hasil Analisis (2015)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Merujuk pada hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka berikut ini dapat dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020.

5.1. TUJUAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Tujuan penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan untuk rentang masa 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat implementasi pengembangan infrastruktur, suprastruktur dan infostruktur dasar sistem inovasi di Kota Pekalongan.
2. Mempercepat implementasi pengembangan sektor ekonomi yang menjadi prioritas Kota Pekalongan.
3. Mempercepat keterpaduan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) di Kota Pekalongan.
4. Memacu percepatan penciptaan pelaku bisnis atau pelaku ekonomi di Kota Pekalongan yang berbasis pada iptekin.
5. Memacu percepatan pemanfaatan IPTEKIN untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah dan masyarakat Kota Pekalongan.

5.2. SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Pekalongan pada jangka waktu yang sama adalah :

1. Terciptanya ekosistem kreativitas keinovasian dan bisnis yang kondusif di Kota Pekalongan.
2. Terciptanya sentra industri kecil dan menengah unggulan Kota Pekalongan yang berdaya saing tinggikan berwawasan lingkungan.

3. Terwujudnya jaringan inovasi yang optimal dan komunikatif melalui pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan, Kawasan *Techno Park* Perikanan serta Posyantek dan Wartek.
4. Tumbuhnya pelaku bisnis yang kreatif dan inovatif (teknopreneur) berbasis IPTEKIN melalui pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, BDS-P dan UPB SMK Incorporate.
5. Terjadinya pemantapan dan perluasan pemanfaatan TIK dalam semua aspek pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat di Kota Pekalongan.

5.3. STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Strategi Penguatan Sistem Inovasi yang dimaksud di sini adalah prakarsa strategis yang perlu dilakukan dalam rangka upaya Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan. Adapun strategi ini terdiri dari :

1. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di Kota Pekalongan secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks makro sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam jangka menengah.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan sistem inovasi daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

2. Pengembangan Klaster Industri

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso klaster industri unggulan daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan klaster industri unggulan daerah dalam jangka menengah.
 - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan klaster industri unggulan daerah (kontekstual).
 - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan klaster industri unggulan daerah.
3. Pengembangan Jaringan Inovasi
- Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks penguatan kemitraan/kolaborasi, dinamika interaksi, aliran pengetahuan/inovasi dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan jaringan inovasi daerah dalam jangka menengah.
 - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan jaringan inovasi daerah (kontekstual).
 - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan jaringan inovasi daerah.
4. Pengembangan Teknopreneur
- Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso-mikro pengembangan kelembagaan Pusat-Pusat Inovasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PI UMKM) dan UMKM inovatif dalam kerangka sistem inovasi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan teknopreneur daerah dalam jangka menengah.
 - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan teknopreneur daerah (kontekstual).

- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan teknopreneur daerah.
5. Penguatan Tematik Sistem Inovasi
- Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis penguatan tematik sistem inovasi dalam jangka menengah.
 - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan tematik sistem inovasi (kontekstual).
 - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik penguatan tematik sistem inovasi daerah.

5.4. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dalam upaya penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan, arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) berikut :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis. Adapun cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis antara lain meliputi :
 - a. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis yang mencakup seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan.
 - b. Insentif untuk inovasi dan bisnis.
 - c. Infrastruktur dasar inovasi dan bisnis yang melingkupi seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis, terutama dalam bentuk dokumen perencanaan daerah yang memuat penguatan

sistem inovasi dan basis data (*database*) inovasi dan bisnis yang memuat seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan bisnis.

2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kota Pekalongan, meningkatkan daya ungkit peran IPTEKIN/Litbangyasa yang sesuai dan spesifik bagi Kota Pekalongan, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UMKM, dan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEKIN dan hasil litbangyasa serta mengembangkannya. Cakupan kelembagaan dan daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri dan masyarakat :

- a. Kelembagaan sistem inovasi daerah yang meliputi Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, DRD, Balitbangda/Kantor Ristekin serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) yang terdapat di Kota Pekalongan, baik di perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
 - a. Daya dukung IPTEK yang mencakup seluruh sumber daya IPTEK, terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
 - b. Daya absorpsi industri dan masyarakat yang melingkupi seluruh kapasitas daya absorpsi industri dan masyarakat.

3. Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kota Pekalongan, mencakup antara lain :

- a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (jaringan sistem inovasi daerah) dalam rangka menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif.

- b. Peningkatan difusi inovasi dalam rangka meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih inovasi.
 - c. Pengembangan wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis.
4. Mendorong budaya kreatif-inovatif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuh kembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di Kota Pekalongan. Cakupannya antara lain terkait dengan :

- a. Penguatan budaya budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang menggambarkan sejauhmana kondisi budaya budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumber daya aparat).
 - b. Penguatan kohesi sosial yang menggambarkan sejauhmana inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki Kota Pekalongan sebagai sumber inovasi dan program *reverse brain drain*.
 - c. Apresiasi dan kampanye inovasi yang menggambarkan sejauhmana Kota Pekalongan telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya.
 - d. Penumbuhan usaha baru inovatif yang menggambarkan sejauhmana Kota Pekalongan telah mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif.
5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memantapkan fokus kebijakan pembangunan daerah yang sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan kebijakan pembangunan di daerah lain dan kebijakan pembangunan di tingkat pusat. Adapun cakupannya antara lain meliputi :

- a. Penetapan fokus kebijakan pembangunan daerah untuk setiap pilar penguatan sistem inovasi daerah.

- b. Keterpaduan kebijakan antardaerah dan daerah-pusat melalui pengembangan kerja sama daerah.
 - c. Pengembangan/penguatan kelembagaan khusus untuk mempercepat proses terwujudnya fokus dan keterpaduan kebijakan.
6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku kepentingan lainnya di Kota Pekalongan agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kota Pekalongan. Hal ini antara lain mencakup :

- a. Lingkungan : sejauhmana prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan.
- b. Standarisasi : hal ini terutama menyangkut sudah ada atau belumnya penerapan *Measurement Standard Test Quality (MSTQ)*.
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : sejauhmana program Kota Pekalongan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang HKI.
- d. Ketenagakerjaan : sejauhmana perhatian Kota Pekalongan pada aspek ketenagakerjaan.

BAB VI
FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

6.1. FOKUS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah seperti telah dikemukakan pada Bab V, maka di bawah ini dapat diuraikan secara ringkas fokus penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan periode 2016-2020 untuk setiap pilar :

1. Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah adalah :
 - a. Penguatan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur dasar yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan inovasi.
 - b. Peningkatan daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa dalam penguatan inovasi dan bisnis yang dapat diabsorpsi oleh aparatur pemerintah kota, pelaku bisnis dan masyarakat.
 - c. Pengembangan kemitraan strategis dan wahana pengembangan inovasi dan bisnis.
 - d. Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan.
 - e. Pengembangan keterpaduan kebijakan untuk penguatan inovasi dan bisnis.
 - f. Penguatan internal menghadapi dinamika global.
2. Fokus pengembangan klaster industri adalah :
 - a. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri perbatikan.
 - b. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri perikanan.
 - c. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri pengolahan makanan.

3. Fokus pengembangan jaringan inovasi adalah :
 - a. Pengembangan regulasi, infrastruktur dasar, kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan Kawasan Teknopolitan Batik.
 - b. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan dinamika global untuk pengembangan Kawasan *Techno Park* Perikanan.
 - c. Pengembangan kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan dinamika global untuk pengembangan Posyantek dan Wartek.
4. Fokus pengembangan teknopreneur adalah :
 - a. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan inkubator bisnis dan teknologi.
 - b. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan *business development service-provider* (BDS-P).
 - c. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan SMK Incorporate.
5. Fokus penguatan tematik sistem inovasi adalah optimalisasi implementasi TIK dalam bentuk :
 - a. Penguatan infrastruktur TIK.
 - b. Peningkatan *e-literacy* atau melek TIK.
 - c. Penguatan regulasi dan tata kelola TIK.
 - d. Penguatan kelembagaan pengembangan infrastruktur/aplikasi/SIM *open source*.

6.2. PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Berdasarkan fokus penguatan sistem inovasi daerah pada setiap pilar di atas, serta merujuk pada nomenklatur program yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka di bawah ini dapat diuraikan program prioritas penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Program prioritas pada pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah terdiri dari :
 - a. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
 - c. Program pengembangan data/informasi inovasi dan bisnis;
 - d. Program peningkatan kemampuan teknologi industry;
 - e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - f. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
 - g. Program pendidikan menengah;
 - h. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
 - i. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
 - j. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah;
 - k. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi;
 - l. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - m. Program pendidikan tinggi;
 - n. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - o. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
 - p. Program pengelolaan kekayaan budaya;
 - q. Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya;
 - r. Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - s. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
 - t. Program kerja sama pembangunan;
 - u. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
 - v. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;

- w. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - x. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - y. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - z. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan;
 - aa. Program peningkatan aplikasi standar internasional;
 - bb. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Program prioritas pada pilar Pengembangan Klaster Industri terdiri dari:
- a. Program penataan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
 - c. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 - d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
 - e. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi;
 - f. Program penataan struktur industri;
 - g. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
 - h. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 - i. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
 - j. Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - k. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
 - l. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
3. Program prioritas pada pilar Pengembangan Jaringan Inovasi terdiri dari :
- a. Program penataan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
 - c. Program pengembangan budidaya perikanan;
 - d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - e. Program pengembangan data/informasi daerah;
 - f. Program optimalisasi dan pengembangan pusat riset;
 - g. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

- h. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;
 - i. Program pengembangan IPTEKIN/Litbangyasa;
 - j. Program pengelolaan kekayaan budaya;
 - k. Program pengembangan destinasi pariwisata
 - l. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
 - m. Program pengelolaan keragaman budaya;
 - n. Program pengayaan bahan ajar pendidikan menengah dan tinggi;
 - o. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
 - p. Program pengembangan nilai budaya;
 - q. Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;
 - r. Program apresiasi dan kampanye inovasi;
 - s. Program kerja sama informasi dan media massa;
 - t. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
 - u. Program pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB);
 - v. Program pengembangan pusat inovasi *techno park* perikanan;
 - w. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - x. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - y. Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
 - z. Program pengembangan HKI;
 - aa. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
4. Program prioritas pada pilar Pengembangan Teknopreneur terdiri dari:
- a. Program penataan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
 - c. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif;
 - d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
 - e. Program peningkatan difusi hasil IPTEKIN/Litbangyasa;
 - f. Program peningkatan kualitas kelembagaan UKM;
 - g. Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;
 - h. Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - i. Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
 - j. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

5. Program prioritas pada pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi terdiri dari :
- a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
 - b. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - c. Program kerja sama informasi dan media massa;
 - d. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
 - e. Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;
 - f. Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - g. Program kerja sama pembangunan;
 - h. Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
 - i. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

BAB VII
RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Rencana aksi (*action plan*) penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 adalah sehimpunan rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 (Bab V) yang telah diindikasikan dalam fokus dan program prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 (Bab VI).

Sasaran, strategi dan arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 itu sendiri dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Bab II) yang dilengkapi oleh tantangan dan peluang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Bab III), dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang diinginkan hingga tahun 2020 (Bab IV).

Di dalam ini, rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 disajikan dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari komponen-komponen berikut :

1. Sasaran.
2. Strategi.
3. Arah Kebijakan.
4. Indikator Kinerja (Output).
5. Capaian Kinerja.
6. Program dan Kegiatan.
7. Target dan Waktu Pelaksanaan.
8. Urusan.
9. Institusi Penanggung Jawab.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, Tabel 7.2, Tabel 7.3, Tabel 7.4 dan Tabel 7.5.

Tabel 7.1. Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Terciptanya ekosistem kreativitas keinovasian dan bisnis yang kondusif	Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis	Regulasi pengembangan inovasi dan bisnis sudah ada, tetapi masih diperlukan regulasi lainnya	Ditetapkannya regulasi pengembangan inovasi dan bisnis yang dibutuhkan	Program penataan peraturan perundang-undangan	Publikasi/penyerbitan peraturan baru atau perubahan tentang pengembangan inovasi dan bisnis	2 regulasi tentang pengembangan inovasi dan bisnis	2 regulasi tentang pengembangan inovasi dan bisnis	2 regulasi tentang pengembangan inovasi dan bisnis			Pemerintahan Umum	Kantor Ristekin, BPMP2T, Bagian Hukum Setda
				Jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis	Sudah ada insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal, dana stimulan dan pemberian berbagai kemudahan	Ditingkatkannya pengurangan/pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian bantuan modal, dana stimulan dan berbagai jenis kemudahan	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pemberian insentif untuk pengembangan inovasi dan bisnis	5 jenis	5 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	Penanaman Modal Daerah	BPMP2T, SKPD terkait
				Jenis dokumen perencanaan pengembangan inovasi dan bisnis	PSID sudah terintegrasi ke dalam dokumen RPJPD dan RPJMD	Dokumen PSID terintegrasi dan sinkron dengan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD	Program perencanaan pembangunan daerah	Pengintegrasian dan sinkronisasi PSID ke dalam dokumen perencanaan daerah	1 RPJMD, 14 Renja-SKPD, 1 RKPD, 14 Renja-SKPD	1 RKPD, 14 Renja-SKPD	1 RKPD, 14 Renja-SKPD	1 RKPD, 14 Renja-SKPD	1 RKPD, 14 Renja-SKPD	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Ketersediaan database inovasi dan bisnis	Database inovasi dan bisnis belum tersimpan secara terorganisir dan masih disajikan secara manual	Database inovasi dan bisnis dikelola secara terorganisir dan disajikan secara online	Program pengembangan data/informasi inovasi dan bisnis	Pengembangan database inovasi dan bisnis skala Kota Pekalongan secara terorganisasi dan <i>online</i>	1 paket pembuatan struktur data-base, pengumpulan, dan penyimpanan data	1 paket manajemen data (update, pemeliharaan, keamanan, pengorganisasian dan penyajian data)	1 paket manajemen data (update, pemeliharaan, keamanan, pengorganisasian dan penyajian data)	1 paket manajemen data (update, pemeliharaan, keamanan, pengorganisasian dan penyajian data)	1 paket manajemen data (update, pemeliharaan, keamanan, pengorganisasian dan penyajian data)	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekin
			Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga iptekin/litbangyasa sudah ada di perguruan tinggi (5 PT), lembaga litbang pemerintah daerah (Kantor Ristekin dan DRD) dan lembaga penunjang (Fosyantek dan Wartek)	Berkembangnya lembaga iptekin/litbangyasa yang sudah ada dan terbentuknya lembaga iptekin/litbangyasa di lingkungan badan usaha	Program penguatan kelembagaan iptekin/litbangyasa	Pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa di perguruan tinggi, lembaga litbang pemda dan lembaga penunjang	1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa lembaga litbang	1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa lembaga litbang	1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa lembaga litbang	1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa lembaga litbang	1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa lembaga litbang	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, Bappeda, BPMP2AK B

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									pemda, 1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbang yasa lembaga penunjang (DRD, TK PSID, posyantek dan wartek)	pemda, 1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbang yasa lembaga penunjang	1 pemda, 1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbang yasa lembaga penunjang	1 pemda, 1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbang yasa lembaga penunjang	1 pemda, 1 paket pengembangan kelembagaan iptekin/litbang yasa lembaga penunjang		
							Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan unit/divisi/laboratorium litbangyasa di badan usaha	1 prakarsa/inisiasi pembentukan unit/divisi/laboratorium iptekin/litbang yasa di badan usaha	1 naskah akademis pembentukan unit/divisi/laboratorium iptekin/litbang yasa di badan usaha	1 unit/divisi/laboratorium iptekin/litbang yasa di badan usaha			Perindustrian	Dinperindagkop UKM, Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Sebaran SDM iptekin/litbangyasa	SDM iptekin/litbangyasa tersebar di perguruan tinggi (dosen, mahasiswa), sekolah menengah (guru dan siswa), lembaga litbang pemda (fungsional), lembaga penunjang (masyarakat inovatif), tetapi jumlahnya relatif sedikit	Meningkatnya jumlah SDM iptekin/litbangyasa di perguruan tinggi/sekolah menengah, lembaga litbang pemda, badan usaha dan lembaga penunjang	Program peningkatan kapasitas SDM iptekin/litbangyasa	Pendidikan dan pelatihan bagi SDM iptekin/litbangyasa di lembaga penunjang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang	Perencanaan	Kantor Ristekin, Bappeda, BPMP2AK B
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	2 PNS	2 PNS	2 PNS	2 PNS	2 PNS	Kepegawaian	BKD
				Sebaran alokasi anggaran iptekin/litbangyasa	Alokasi anggaran iptekin/litbangyasa bersumber dari pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat,	Meningkatnya alokasi anggaran untuk iptekin/litbangyasa, baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang pemda, badan usaha maupun lembaga penunjang	Program pengembangan iptekin/litbangyasa	Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi	Meningkat 15-25 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 15-25 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 15-25 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 15-25 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 15-25 persen dari tahun sebelumnya	Perencanaan	Kantor Ristekin, Bappeda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					tetapi besarnya relatif kecil										
				Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Hasil iptekin/litbangyasa sudah dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat, UMKM dan pelaku bisnis lainnya	Meningkatnya daya serap hasil iptekin/litbangyasa oleh institusi pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat	Program pengembangan difusi hasil iptekin/litbangyasa	Sosialisasi hasil iptekin/litbangyasa ke pemerintahan, masyarakat dan pelaku bisnis	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
							Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	20 IKM/UKM	20 IKM/UKM	20 IKM/UKM	20 IKM/UKM	20 IKM/UKM	Perindustrian	Dinperindagkop UKM
			Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis	Kemitraan strategis pemajuan inovasi dan bisnis sudah dijalin dengan institusi pendidikan, dunia usaha, media massa, pemerintahan	Meluasnya kemitraan strategis untuk pemajuan inovasi dan bisnis	Program pendidikan menengah	Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	Pendidikan	Dindikpora
							Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Kerja sama dengan lembaga internasional dalam rangka	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	Perdagangan	Dinperindagkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pengembangan produk							
								Membangun jejaring dengan eksportir	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	Perdagangan	Dinperindagkop UKM
							Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dan koperasi dengan swasta	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	15 fasilitasi kerja sama - kemitraan	15 fasilitasi kerja sama kemitraan	20 fasilitasi kerja sama kemitraan	Perindustrian	Dinperindagkop UKM
							Program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah	Fasilitasi/pembentukan kerja sama antardaerah pada bidang ekonomi	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	Pemerintahan Umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda
								Fasilitasi/pembentukan kerja sama antardaerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	Pemerintahan Umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda
				Sebaran difusi inovasi	Difusi inovasi terjadi di input (bahan baku), proses (teknik	Semakin meningkatnya difusi inovasi	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	Perindustrian	Dinperindagkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					produksi) dan output (produk-produk inovatif)										
				Jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis	Wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis relatif beragam, tetapi kebanyakan dalam bentuk <i>event-event</i> (pameran, forum, lomba, HUT dan <i>event-event</i> lainnya)	Semakin banyaknya wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis, baik dalam bentuk <i>event-event</i> maupun ruang publik kreatif	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Penanaman Modal Daerah	BPMP2T
								Pengembangan potensi unggulan daerah	2 kali setahun	2 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali 2 kali setahun	Penanaman Modal Daerah	BPMP2T
							Program pengelolaan RTH	Penataan RTH sebagai ruang publik kreatif (RPK)	1 RPK	1 RPK	1 RPK	1 RPK	1 RPK	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas PU
			Mendorong budaya kreatif-inovatif	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui	Pengembangan kandungan kreativitas-keinovasian dalam mata	Berkembangnya kandungan kreativitas-keinovasian dan kompetensi tertentu dalam	Program pendidikan menengah	Pengembangan materi mata pelajaran	13 SMK, 11 SMA, 6 MA	13 SMK, 11 SMA, 6 MA	13 SMK, 11 SMA, 6 MA	13 SMK, 11 SMA, 6 MA	13 SMK, 11 SMA, 6 MA	Pendidikan	Dindikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				pendidikan	pelajaran atau mata kuliah tertentu di jenjang SLTA (SMA, SMK) dan perguruan tinggi	mata pelajaran SLTA dan perguruan tinggi									
							Program pendidikan tinggi	Pengembangan materi mata kuliah	5 PT	5 PT	5 PT	5 PT	5 PT	Pendidikan	Perguruan tinggi di Kota Pekalongan
				Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Pelatihan kewirausahaan dan studi banding untuk guru, murid, dosen, mahasiswa dan pengusaha	Meningkatnya frekuensi pelatihan kewirausahaan dan studi banding untuk guru, murid, dosen, mahasiswa dan pengusaha	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi dan studi banding	30 guru dan 60 murid SMK/SMA/MA	30 guru dan 60 murid SMK/SMA/MA	30 guru dan 60 murid SMK/SMA/MA	30 guru dan 60 murid SMK/SMA/MA	30 guru dan 60 murid SMK/SMA/MA	Pendidikan	Dindikpora
							Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	30 UKM	30 UKM	30 UKM	30 UKM	30 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
				Model pengelolaan teknologi masyarakat	Pendirian Museum Batik	Berkembangnya model pengelolaan teknologi	Program pengelolaan kekayaan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan	1 paket penyusunan kebijakan	4 paket sosialisasi	4 paket sosialisasi	4 paket sosialisasi	4 paket sosialisasi	Kebudayaan	Dinhubparbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						masyarakat, baik di bidang perbaikan maupun di luar perbaikan		budaya lokal daerah							
				Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Penunjukkan <i>curator</i> Museum Batik, motivator <i>success story</i>	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> , terutama di sektor unggulan	Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antardaerah	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	Kebudayaan	Dinhub-parbud
				Jenis agenda apresiasi inovasi	Agenda Kreanova dan Anugerah Inovasi, gelar TTG, lomba inovasi	Terlaksananya agenda apresiasi inovasi secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Pelaksanaan apresiasi inovasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Jenis media kampanye inovasi	Media massa, video/film dokumenter, website, profil/brosur dan lain-lain	Terlaksananya kampanye inovasi melalui berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan kampanye inovasi di berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Model penumbuhan usaha baru inovatif	Pemberian insentif (baru dalam bentuk pemberian bantuan modal dan pemberian dana	Berkembangnya penumbuhan usaha baru inovatif melalui model insentif, fasilitasi, pelatihan, sosialisasi dan	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pengembangan ekonomi masyarakat	1 paket hibah bersaing untuk usaha baru inovatif	1 paket hibah bersaing untuk usaha baru inovatif	1 paket hibah bersaing untuk usaha baru inovatif	1 paket hibah bersaing untuk usaha baru inovatif	1 paket hibah bersaing untuk usaha baru inovatif	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Ditinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					stimulan), sosialisasi HKI, pelatihan dan lain-lain	lain-lain									
			Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah	Bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Fokus pengembangan inovasi dan bisnis adalah perbaikan, perikanan dan pengolahan makanan	Bertambahnya bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan <i>master plan</i> pembangunan ekonomi daerah	1 paket kajian	1 paket penyusunan dokumen master plan	1 paket implementasi master plan	1 paket implementasi master plan	1 paket implementasi master plan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Sebaran kerja sama daerah	Kerja sama antardaerah dan kerja sama dengan pihak ketiga	Terjalinnnya kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA)	Program kerja sama pembangunan	Koordinasi kerja sama pembangunan antardaerah	3 paket koordinasi	3 paket koordinasi	3 paket koordinasi	3 paket koordinasi	3 paket koordinasi	Perencanaan Pembangunan	TKKSD/ Bagian Pemerintahan Setda
								Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga (dalam negeri)	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	Perencanaan Pembangunan	TKKSD/ Bagian Pemerintahan Setda
								Fasilitasi kerja sama	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	Perencanaan	TKKSD/

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								sama dengan dunia usaha/ lembaga (luar negeri)	tasi kerja sama	tasi kerja sama	tasi kerja sama	tasi kerja sama	tasi kerja sama	aan Pembangunan	Bagian Pemerintahan Setda
				Jenis kelembagaan khusus	Sudah ada TKKSD, Tim Koordinasi PSID, Relawan Indonesia Berinovasi	Berfungsinya secara optimal TKKSD, Tim Koordinasi PSID dan RIB	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kemampuan teknis	1 paket <i>capacity building</i>	1 paket <i>capacity building</i>	1 paket <i>capacity building</i>	1 paket <i>capacity building</i>	1 paket <i>capacity building</i>	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Ristekin, Setda
								Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	3 paket sosialisasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Ristekin, Setda
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Ristekin, Setda
								Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Ristekin, Setda
								Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/ sosial	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Ristekin, Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah	Sebaran program ramah lingkungan	Pendirian TPST, IPAL, <i>green city</i>	Meluasnya program ramah lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengkajian peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	Lingkungan Hidup	BLH
							Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Rehabilitasi lahan rob	1 paket rehabilitasi	1 paket rehabilitasi	1 paket rehabilitasi	1 paket rehabilitasi	1 paket rehabilitasi	Lingkungan Hidup	BLH
							Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Pengembangan database dan informasi lingkungan	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	Lingkungan Hidup	BLH
							Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi	1 paket pengembangan	1 paket pengembangan	1 paket pengembangan	1 paket pengembangan	1 paket pengembangan	Lingkungan Hidup	BLH, Dinhab-parbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Penataan dan pemeliharaan RTH	5 RTH	5 RTH	5 RTH	5 RTH	5 RTH	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas PU
				Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Aplikasi standar internasional tersebar di SKPD, rumah sakit dan sekolah	Meningkatnya aplikasi standar internasional dan sistem manajemen mutu di lembaga pelayanan publik	Program peningkatan aplikasi standar internasional	Perluasan penerapan ISO 9001.	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Jenis hak kekayaan intelektual	Jenis HKI yang sudah ada adalah paten dan merek	Meningkatnya jenis dan jumlah HKI, terutama dalam konteks MEA	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Sosialisasi HKI kepada UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
				Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja belum berkembang	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil, terutama dalam konteks MEA	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil	3 x sosialisasi, fasilitasi 5 orang tenaga kerja terampil	3 x sosialisasi, fasilitasi 5 orang tenaga kerja terampil	3 x sosialisasi, fasilitasi 5 orang tenaga kerja terampil	3 x sosialisasi, fasilitasi 5 orang tenaga kerja terampil	3 x sosialisasi, fasilitasi 5 orang tenaga kerja terampil	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Tabel 7.2.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Klaster Industri

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab	
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.	Tercipta nyasentra industri kecil dan menengah unggulan Kota Pekalongan yang berdayasaing tinggida n berwawasa n lingkungan	Pengembangan Klaster Industri	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan industri/usaha kecil dan menengah (IKM/UKM)	Baru ada satu regulasi tentang pembentukan Kawasan Minapolitan	Diterbitkannya regulasi tentang pengembangan sentra industri	Program penataan peraturan perundangan	Publikasi/penyerbitan peraturan tentang pengembangan sentra IKM	7 regulasi tentang Pembentukan Sentra IKM di bidang perikanan dan pengolahan makanan						Pemerintah Umum	Dinperind agkop UKM dan Bagian Hukum Setda
				Jenis insentif pengembangan IKM/UKM	Sudah ada insentif dalam bentuk pembebasan retribusi daerah dan pemberian berbagai jenis kemudahan/fasilitasi berusaha	Ditingkatkannya pemberian berbagai jenis insentif dan kemudahan bagi IKM/UKM	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi bagi IKM/UKM terhadap pemanfaatan sumber daya	20 IKM/UKM	25 IKM/UKM	30 IKM/UKM	40 IKM/UKM	50 IKM/UKM	Perindustrian	Dinperind agkop UKM	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	4 sentra IKM per-batikan, 2 sentra IKM per-ikanan, 2 sentra IKM peng-olahan makanan	4 sentra IKM per-batikan, sentra IKM per-ikanan, sentra IKM peng-olahan makanan	4 sentra IKM per-batikan, 2 sentra IKM per-ikanan, 2 sentra IKM peng-olahan makana n	4 sentra IKM per-batikan, 2 sentra IKM per-ikanan, 2 sentra IKM peng-olahan makana n	4 sentra IKM per-batikan, 2 sentra IKM per-ikanan, 2 sentra IKM peng-olahan makana n	Perindustri	Dinperind agkop UKM
								Pemberian kemudahan izin usaha IKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	Perindustri	BPMP2T
								Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha IKM/UKM	50 IKM/ UKM	50 IKM/ UKM	50 IKM/ UKM	50 IKM/ UKM	50 IKM/ UKM	Perindustri	BPMP2T
								Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	10 IKM/ UKM	Perindustri	Dinperind agkop UKM
				Jenis dokumen perencanaan pengembangan IKM/UKM	Pengembangan IKM/UKM sudah dimuat dalam RPJMD	Dikeluarkannya dokumen perencanaan Master Plan dan Rencana	Program pengembangan industri kecil dan	Penyusunan kebijakan industri kecil dan menengah	1 Master Plan Pengembangan Sentra IKM Tahun 2016-					Perindustri	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dan RKPD serta dalam Renstra dan Renja-SKPD terkait	Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	menengah		2035; 8 Rencana Aksi Pengembangan Sentra IKM 2016-2020						
				Ketersediaan database IKM/UKM	Database IKM/UKM belum tersimpan secara terorganisir dan masih disajikan secara manual	Database IKM/UKM dikelola secara terorganisir dan disajikan secara <i>online</i>	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	1 paket mana-jemen data	1 paket mana-jemen data	1 paket mana-jemen data	1 paket mana-jemen data	1 paket mana-jemen data	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
			Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga iptekin/litbangyasa sudah ada di lingkup pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat	Meningkatnya peran lembaga iptekin/litbangyasa dalam pengembangan IKM/UKM serta terbentuknya lembaga iptekin/litbangyasa di industri swasta	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	10 IKM/ UKM per-batikan, 10 KUB IKM/UKM perikanan dan 5 IKM/UKM pengolahan makanan	10 IKM/ UKM per-batikan, 10 KUB IKM/UKM perikanan dan 5 IKM/UKM pengolahan makanan	15 IKM/ UKM per-batikan, 15 KUB IKM/UKM per-ikanan dan 5 IKM/UKM pengolahan makanan	15 IKM/ UKM per-batikan, 15 KUB IKM/UKM per-ikanan dan 5 IKM/UKM pengolahan makanan	20 IKM/ UKM per-batikan, 20 KUB IKM/UKM per-ikanan dan 5 IKM/UKM pengolahan makanan	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
								Pengembangan unit/divisi/laboratorium	3 prakar-sa/ inisiasi pembed-	3 naskah akademis pembed-	3 unit/divisi/laborato-			Perindustrian	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								iptekin/ litbangyasa di industri unggulan daerah	tukan unit/ divisi/ laborato-rium litbang-yasa per-batikan, per-ikanan dan peng- olahan makanan	tukan unit/ divisi/ laborato-rium litbang- yasa per- batikan, dan peng- olahan makana n					
				Sebaran SDM iptekin/ litbangyasa	SDM iptekin/ litbangyasa tersebar di pemerintah- an, perguruan tinggi, SMK, masyarakat	Meningkatnya jumlah SDM iptekin/ litbangyasa yang berkontribusi pada pengem- bangan IKM/UKM	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Pengembang- an sistem inovasi teknologi industri	10 SDM iptekin/ litbang-yasa	10 SDM iptekin/ litbang- yasa	10 SDM iptekin/ litbang- yasa	10 SDM iptekin/ litbang- yasa	10 SDM iptekin/ litbang- yasa	Perindustri	Dinperind- agkop UKM
				Sebaran alokasi anggaran iptekin/ IPTEKIN/Litb angyasa	Alokasi anggaran iptekin/ litbangyasa untuk pengem- bangan IKM/UKM relatif kecil	Meningkatnya alokasi anggaran iptekin/ litbangyasa untuk pengembangan IKM/UKM	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	10 kajian/ peneli-tian	10 kajian/ peneli-tian	10 kajian/ peneli- tian	10 kajian/ peneli- tian	10 kajian/ peneli- tian	Perindustri	Dinperind- agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang diserap IKM/UKM dan pelaku bisnis lainnya meningkat	Semakin meningkatnya daya serap hasil iptekin/litbang-yasa oleh IKM/UKM dan pelaku bisnis lainnya	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	5 hasil iptekin/litbang-yasa	5 hasil iptekin/litbang-yasa	5 hasil iptekin/litbang-yasa	5 hasil iptekin/litbang-yasa	5 hasil iptekin/litbang-yasa	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
			Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan IKM/UKM	Kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk pemajuan IKM/UKM (terutama perbaikan) tersebar di dalam dan luar Kota Pekalongan	Meluasnya kemitraan strategis untuk pemajuan IKM/UKM hingga ke luar negeri, terutama terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi kerja sama kemitraan IKM dengan swasta	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	15 fasilitasi kerja sama - kemitraan	15 fasilitasi kerja sama kemitraan	20 fasilitasi kerja sama kemitraan	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
							Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	10 pelayanan teknologi	10 pelayanan teknologi	10 pelayanan teknologi	10 pelayanan teknologi	10 pelayanan teknologi	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
							Program penataan struktur industri	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
							Program peningkatan dan	Kerja sama dengan lembaga	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	Perdagangan	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Ditinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							pengembangan ekspor	internasional dalam rangka pengembangan produk							
								Membangun jejaring dengan eksportir	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	1 jejaring	Perdagangan	Dinperind agkop UKM
							Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing	5 fasili-tasi	5 fasili-tasi	5 fasili-tasi	5 fasili-tasi	5 fasili-tasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
								Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah	10 fasili-tasi	10 fasili-tasi	10 fasili-tasi	10 fasili-tasi	10 fasili-tasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Sebaran difusi inovasi	Difusi inovasi baru terdapat di bidang industri perbatikan	Meningkatnya difusi inovasi di bidang industri perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	3 bidang industri	Perindustrian	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jenis wahana interaksi bagi pelaku IKM/UKM	Wahana interaksi bagi pelaku IKM/UKM kebanyakan dalam bentuk pameran	Semakin banyaknya wahana interaksi bagi pelaku IKM/UKM, terutama dalam bentuk pameran promosi dan sejenisnya	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Penyelenggaraan promosi produk UKM	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
		Mendorong budaya kreatif-inovatif		Model penguatan budaya dan kewirausahaan melalui pendidikan	Pendirian Fakultas Teknologi Batik (Universitas Pekalongan), Prodi Teknik Batik (Politeknik Pusmanu) dan Fakultas Perikanan (Universitas Pekalongan)	Berkembangnya kompetensi perguruan tinggi dalam mengembangkan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Fasilitasi pengembangan inkubator dan bisnis	3 tenant IKM/UKM	3 tenant IKM/UKM	3 tenant IKM/UKM	3 tenant IKM/UKM	3 tenant IKM/UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Pelatihan kewirausahaan, website/blog, desain dan pengepakan bagi pelaku IKM/UKM	Meningkatnya frekuensi pelatihan kewirausahaan, manajemen dan pelatihan-pelatihan terkait lainnya bagi pelaku IKM/UKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	20 UKM	20 UKM	25 UKM	30 UKM	40 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Model pengelolaan teknologi masyarakat	Pengelolaan teknologi masyarakat dilakukan melalui pembelajaran secara turun temurun	Berkembangnya sentra IKM sebagai pusat pengelolaan teknologi IKM	Program pengembangan sentra industri potensial	Pengembangan fungsi pengelolaan teknologi IKM	1 sentra IKM	1 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	2 sentra IKM	Perindustrian	Dinperindagkop UKM
				Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Program <i>reverse brain drain</i> belum berkembang	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pemajuan IKM/UKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	2 motivasi	2 motivasi	2 motivasi	2 motivasi	2 motivasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
				Jenis agenda apresiasi inovasi	Agenda apresiasi inovasi khusus IKM/UKM belum ada	Terlaksananya agenda apresiasi inovasi khusus di kalangan IKM/UKM secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Pelaksanaan apresiasi inovasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Jenis media kampanye inovasi	Media massa, website, profil/brosur dan lain-lain	Terlaksananya kampanye inovasi IKM/UKM melalui berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan kampanye inovasi di berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Model penumbuhan usaha baru inovatif	Pemberian insentif, bantuan alat dan mesin, percepatan perizinan, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain	Berkembangnya penumbuhan usaha baru inovatif melalui model insentif, fasilitasi, pelatihan, sosialisasi HKI dan lain-lain	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	5 PPBT	5 PPBT	5 PPBT	5 PPBT	5 PPBT	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
			Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah	Bidang fokus pengembangan IKM/UKM	Fokus pengembangan IKM/UKM adalah perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan	Menguatnya fokus pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
				Sebaran kerja sama daerah	Kerja sama antardaerah dan kerja sama dengan pihak ketiga	Terjalannya kerja sama pengembangan IKM/UKM antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks MEA)	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi kerja sama kemitraan IKM dengan swasta	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	5 fasilitasi kerja sama	Perindustrian	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Fasilitasi kerja sama kemitraan IKM dengan pemerintah daerah	5 fasili-tasi kerja sama	5 fasili-tasi kerja sama	5 fasili-tasi kerja sama	5 fasili-tasi kerja sama	5 fasili-tasi kerja sama	Perindustrian	Dinperind agkop UKM, TKKSD/ Bagian Pemerintahan Setda
								Fasilitasi kerja sama kemitraan IKM dengan lembaga luar negeri	2 fasili-tasi kerja sama	2 fasili-tasi kerja sama	2 fasili-tasi kerja sama	2 fasili-tasi kerja sama	2 fasili-tasi kerja sama	Perindustrian	Dinperind agkop UKM, TKKSD/ Bagian Pemerintahan Setda
				Jenis kelembagaan khusus	Sudah ada Forum Pewarna Alam, paguyuban batik, HPIP, KUB Pengolah Ikan, APHIKAL	Meningkatnya peran kelembagaan khusus dalam pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan	Program penciptaan ikdim usaha kecil menengah yang kondusif	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	3 paket perencanaan dan koordinasi	3 paket perencanaan dan koordinasi	3 paket perencanaan dan koordinasi	3 paket perencanaan dan koordinasi	3 paket perencanaan dan koordinasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
			Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah	Sebaran program ramah lingkungan	Sudah ada IPAL di sentra produksi batik (Jenggot, Kauman, Duwet, Kradenan)	Meluasnya program ramah lingkungan di sentra produksi batik, perikanan dan makanan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga	20 UKM	20 UKM	25 UKM	30 UKM	40 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						olahan	usaha kecil dan menengah	kelestarian kawasan UMKM							
				Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Standarisasi internasional untuk produk IKM/UKM belum ada	Meningkatnya standar internasional dan manajemen mutu di IKM/UKM	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	Perindustrian	Dinperind agkop UKM
				Jenis hak kekayaan intelektual	Jenis HKI yang sudah ada adalah merek	Meningkatnya jenis dan jumlah HKI, terutama dalam konteks MEA	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Sosialisasi HKI kepada UMKM	30 UMKM batik	30 UMKM batik	30 UMKM batik	30 UMKM batik	30 UMKM batik	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
								Peningkatan kerja sama bidang HKI	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja terampil di lingkungan IKM/UKM belum ada	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil, terutama dalam konteks MEA	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil di industri batik	10 orang tenaga kerja terampil di industri batik	10 orang tenaga kerja terampil di industri batik	10 orang tenaga kerja terampil di industri batik	10 orang tenaga kerja terampil di industri batik	Tenaga Kerja	Dinsosna kertrans

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Tabel 7.3.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Terwujudnya jaringan inovasi yang optimal dan komunikatif melalui pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Pengembangan Jaringan Inovasi	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan jaringan inovasi	Perwal tentang Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik dalam proses penerbitan, sedangkan regulasi terkait pengembangan posyantek dan wartek sudah ada tiga regulasi	Diterbitkannya regulasi tentang pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan; pembentukan posyantek dan wartek	Program penataan peraturan perundang-undangan	Publikasi/penerbitan peraturan tentang pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik	1 keppwal tentang lembaga pengelola kawasan teknopolitan batik/PIBB	1 regulasi tentang roadmap pengembangan teknologi batik				Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekin, Bagian Hukum Setda
								Publikasi/penerbitan peraturan tentang pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	1 perwal tentang Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan, 1 keppwal tentang					Perencanaan Pembangunan	DPPK, Kantor Ristekin, Bagian Hukum Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Lembaga Pengelola Kawasan Techno Park Perikanan, 1 perwal tentang Pusat Inovasi Techno Park Perikanan						
								Publikasi/penyerbitan peraturan tentang pengembangan Posyantek dan Wartek	3 keputusan walikota tentang pembentukan posyantek dan 10 keputusan lurah tentang pembentukan wartek	10 keputusan lurah tentang pembentukan wartek				Perencanaan Pembangunan	BPMP2AK B, Kantor Ristekin, Bagian Hukum Setda
				Jenis insentif pengembangan jaringan	Insentif yang ada baru dalam bentuk	Ditingkatkan ya pemberian berbagai jenis	Program perencanaan	Optimalisasi dan pengembangan	1 paket fasilitasi pening-	1 paket fasilitasi pening-	1 paket fasilitas i	1 paket fasilitas i	1 paket fasilitas i	Perencanaan Pembangunan	Disperindagkop UKM

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				inovasi	fasilitasi ruang dan prasarana perkantoran sekretariat posyantek dan wartek	insentif dan kemudahan terkait dengan pengembangan Kawasan Tekno-politan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	pengembangan pusat produksi batik di Kawasan Teknopolitan Batik		katan kualitas sarana dan prasarana produksi batik	katan kualitas sarana dan prasarana produksi batik	pening- katan kualitas sarana dan prasarana produk si batik	pening- katan kualitas sarana dan prasarana produk si batik	pening- katan kualitas sarana dan prasarana produk si batik		
									1 paket fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana peng-olahan limbah industri batik		1 paket fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana peng-olahan limbah industri batik			Perencanaan Pembangunan	BLH
									1 paket fasilitasi penyediaan sarana untuk display bersama produk	1 paket fasilitasi penyediaan sarana untuk display bersama produk	1 paket fasilitasi penyediaan sarana untuk display bersama produk	1 paket fasilitasi penyediaan sarana untuk display bersama produk	1 paket fasilitasi penyediaan sarana untuk display bersama produk	Perencanaan Pembangunan	Disperindagkop UKM

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									pusat produksi batik	pusat produksi batik	produk pusat produksi batik	produk pusat produksi batik	produk pusat produksi batik		
									Fasilitas peningkatan pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM batik	Fasilitas peningkatan pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM batik	Fasilitas peningkatan pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM batik	Fasilitas peningkatan pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM batik	Fasilitas peningkatan pengetahuan dan kemampuan 20 orang SDM batik	Perencanaan Pembangunan	Disperindagkop UKM
							Program pengembangan budidaya perikanan (di Kawasan Techno Park Perikanan)	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan di Kawasan Techno Park Perikanan	Fasilitas 20 KUB	Fasilitas 20 KUB	Fasilitas 20 KUB	Fasilitas 20 KUB	Fasilitas 20 KUB	Kelautan dan Perikanan	DPPK
							Pembinaan dan pengembangan perikanan di Kawasan Techno Park Perikanan		1 paket fasilitasi pengembangan pusat inovasi techno park per-	1 paket fasilitasi pengembangan pusat inovasi techno park per-	1 paket fasilitasi pengembangan pusat inovasi techno park per-	1 paket fasilitasi pengembangan pusat inovasi techno park per-	1 paket fasilitasi pengembangan pusat inovasi techno park per-	Kelautan dan Perikanan	DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ikanan	ikanan	park per-ikanan	park per-ikanan	park per-ikanan		
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Posyantek dan Wartek)	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha melalui fasilitasi posyantek dan wartek	1 paket fasilitasi	1 paket fasilitasi	1 paket fasilitasi	1 paket fasilitasi	1 paket fasilitasi	Sosial	BPMP2AK B
				Jenis dokumen perencanaan pengembangan jaringan inovasi	Master Plan, Indikasi Program dan DED Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik sudah ada, sedangkan dokumen yang sedang disusun ialah Master Plan Pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	Diterbitkannya dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk landasan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik; Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan; dan Posyantek dan Wartek	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Kawasan Teknopolitan Batik)	1 dokumen <i>business plan</i>	1 road-map pengembangan teknologi batik				Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekin
								Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 dokumen <i>blue print techno park</i>					Perencanaan Pembangunan	Bappeda, DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								(Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	per- ikanan, 1 dokume n <i>business plan</i> per- ikanan, 1 dokume n pusat inovasite <i>chno park</i> per- ikanan						
							Program pem-berdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan posyantek dan wartek	4 paket rencana aksi pengembangan posyantek (4 keca-matan)	7 paket rencana aksi pengembangan wartek (7 kelu- rahan)	7 paket rencana aksi pengembangan wartek (7 kelu- rahan)	7 paket rencana aksi pengembangan wartek (7 kelu- rahan)	6 paket rencana aksi pengembangan wartek (6 kelu- rahan)	Sosial	BPMP2AK B
				Ketersediaan database jaringan inovasi	Database pe-ngembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta	Dikembangkan-nya database Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta	Program pe-ngembangan data/informasi daerah	Penyusunan, pengumpulan, pemeliharaan dan penyajian data/informas i Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket manajemen data/informasi	1 paket manajemen data/informasi	1 paket manajemen data/informasi	1 paket manajemen data/informasi	1 paket manajemen data/informasi	Statistik	Bappeda, Kantor Ristekin, BPS

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Posyantek dan Wartek belum terorganisir dan masih disajikan secara manual	Posyantek dan Wartek secara terorganisasi dan <i>online</i>									
								Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data/informasi di Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	Statistik	DPPK, Kantor Ristekin, BPS
								Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data/informasi di Posyantek dan Wartek	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	1 paket mana-jemen data/informasi	Statistik	BPMP2AK B, BPS
			Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga iptekin/litbangyasa yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i>	Meningkatnya peran/kontribusi lembaga iptekin/litbangyasa dalam pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan	Program optimalisasi dan pengembangan pusat riset (Kawasan Teknopolitan Batik)	Peningkatan sarana dan prasarana riset batik di Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket sarana dan prasarana riset batik	1 paket sarana dan prasarana riset batik	1 paket sarana dan prasarana riset batik	1 paket sarana dan prasarana riset batik	1 paket sarana dan prasarana riset batik	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, DRD, Fakultas Batik Unikal, Politeknik Pusmanu

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Perikanan; Posyantek dan Wartek sudah terdapat di lingkup perguruan tinggi, lembaga litbang pemda, dan lembaga penunjang	<i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek									
							Program pengembangan budidaya perikanan (Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	Pendampingan pada kelompok pembudi-daya ikan di Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	1 paket kegiatan pendampingan teknis dan pengorganisasian usaha budidaya ikan	1 paket kegiatan pendampingan teknis dan pengorganisasian usaha budidaya ikan	1 paket kegiatan pendampingan teknis dan pengorganisasian usaha budidaya ikan	1 paket kegiatan pendampingan teknis dan pengorganisasian usaha budidaya ikan	1 paket kegiatan pendampingan teknis dan pengorganisasian usaha budidaya ikan	Kelautan dan Perikanan	Kantor Ristekin, DRD, Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan
								Pengembangan bibit ikan unggul	Ikan nila	Ikan bandeng	Udang vaname	Udang windu	Rumput laut	Kelautan dan Perikanan	Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan
							Program pemberdayaan	Penguatan kelembagaan Posyantek dan	4 posyantek dan 7	4 posyantek dan 17	4 posyantek dan 27	4 posyantek dan 27	4 posyantek dan 27	Sosial	BPMP2AK B, Kantor Ristekin,

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							kelembagaan sebagai pusat kesejahteraan sosial	Wartek sebagai pusat pengembangan teknologi tepat guna	wartek	wartek	wartek	wartek	wartek		DRD, Kecamatan, Kelurahan
				Sebaran SDM iptekin/ litbangyasa	SDM iptekin/ litbangyasa yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek tersebar di perguruan tinggi, SMK, lembaga litbang pemda, dan lembaga penunjang (masyarakat)	Meningkatnya jumlah SDM iptekin/ litbangyasa yang berkontribusi pada pengembangan daerah Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (Kawasan Teknopolitan Batik)	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah di Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket bim- bingan teknis penyusunan <i>business plan</i> Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket bim- bingan teknis penyusunan roadmap pengembangan teknologi batik Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket bim- bingan teknis	1 paket bim- bingan teknis	1 paket bim- bingan teknis	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, DRD, Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Politeknik Pusmanu
							Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan (Kawasan	Penyuluhan teknis dan pengorganisasian budidaya perikanan di Kawasan <i>Techno Park</i>	10 paket penyuluhan	10 paket penyuluhan	10 paket penyuluhan	10 paket penyuluhan	10 paket penyuluhan	Kelautan dan Perikanan	Kantor Ristekin, DRD, DPPK, Fakultas Perikanan Universita

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Techno Park Perikanan)	Perikanan							s Pekalongan
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Posyantek dan Wartek)	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	4 paket pelatihan SDM inovatif dan wirau-saha inovatif (per kecamatan)	4 paket pelatihan SDM inovatif dan wira-usaha inovatif (per kecamatan)	4 paket pelatihan SDM inovatif dan wira-usaha inovatif (per kecamatan)	4 paket pelatihan SDM inovatif dan wira-usaha inovatif (per kecamatan)	4 paket pelatihan SDM inovatif dan wira-usaha inovatif (per kecamatan)	Sosial	BPMP2AK B, Disnsos-akertrans
				Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran iptekin/litbangyasa untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan Teknopolitan <i>Techno Park</i> Perikanan, Posyantek dan Wartek sudah ada, tetapi relatif masih kecil	Meningkatnya alokasi anggaran iptekin/litbang-yasa untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan Teknopolitan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengembangan iptekin/litbangyasa (untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik)	Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi perbatikan	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, Dinperindagkop UKM
							Program pengembangan	Penelitian, pengembangan dan	Meningkat 20-40	Meningkat 20-40	Meningkat 20-40	Meningkat 20-40	Meningkat 20-40	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							iptekin/litbangyasa (untuk pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	penerapan teknologi dan inovasi perikanan budidaya	persen dari tahun sebelumnya	persen dari tahun sebelumnya	persen dari tahun sebelumnya	persen dari tahun sebelumnya	persen dari tahun sebelumnya	an	
							Program pengembangan iptekin/litbangyasa (melalui Posyantek dan Wartek)	Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi TTG	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Meningkat 20-40 persen dari tahun sebelumnya	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, BPMP2AK B
				Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran hasil iptekin/litbangyasa yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek adalah pelajar/mahasiswa, masyarakat umum, pelaku	Meluasnya daya serap hasil iptekin/litbangyasa terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengelolaan kekayaan budaya (melalui pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik)	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	4 paket sosialisasi per tahun	4 paket sosialisasi per tahun	4 paket sosialisasi per tahun	4 paket sosialisasi per tahun	4 paket sosialisasi per tahun	Kebudayaan	Dinhubpar-bud

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					bisnis										
							Program pengembangan destinasi pariwisata (melalui pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik)	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (di Kawasan Teknopolitan Batik)	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Pariwisata	Dinhubparbud
							Program pengembangan budidaya perikanan (di Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	4 paket pendampingan	4 paket pendampingan	4 paket pendampingan	4 paket pendampingan	4 paket pendampingan	Kelautan dan Perikanan	DPPK
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat (melalui Posyantek dan Wartek)	Peningkatan kualitas SDM sosial masyarakat	10 SDM produktif	10 SDM produktif	10 SDM produktif	10 SDM produktif	10 SDM produktif	Sosial	BPMP2AKB
			Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan	Sebaran kemitraan strategis pemajuan	Kemitraan strategis untuk pemem-	Meluasnya kemitraan strategis untuk	Optimalisasi dan pengembangan	Kolaborasi riset batik untuk pengembangan	5 mitra strategis	5 mitra strategis	5 mitra strategis	5 mitra strategis	5 mitra strategis	Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekind

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			pelayanan inovasi dan bisnis	jaringan inovasi	bangunan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek yang sudah terjalin adalah dengan pusat riset lembaga litbang, perguruan tinggi, pusat bisnis, pelaku usaha dan LSM	pemajuan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	pusat riset (di Kawasan Teknopolitan Batik)	n Kawasan Teknopolitan Batik							
							Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	Pengembangan kemitraan pemasaran perikanan	5 mitra strategis pemasaran hasil perikanan	5 mitra strategis pemasaran hasil perikanan	5 mitra strategis pemasaran hasil perikanan	5 mitra strategis pemasaran hasil perikanan	5 mitra strategis pemasaran hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan	DPPK
							Program pemberdayaan kelembagaan	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan	5 jejaring kerja sama	5 jejaring kerja sama	5 jejaring kerja sama	5 jejaring kerja sama	5 jejaring kerja sama	Sosial	BPMP2AK B

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							kesejahteraan sosial masyarakat (Posyantek dan Wartek)								
				Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Difusi inovasi yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek baru berupa penerapan teknologi perikanan (budidaya nila salina, sato umi) dan teknologi tepat guna	Meningkatnya difusi inovasi yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengelolaan keragaman budaya (terkait Kawasan Teknopolitan Batik)	Penyusunan sistem informasi database kebudayaan (terkait Kawasan Teknopolitan Batik)	1 paket pengembangan manajemen data	1 paket pengelolaan manajemen data	1 paket pengelolaan manajemen data	1 paket pengelolaan manajemen data	1 paket pengelolaan manajemen data	Kebudayaan	Dinhubpar-bud
							Program pengembangan budidaya perikanan (di Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	Pengembangan bibit ikan unggul (nila salina, udang vaname, lainnya)	1 jenis bibit ikan unggul	1 jenis bibit ikan unggul	1 jenis bibit ikan unggul	1 jenis bibit ikan unggul	1 jenis bibit ikan unggul	Kelautan dan Perikanan	DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Program pem-berdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (melalui Posyantek dan Wartek)	Pengembangan usaha produktif berbasis TTG	4 usaha produktif	4 usaha produktif	4 usaha produktif	4 usaha produktif	4 usaha produktif	Sosial	BPMP2AK B
				Jenis wahana interaksi bagi pengembangan jaringan inovasi	Sudah ada Pusat Inovasi dan Budaya Batik, Sekretariat Posyantek dan Sekretariat Wartek, sedangkan Pusat Inovasi <i>Techno Park</i> Perikanan masih dalam tahap perancangan/design	Meningkatnya pemanfaatan PIBB, Pusat Inovasi <i>Techno Park</i> dan Sekretariat Posyantek dan Wartek	Program pengelolaan keragaman budaya (terkait Kawasan Teknopolitan Batik)	Pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
							Program pengembangan budidaya perikanan (di Kawasan	Pengembangan Pusat Inovasi <i>Techno Park</i> Perikanan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kelautan dan Perikanan	DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Techno Park Perikanan)								
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Posyantek dan Wartek)	Pengembangan Sekretariat dan Posyantek menjadi sentra informasi TTG	4 Sekretariat Posyantek	4 Sekretariat Posyantek, 7 Sekretariat Wartek	4 Sekretariat Posyantek, 7 Sekretariat Wartek	4 Sekretariat Posyantek, 7 Sekretariat Wartek	4 Sekretariat Posyantek, 7 Sekretariat Wartek	Sosial	BPMP2AK B
			Mendorong budaya kreatif-inovatif	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Pengayaan bahan ajar di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Menguatnya kompetensi dunia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam mendorong budaya kreatif-inovatif	Program pengayaan bahan ajar pendidikan menengah dan tinggi dengan iptekin perbatasan, perikanan budidaya, dan TTG	Pengayaan substansi teknik dan manajemen dalam bahan ajar pendidikan menengah dan tinggi di bidang perbatasan (mendukung Kawasan Tekno-politan Batik)	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	Pendidikan	Dindikpora, Unikal, Politeknik Pusmanu, Bappeda, Kantor Ristekin
								Pengayaan substansi teknik dan manajemen dalam bahan ajar pendidikan	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	Pendidikan	Dindikpora, Unikal, DPPK, Kantor Ristekin

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								menengah dan tinggi di bidang budidaya ikan (mendukung Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan)	mana-jemen	mana-jemen	mana-jemen	mana-jemen	mana-jemen		
								Pengayaan substansi teknik dan manajemen dalam bahan ajar pendidikan menengah dan tinggi di bidang TTG (mendukung Posyantek dan Wartek)	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	1 paket pengayaan teknik, 1 paket pengayaan manajemen	Pendidikan	Dindikpora, BPMP2AK B, Kantor Ristekin
				Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Demo dan pelatihan ketrampilan membuat di Museum Batik, pelatihan teknik budidaya perikanan air payau di laboratorium perikanan Fakultas	Meningkatnya frekuensi pelatihan, pemagangan dan studi banding terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan, pemagangan dan studi banding kewirausahaan bagi pemuda di bidang perbatikan	20 orang pemuda	25 orang pemuda	30 orang pemuda	35 orang pemuda	40 orang pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dindikpora, Kantor Ristekin

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Perikanan Universitas Pekalongan, pelatihan pengelolaan kelembagaan posyantek dan wartek	serta Posyantek dan Wartek									
								Pelatihan, pemagangan dan studi banding kewirausahaan bagi pemuda di bidang perikanan budidaya air payau	10 orang pemuda	10 orang pemuda	15 orang pemuda	15 orang pemuda	20 orang pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dindikpora, Kantor Ristekin
								Pelatihan, pemagangan dan studi banding kewirausahaan bagi pemuda di bidang teknologi tepat guna	35 orang pemuda	35 orang pemuda	35 orang pemuda	35 orang pemuda	35 orang pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dindikpora, Kantor Ristekin
				Model pengelolaan teknologi masyarakat	Baru ada dalam bentuk pengembangan Museum Batik	Berkembangnya fungsi Kawasan Teknopolitan Batik dan	Program pengembangan nilai budaya	Pelestarian dan aktualisasi kearifan lokal (teknologi	1 paket pengelolaan teknologi per-	1 paket pengelolaan teknologi per-	1 paket pengelolaan teknologi per-	1 paket pengelolaan teknologi per-	1 paket pengelolaan teknologi per-	Kebudayaan	Dinhubpar-bud

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					sebagai wadah pelestarian batik, sedangkan pengelolaan teknologi masyarakat terkait dengan <i>techno park</i> perikanan belum ada	Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan sebagai pusat pengelolaan iptekin masyarakat		masyarakat)	batikan, 1 paket penge-lolaan tekno-logi budiday a ikan air payau	batikan, 1 paket penge-lolaan tekno-logi budiday a ikan air payau	per-batikan, 1 paket penge-lolaan tekno-logi budida ya ikan air payau	batikan, 1 penge-lolaan tekno-logi budiday a ikan air payau	per-batikan, 1 penge-lolaan tekno-logi budiday a ikan air payau		
				Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Baru ada dalam bentuk pengangkatan <i>curator</i> Museum Batik	Berkembangnya a program <i>reverse brain drain</i> untuk pemajuan Kawasan Teknopolitan Batik dan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengem-bangan sumber daya inovasi daerah	Pemanfaatan keahlian dan kepakaran	3 nara-sumber pakar perba-tikan, 3 nara-sumber pakar perikana n budiday a, 3 nara-sumber pakar TTG	3 nara-sumber pakar perba-tikan, 3 nara-sumber pakar perikan-an budi-daya, 3 nara-sumber pakar TTG	3 nara-sumber pakar perba-tikan, 3 nara-sumber pakar perikan-an budi-daya, 3 nara-sumber pakar TTG	3 nara-sumber pakar perba-tikan, 3 nara-sumber pakar perikan-an budi-daya, 3 nara-sumber pakar TTG	3 nara-sumber pakar perba-tikan, 3 nara-sumber pakar perikan-an budi-daya, 3 nara-sumber pakar TTG	Perencanaa n Pembangunan	Kantor Ristekin
				Jenis agenda apresiasi inovasi	Baru ada dalam bentuk Lomba/Gelar TTG Tingkat Kelurahan	Terlaksananya agenda apresiasi inovasi khusus perikanan budi-daya dan	Program apresiasi dan kampanye inovasi	Penyelengga-raan apresiasi inovasi khusus di bidang iptekin perbatikan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perencanaa n Pembangunan	Kantor Ristekin, Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						TTG secara berkala									
								Penyelenggaraan apresiasi inovasi khusus di bidang iptekin perikanan budidaya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, DPPK
								Penyelenggaraan apresiasi inovasi khusus di bidang TTG (Lomba/Gelar TTG)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, BPMP2AK B
				Jenis media kampanye inovasi	Media massa, website, film dokumenter, pameran, profil/brosur dan lain-lain	Terlaksananya kampanye inovasi perbatasan, perikanan budidaya dan TTG melalui kerja sama dengan berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah bidang perbatasan, perikanan dan TTG	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	5 kerja sama	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo, Disperindagkop UKM, DPPK, BPMP2AK B
				Model penumbuhan usaha baru inovatif	Baru ada dalam bentuk <i>demonstration farm (techno park</i>	Berkembangnya usaha baru inovatif terkait pengembangan Kawasan	Program pengembangan kewirausahaan dan	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru	10 calon wirausaha baru	10 calon wirausaha baru	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					perikanan) dan pembinaan usaha produktif (Posyantek dan Wartek)	Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek melalui model insentif, fasilitasi, pelatihan, pemagangan dan studi banding	keunggulan kompetitif UKM				inovatif	inovatif	inovatif		
			Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah	Bidang fokus pengembangan jaringan inovasi	Fokus pengembangan jaringan inovasi adalah Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan, serta Posyantek dan Wartek	Menguatnya fokus pengembangan jaringan inovasi Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan, serta Posyantek dan Wartek	Program pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB)	Penguatan fokus dan kebijakan pengembangan PIBB	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
							Program pengembangan pusat inovasi <i>techno park</i> perikanan	Penguatan fokus dan kebijakan pengembangan pusat inovasi <i>techno park</i>	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								perikanan							
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan dan sosial	Penguatan fokus dan kebijakan pengembangan posyantek dan wartek	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	BPMP2AK B
				Sebaran kerja sama daerah	Baru ada kerja sama dengan daerah lain (Posyantek) dan pihak ketiga (Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan, Posyantek)	Meluasnya sebaran kerja sama antar-daerah, kerja sama pihak ketiga dan kerja sama luar negeri untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB)	Pengembangan jejaring kerja sama PIBB	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja pusat-daerah	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja pusat-daerah	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja pusat-daerah	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja pusat-daerah	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja pusat-daerah	Perencanaan Pembangunan	TKKSD, Bappeda
							Program pengembangan pusat inovasi <i>techno park</i>	Pengembangan jejaring kerja sama pusat inovasi <i>techno park</i> perikanan	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja sama	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja sama	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja sama	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja sama	5 kerja sama antar-daerah, 2 kerja sama	Perencanaan Pembangunan	TKKSD, DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							perikanan		pusat-daerah	pusat-daerah	pusat-daerah	pusat-daerah	pusat-daerah		
							Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial	Peningkatan jejaring kerja sama pengembangan posyantek dan wartek antardaerah dan pusat-daerah	5 kerja sama antardaerah, 2 kerja sama pusat-daerah	5 kerja sama antardaerah, 2 kerja sama pusat-daerah	5 kerja sama antardaerah, 2 kerja sama pusat-daerah	5 kerja sama antardaerah, 2 kerja sama pusat-daerah	5 kerja sama antardaerah, 2 kerja sama pusat-daerah	Perencanaan Pembangunan	TKKSD, BPMP2AK B
				Jenis kelembagaan khusus	Sudah ada kelompok usaha bersama (Posyantek), kajian BLUD PIBB dan desain kelembagaan Pusat Inovasi Perikanan	Meningkatnya peran kelembagaan khusus dan terbentuknya forum-forum yang bergerak di bidang perbatikan, perikanan dan teknologi tepat guna	Program pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB)	Penguatan kelembagaan PIBB	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
							Program pengembangan pusat inovasi <i>techno park</i> perikanan	Penguatan kelembagaan pusat inovasi <i>techno park</i> perikanan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristek
							Program pemberdayaan kelembagaan	Pengembangan kelompok usaha produktif	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	5 paket penguatan	Perencanaan Pembangunan	BPMP2AK B

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							n kesejahteraan sosial	berbasis TTG							
			Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah	Sebaran program ramah lingkungan	Program Kali Bersih Sungai Loji dan RPK Taman Jetayu berbasis RTH (Kawasan Teknopolitan Batik), kawasan konservasi mangrove (Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan), Kampung Hijau, <i>septic tank</i> apung, mikro bakteri penyubur tanah dan alat pembuat BBM plastik (Posyantek)	Meluasnya program ramah lingkungan dalam pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Kawasan Teknopolitan Batik)	Koordinasi pengelolaan superkasih di Kawasan Teknopolitan Batik	1 paket normalisasi Sungai Loji	1 paket normalisasi Sungai Loji	1 paket normalisasi Sungai Loji	1 paket normalisasi Sungai Loji	1 paket normalisasi Sungai Loji	Lingkungan Hidup	BLH, Bappeda
							Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut di Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan	1 paket pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir	1 paket pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir	1 paket pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir	1 paket pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir	1 paket pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir	Lingkungan Hidup	BLH, DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Perikanan)		dan laut	dan laut	dan laut	dan laut	dan laut		
							Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengembangan produksi ramah lingkungan berbasis TTG	4 paket TTG	4 paket TTG	4 paket TTG	4 paket TTG	4 paket TTG	Lingkungan Hidup	BLH, BPMP2AK B
				Sebaran aplikasi standardisasi internasional	Belum ada	Berkembangnya aplikasi standar internasional dan manajemen mutu terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan Techno Park Perikanan serta Posyantek dan Wartek	Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu	Penerapan standar internasional dan manajemen mutu di PIBB	1 paket inisiasi/kajian	1 paket penyiapan kebutuhan aplikasi	1 paket penerapan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, Bappeda
								Penerapan standar internasional dan manajemen mutu di pusat	1 paket inisiasi/kajian	1 paket penyiapan	1 paket penerapan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, DPPK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								inovasi <i>techno park</i> perikanan							
				Jenis hak kekayaan intelektual	Jenis HKI yang sudah ada adalah paten sederhana termos <i>packing</i> ikan (binaan posyantek)	Meningkatnya jenis dan jumlah HKI yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, pengembangan Kawasan <i>Techno Park</i> Perikanan serta pengembangan Posyantek dan Wartek, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN	Program pengembangan HKI berbasis inovasi perbatikan, perikanan dan TTG	Sosialisasi HKI	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Belum ada	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil yang terkait dengan pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik, Kawasan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang perbatikan, perikanan dan teknologi tepat guna	3 paket sosialisasi	5 orang sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang perbatikan,	5 orang sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang perbatikan,	5 orang sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang perbatikan,	5 orang sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang perbatikan,	Tenaga Kerja	Dinsosnak ertrans, Kantor Ristekin

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Techno Park Perikanan serta Posyantek dan Wartek, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN				perikan-an dan teknologi tepat guna	perikan-an dan teknologi tepat guna	perikan-an dan teknologi tepat guna	perikan-an dan teknologi tepat guna		

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Tabel 7.4.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Tekopreneur

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Tumbuhnya pelaku bisnis yang kreatif dan inovatif (teknopreneur) berbasis iptekin melalui pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, BDS-P dan UPB SMK Incorporate	Pengembangan Teknopreneur	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan teknopreneur	Sudah ada tujuh regulasi tentang inkubator bisnis dan teknologi (2 buah), BDS-P (1 buah) dan UPB SMK Incorporate (4 buah)	Ditetapkannya regulasi tentang pengembangan teknopreneur, baik yang terkait dengan inkubator bisnis dan teknologi, BDS-P maupun SMK Incorporate	Program penataan peraturan perundang-undangan	Publikasi/penyerbitan peraturan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknopreneur	1 paket regulasi					Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Kantor Ristekin, Bagian Hukum Setda
								Publikasi/penyerbitan peraturan tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi	1 paket regulasi					Perencanaan Pembangunan	Dinsosnakertrans, Bagian Hukum Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Publikasi/penyerbitan peraturan tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan BDS-P	1 paket regulasi					Perencanaan Pembangunan	Dinperindagkop UKM, Bagian Hukum Setda
								Publikasi/penyerbitan peraturan tentang Pendirian Koperasi SMK Incorporate	1 paket regulasi					Perencanaan Pembangunan	Dindikpora, Dinperindagkop UKM, Bagian Hukum Setda
				Jenis insentif pengembangan teknopreneur	Insentif berupa bantuan modal kepada KUMKM wira-usaha baru (PPBT). Kemudahan berupa fasilitasi PPBT, sarana dan prasarana usaha serta bantuan biaya bagi UPB SMK	Ditingkatkannya pemberian berbagai jenis insentif dan kemudahan bagi PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis (ITB)	3 ITB	3 ITB	3 ITB	3 ITB	3 ITB	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Incorporate										
							Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Fasilitasi pengembangan KUMKM	20 UKM	25 UKM	25 UKM	30 UKM	30 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
								Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha KUMKM	20 UKM	15 UKM	15 UKM	10 UKM	10 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Jenis dokumen perencanaan pengembangan inkubator teknologi dan SOP Penyelesaian Jasa Pengembangan Bisnis	Baru ada dokumen tentang SOP Rencana Aksi Daerah (RAD) Inkubator Bisnis dan Teknologi dan SOP Penyediaan Jasa Pengembangan Bisnis	Disusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT), RAD Pengembangan BDS-P, dan Rencana Bisnis (RB) Pengembangan SMK Incorporate	Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Penyusunan kebijakan tentang KUMKM	1 dokumen RAD Pengembangan IBT, 1 dokumen RAD Pengembangan BDS-P, 1 dokumen RB Pengembangan SMK Incorporate					Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM, Dindikpora
				Ketersediaan database inkubator teknologi dan	Database inkubator bisnis dan	Dikembangkannya database inkubator	Program penciptaan iklim usaha	Penyediaan database PPBT yang	1 paket pembuatan	1 paket pengumpulan	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	Koperasi dan Usaha Kecil	Dinperind agkop UKM,

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					teknologi (PPBT), BDS-P (KUMKM) dan UPB SMK Incorporate belum komprehensif, belum tersimpan secara terorganisir dan masih disajikan secara manual	bisnis teknologi, BDS-P dan SMK Incorporate yang dikelola secara terpusat dan disajikan secara online	KUMKM yang kondusif	dapat diakses masyarakat	struktur database PPBT	dan pengolahan data/informasi PPBT	n dan pengembangan	n dan pengembangan	n dan pengembangan	Menengah	Dinsosnakertrans
							Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Penyediaan database KUMKM yang dapat diakses masyarakat	1 paket pembuatan struktur database KUMKM	1 paket pengembangan dan pengolahan data/informasi KUMKM	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
								Penyediaan database UPB SMK Incorporate yang dapat diakses	1 paket pembuatan struktur database UPB	1 paket pengembangan dan pengolahan	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	1 paket pemeliharaan dan pengembangan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM, Dindikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								masyarakat	SMK Incorporate	data/informasi UPB SMK Incorporate	bangunan data/informasi UPB SMK Incorporate	bangunan data/informasi UPB SMK Incorporate	bangunan data/informasi UPB SMK Incorporate		
			Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga iptekin/litbangyasa yang terkait dengan pengembangan teknopreneur meliputi Kantor Ristekin, DRD, dan perguruan tinggi setempat	Meningkatnya peran lembaga iptekin/litbangyasa dalam pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis (ITB)	5 tenant	5 tenant	5 tenant	5 tenant	5 tenant	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin, Dinsosnakertrans, Politeknik Pusmanu
								Sosialisasi HAKI kepada UMKM	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin
				Sebaran SDM iptekin/litbangyasa	SDM iptekin/litbangyasa yang terkait dengan pengembangan	Meningkatnya jumlah SDM iptekin/litbangyasa yang berkontribusi pada pengem-	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	3 paket kebijakan dan program					Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin, DRD, Perguruan Tinggi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					teknopreneur tersebar di lembaga litbang pemerintah kota, perguruan tinggi lokal (dosen dan mahasiswa) dan para pelaku bisnis inovatif	bangunan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate									
							Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional	3 paket kajian dampak	3 paket kajian dampak	3 paket kajian dampak	3 paket kajian dampak	3 paket kajian dampak	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin, DRD, Perguruan Tinggi
				Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran iptekin/litbangyasa untuk pengembangan teknopreneur bersumber dari pemerintah kota, perguruan tinggi, pelaku	Meningkatnya alokasi anggaran iptekin/litbangyasa untuk pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Pengembangan jaringan infrastruktur KUMKM	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					bisnis inovatif dan pihak ketiga (pemerintah provinsi, kementerian / lembaga)										
							Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	20 wirausaha	20 wirausaha	20 wirausaha	20 wirausaha	20 wirausaha	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin
				Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbang angyasa	Hasil pengembangan teknopreneur sudah ada dan sudah diabsorpsi oleh PPBT, UMKM, masyarakat dan pelajar/mahasiswa	Semakin meningkatnya daya serap hasil iptekin/litbang -yasa oleh PPBT, KUMKM dan UPB SMK incorporate	Program peningkatan difusi hasil iptekin/litbangyasa	Sosialisasi hasil iptekin/litbangyasa kepada KUMKM	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin
			Menumbuhkan-kembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan teknoptener	Kemitraan strategis pemajuan PPBT, UMKM dan UPB SMK	Meluasnya kemitraan strategis untuk pemajuan PPBT, KUMKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	10 fasilitasi kerja sama kemitraan	15 fasilitasi kerja sama -	15 fasilitasi kerja sama kemitraan	20 fasilitasi kerja sama kemitraan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			bisnis		Incorporate sudah terjalin dengan BPPT, Kemenpora, Universitas Pekalongan, STIMIK Widya Pratama dan Politeknik Pusmanu	dan UPB SMK Incorporate	kompetitif KUMKM								
								Peningkatan kerja sama di bidang HAKI	1 paket kerja sama	1 paket kerja sama	1 paket kerja sama	1 paket kerja sama	1 paket kerja sama	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Sebaran difusi inovasi	Difusi inovasi dilakukan melalui TOT bagi pengusaha pemula dan pemuda, workshop <i>technocamp</i> bagi calon tenant dan konsultasi bisnis	Meningkatnya difusi inovasi untuk pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jenis wahana interaksi bagi pengembangan teknopreneur	Wahana interaksi diantaranya workshop kewirausahaan, <i>technocamp</i> , TOT, ruang workshop kewirausahaan	Semakin banyaknya wahana interaksi bagi PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Penyelenggaraan promosi produk UKM	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
			Mendorong budaya kreatif-inovatif	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Pengembangan kandungan <i>technopreneurship</i> (kewirausahaan) dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi, dimana tahun 2016 diharapkan sudah diimplementasikan di Politeknik Pusmanu	Menguatnya kompetensi Politeknik Pusmanu dalam pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, menguatnya kompetensi Unikal dalam pengembangan BDS-P, dan menguatnya kompetensi semua SMK dalam pengembangan SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pengembangan bahan ajar teknopreneur	1 paket bahan ajar	1 paket bahan ajar	1 paket bahan ajar	1 paket bahan ajar	1 paket bahan ajar	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM, Dindikpora, Perguruan Tinggi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Pelaksanaan pelatihan (desain, aplikasi teknologi pemasaran secara online bagi siswa SMK, dan <i>technopreneurship</i> bagi pemuda)	Meningkatnya frekuensi pelatihan, pemagangan dan studi banding pengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan bagi PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	20 UKM	20 UKM	25 UKM	30 UKM	40 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM
				Model pengelolaan teknologi masyarakat	Belum ada	Berkembangnya peran inkubator bisnis dan teknologi, BDS-P dan SMK Incorporate dalam pengelolaan teknologi masyarakat	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Identifikasi teknologi masyarakat	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin
				Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Belum ada	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pemajuan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan sumber daya inovasi daerah	Pemanfaatan keahlian dan kepakaran	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jenis agenda apresiasi inovasi	Belum ada	Terlaksananya agenda apresiasi inovasi dan bisnis yang melibatkan pelaku inovasi dan bisnis di kalangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Pelaksanaan apresiasi inovasi dan bisnis	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	3 paket apresiasi	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Jenis media kampanye inovasi	<i>Technocamp</i> , <i>leaflet</i> , <i>website</i> , dan lain-lain	Terlaksananya kampanye inovasi melalui berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Penyelenggaraan kampanye inovasi di berbagai media massa dan media lainnya secara berkala	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Model penumbuhan usaha baru inovatif	Penumbuhan usaha baru (calon teknopreneur) dilakukan melalui model hibah bersaing, <i>technocamp</i> , <i>capacity building</i> dan bantuan pengembangan usaha	Berkembangnya penumbuhan usaha baru inovatif melalui skema inkubator dan bisnis, BDS-P dan SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru inovatif	10 calon wirausaha baru inovatif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperindagkop UKM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					bagi wirausaha baru (PPBT)										
			Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah	Bidang fokus pengembangan tekno-prener	Fokus pengembangan tekno-prener adalah pengembangan PPBT, pengembangan KUMKM yang tangguh dan mandiri, dan pengembangan UPB/ Koperasi SMK Incorporate	Menguatnya fokus dan kebijakan pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Penyusunan kebijakan tentang fokus pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	1 paket kebijakan PPBT, 1 paket kebijakan KUMKM, 1 paket kebijakan UPB SMK Incorporate	1 paket kebijakan PPBT, 1 paket kebijakan KUMKM, 1 paket kebijakan UPB SMK Incorporate	1 paket kebijakan PPBT, 1 paket kebijakan KUMKM, 1 paket kebijakan UPB SMK Incorporate	1 paket kebijakan PPBT, 1 paket kebijakan KUMKM, 1 paket kebijakan UPB SMK Incorporate	1 paket kebijakan PPBT, 1 paket kebijakan KUMKM, 1 paket kebijakan UPB SMK Incorporate	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindagkop, UKM, Dinsosnakertrans, Dindikpora
								Perencanaan, koordinasi dan pengembangan KUMKM	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindagkop, UKM, Dinsosnakertrans, Dindikpora
				Sebaran kerja sama daerah	Kerja sama yang sudah ada adalah kerja sama	Terjalannya kerja sama antar-daerah, kerja sama	Program pengembangan sistem	Peningkatan jaringan kerja sama antar-lembaga	1 paket kerja sama antar-	1 paket kerja sama antar-	1 paket kerja sama antar-	1 paket kerja sama antar-	1 paket kerja sama antar-	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	TKKSD, Disperindagkop, UKM,

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dengan pihak ketiga tentang pengembangan inkubator bisnis dan teknologi dan BDS-P. Sedangkan kerja sama antardaerah dan kerja sama luar negeri belum ada	dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks MEA) untuk pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	pendukung usaha bagi KUMKM		daerah, 1 paket kerja sama dengan pihak ketiga, 1 paket kerja sama luar negeri	daerah, 1 paket kerja sama dengan pihak ketiga, 1 paket kerja sama luar negeri	daerah, 1 paket kerja sama dengan pihak ketiga, 1 paket kerja sama luar negeri	daerah, 1 paket kerja sama dengan pihak ketiga, 1 paket kerja sama luar negeri	daerah, 1 paket kerja sama dengan pihak ketiga, 1 paket kerja sama luar negeri		Dinsosnak ertrans, Dindikpora
				Jenis kelembagaan khusus	Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi, Tim Pengelola BDS-P dan Tim Pengelola UPB SMK Incorporate	Meningkatnya peran Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi, Tim Pengelola BDS-P dan Tim Pengelola UPB SMK Incorporate dalam pengembangan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pelatihan manajemen pengelolaan Inkubator Bisnis dan Teknologi	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinsosnakertrans

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Pelatihan manajemen pengelolaan BDS-P	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
								Pelatihan manajemen pengelolaan SMK Incorporate	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	10 orang TOT	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dindikpora
			Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah	Sebaran program ramah lingkungan	Belum ada	Berkembangnya program ramah lingkungan yang terkait dengan pengembangan keunggulan PPBT, KUMKM dan UPB SMK Incorporate	Program pengembangan kewira-usahaan dan kompetensi UKM	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM	20 UKM	20 UKM	25 UKM	30 UKM	40 UKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinperind agkop UKM
				Sebaran aplikasi standarisasi internasional	Baru tahap pembekalan pengetahuan tentang standarisasi produk	Berkembangnya aplikasi standar internasional dan manajemen mutu di kalangan PPBT dan KUMKM	Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu	Penerapan standar internasional dan manajemen mutu di kalangan PPBT	1 paket sosialisasi	1 paket inisiasi/kajian	1 paket penyiapan kebutuhan aplikasi	1 paket penerapan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	Perencanaan Pembangunan dan	Kantor Ristekin, Dinsosnakertrans
								Penerapan standar internasional dan manajemen	1 paket sosialisasi	1 paket inisiasi/kajian	1 paket penyiapan kebutuhan	1 paket penerapan	1 paket pengembangan dan	Perencanaan Pembangunan dan	Kantor Ristekin, Dinperind agkop

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								mutu di kalangan KUMKM			aplikasi		pemeliharaan		
				Jenis hak kekayaan intelektual	Baru tahap pembekalan pengetahuan tentang HKI	Berkembangnya HKI yang diraih oleh PPBT dan KUMKM, terutama dalam konteks MEA	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Sosialisasi HKI kepada UMKM	30 PPBT dan KUMKM	30 PPBT dan KUMKM	30 PPBT dan KUMKM	30 PPBT dan KUMKM	30 PPBT dan KUMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin, Dinsosnakertrans, Dinperindagkop UKM
								Peningkatan kerja sama bidang HKI	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	3 kerja sama	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kantor Ristekin, Dinperindagkop UKM
				Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Belum ada	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil di kalangan PPBT dan KUMKM, terutama dalam konteks MEA	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil	10 PPBT dan KUMKM	10 PPBT dan KUMKM	10 PPBT dan KUMKM	10 PPBT dan KUMKM	10 PPBT dan KUMKM	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans, Dinperindagkop UKM

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Tabel 7.5. Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi

No.	Sesaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Terjadinya peman-tapan dan perluasan peman-faatan TIK dalam semua aspek pem-bangunan daerah dan pem-bangunan masyarakat di Kota Pekalongan	Penguatan Tematik Sistem Inovasi	Mengembangk-an kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Ada 19 regulasi daerah yang terkait dengan TIK	Ditetapkannya regulasi tentang e-Pekalongkota	Program pengem-bangan komunikasi, informasi dan media massa	Fasilitasi penyempurna-an peraturan perundang-undangan	Penyu-sunan naskah akademik s e-pekalongankota	Penyu-sunan rancang-an dan pene-tapan peraturan daerah tentang e-pekalongankota	Pene-rapan e-pekalongankota	Pene-rapan e-pekalongankota	Pene-rapan e-pekalongankota	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo, Bagian Hukum Setda
				Jenis insentif pengembangan TIK	Baru ada insentif dalam bentuk kemudahan (fasilitasi pelatihan dan pembangunan VoIP)	Dikembangkan-nya insentif dan kemudahan bagi pihak swasta dan masyarakat yang berprestasi me-ngembangkan inovasi dan	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab	
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						bisnis berbasis TIK										
				Jenis dokumen perencanaan pengembangan TIK	Pengembangan TIK sudah dimuat dalam RPJMD 2010-2015, Renstra Dinkominfo 2010-2015 dan Rencana Strategis TIK 2008-2013	Dikeluarkannya dokumen Rencana Induk e-Pekalongankota dan Rencana Strategis TIK Kota Pekalongan Tahun 2018-2023	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	1 dokumen Rencana Induk e-Pekalongankota, 1 dokumen Rencana Strategis TIK 2018-2023						Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
				Ketersediaan database TIK	Database TIK dikelola melalui pusat data (data center) oleh Dinkominfo	Pusat data TIK bisa diakses secara online	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah berbasis web	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database	1 paket pengembangan database		Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa	Sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa	Lembaga iptekin/litbangyasa yang terkait pengembangan TIK tersebar di lembaga litbang pemda	Menguatnya peran lembaga iptekin/litbangyasa dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Penelitian dan pengkajian informasi dan komunikasi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		Komunikasi dan Informatika	Kantor Ristekin, Dinkominfo, Perguruan Tinggi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					(Kantor Ristekin, DRD), perguruan tinggi (STIMIK Widya Pratama) dan lembaga penunjang (forum masyarakat ahli TIK)	infostruktur TIK									
				Sebaran SDM iptekin/ litbangyasa	SDM iptekin/ litbangyasa tersebar di lembaga litbang pmda, perguruan tinggi dan lembaga penunjang	Meningkatnya jumlah SDM iptekin/ litbangyasa yang berkontribusi pada pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Penyelenggaraan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Komunikasi dan Informatika	Kantor Ristekin, DRD, Perguruan Tinggi
				Sebaran alokasi anggaran IPTEKIN/Litbangyasa	Alokasi anggaran iptekin/ litbangyasa untuk pengem-	Meningkatnya alokasi anggaran iptekin/ litbangyasa untuk	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi	Penelitian dan pengkajian bidang informasi dan komunikasi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Komunikasi dan Informatika	Kantor Ristekin, Dinkominfo, Perguruan Tinggi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Ditinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						bangan TIK terutama bersumber dari APBD	pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	dan informasi							
				Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa	Absorpsi hasil TIK tersebar di pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga masyarakat dalam bentuk migrasi FOSS, layanan M-CAP dan CAP (telecenter)	Semakin meningkatnya daya serap hasil pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi hasil iptekin/litbangyasa	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Komunikasi dan Informatika	Kantor Ristekinfo, Perguruan Tinggi
			Menumbuhkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis	Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan TIK	Kemitraan strategis tersebar di dalam dan luar Kota Pekalongan, baik dengan kementerian / lembaga pemerintah,	Meluasnya kemitraan strategis untuk pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur	Program kerja sama informasi dan media massa	Pengembangan kemitraan strategis untuk pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur	3 mitra strategis	3 mitra strategis	3 mitra strategis	3 mitra strategis	3 mitra strategis	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					asosiasi, komunitas, perguruan tinggi, maupun sekolah menengah	TIK		TIK							
				Sebaran difusi inovasi	Difusi inovasi TIK tersebar di pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan masyarakat berbentuk migrasi penggunaan <i>legal software</i> berbasis FOSS, CAP, M-CAP	Meningkatnya difusi inovasi pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan difusi inovasi bidang komunikasi dan informasi	3 paket difusi	3 paket difusi	3 paket difusi	3 paket difusi	3 paket difusi	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
				Jenis wahana interaksi bagi pengembangan TIK	Wahana interaksi bagi pelaku TIK di antaranya adalah ICT Executive Forum, ICT	Makin banyak wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis di bidang komunikasi dan informasi	Program kerja sama informasi dan media massa	Pengembangan wahana interaksi bidang komunikasi dan informasi	5 wahana	6 wahana	7 wahana	8 wahana	9 wahana	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Technical Forum, BLC, telecenter, forum e-gov										
			Mendorong budaya kreatif-inovatif	Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pendidikan	Pengembangan kandungan TIK dalam bahan ajar sekolah menengah dan perguruan tinggi serta pendirian pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK di tingkat RW	Berkembangnya kandungan TIK dalam kurikulum pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan pendidikan dasar serta berkembangnya pemanfaatan pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis TIK	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo, Dindikpora, Perguruan Tinggi
				Model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan TIK melalui program fasilitasi peningkatan bisnis, SDM bidang	Meningkatnya frekuensi penyelenggaraan pelatihan TIK bagi aparatur pemerintah kota, pelaku bisnis, masyarakat,	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Penyelenggaraan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					TIK	pelajar, lainnya									
				Model pengelolaan teknologi masyarakat	Pengelolaan teknologi masyarakat dilakukan melalui Metropolitan Area Network BATIK-net	Berkembangnya model pengelolaan teknologi masyarakat berbasis TIK melalui MAN Batik-net	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	1 paket MAN Batik-net	1 paket MAN Batik-net	1 paket MAN Batik-net	1 paket MAN Batik-net	1 paket MAN Batik-net	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
				Jenis program <i>reverse brain drain</i>	Program <i>reverse brain drain</i> belum berkembang	Berkembangnya program <i>reverse brain drain</i> untuk pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program pengembangan sumber daya inovasi daerah	Pemanfaatan keahlian dan kepakaran	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	3 narasumber	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Jenis agenda apresiasi inovasi	Agenda apresiasi inovasi khusus TIK kebanyakan dari luar, seperti Indonesia Open Source Award, ICT Pura, e-	Semakin beragamnya agenda apresiasi inovasi di bidang TIK	Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi	Pelaksanaan apresiasi inovasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	1 paket apresiasi	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Dil inginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Government Award, lainnya										
				Jenis media kampanye inovasi	Media massa, website, profil/brosur dan lain-lain	Makin beragamnya jenis media dan frekuensi kampanye inovasi di bidang TIK	Program kerja sama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin
				Model penumbuhan usaha baru inovatif	Pengembangan wirausaha berbasis TIK	Berkembangnya penumbuhan usaha baru inovatif melalui model wirausaha berbasis TIK	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Penyelenggaraan pelatihan wirausaha baru inovatif berbasis TIK	10 wirausaha baru inovatif	10 wirausaha baru inovatif	10 wirausaha baru inovatif	10 wirausaha baru inovatif	10 wirausaha baru inovatif	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antardaerah dan pusat-daerah	Bidang fokus pengembangan TIK	Fokus pengembangan TIK adalah TIK untuk mendorong pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat, <i>public service</i> dan ekonomi kreatif	Semakin mantap dan meluasnya pengembangan TIK, terutama fokus untuk pendidikan berkualitas dan berdayasaing, pemberdayaan masyarakat produktif, <i>public service</i> yang prima, serta pengembangan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						ekonomi kreatif-inovatif									
				Sebaran kerja sama daerah	Kerja sama pengembangan TIK baru dengan pihak ketiga	Meingkatnya kerja sama antardaerah, dengan pihak ketiga negeri terkait pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program kerja sama pembangunan	Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga	3 paket fasilitasi kerja sama	3 paket fasilitasi kerja sama	3 paket fasilitas kerja sama	3 paket fasilitas kerja sama	3 paket fasilitas kerja sama	Perencanaan Pembangunan	TKKSD/ Bagian Tata Pemerintahan Setda, Dinkominfo
				Jenis kelembagaan khusus	Sudah ada DPTIK, Komite TIK, Chief Informatio Office dan Tim TIK SKPD	Meningkatnya peran kelembagaan khusus dalam pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur TIK	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Peningkatan kapasitas kelembagaan khusus TIK	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah	Sebaran program ramah lingkungan	<i>Paperless office</i>	Berkembangnya program ramah lingkungan dalam pengembangan komunikasi	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi ramah	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	1 paket kajian	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program dan Kegiatan		Target dan Waktu Pelaksanaan					Urusan	Institusi Penanggung Jawab
					Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Program	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						dan informasi		lingkungan							
				Sebaran aplikasi standardisasi internasional	Standarisasi internasional diterapkan dalam bentuk penggunaan perangkat lunak legal	Meningkatnya aplikasi standar internasional dalam pengembangan komunikasi dan informasi	Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu	Penerapan standar internasional dan manajemen mutu dalam pengembangan komunikasi dan informasi	1 paket inisiasi/kajian	1 paket penerapan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	1 paket pengembangan dan pemeliharaan	Perencanaan Pembangunan	Kantor Ristekin, Dinkominfo
				Jenis hak kekayaan intelektual	Belum ada, baru sampai tahap pembekalan pengetahuan tentang HKI	Meningkatnya jenis dan jumlah HKI di bidang TIK, terutama dalam konteks MEA	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sosialisasi HKI kepada SDM inovatif bidang komunikasi dan informasi	2 paket sosialisasi	2 paket sosialisasi	2 paket sosialisasi	2 paket sosialisasi	2 paket sosialisasi	Komunikasi dan Informatika	Kantor Ristekin, Diperindagkop UKM, Dinkominfo
				Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil	Sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang TIK belum ada	Berkembangnya sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang TIK	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil	10 orang tenaga kerja terampil	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans, Dinkominfo

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Dari Tabel 7.1 hingga Tabel 7.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan selama periode 2016-2020 berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan di bawah ini :

1. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan Penguatan Ekosistem Inovasi :
 - a. Pendidikan (W-01)
 - b. Perencanaan Pembangunan (W-06)
 - c. Lingkungan Hidup (W-08)
 - d. Tenaga Kerja (W-14)
 - e. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
 - f. Penanaman Modal Daerah (W-16)
 - g. Kebudayaan (W-17)
 - h. Pemerintahan Umum (W-20)
 - i. Kepegawaian (W-21)
 - j. Perdagangan (P-06)
 - k. Perindustrian (P-07)
2. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan Pengembangan Klaster Industri :
 - a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
 - b. Tenaga Kerja (W-14)
 - c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
 - d. Pemerintahan Umum (W-20)
 - e. Perdagangan (P-06)
 - f. Perindustrian (P-07)
3. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan Pengembangan Jaringan Inovasi :
 - a. Pendidikan (W-01)
 - b. Perencanaan Pembangunan (W-06)
 - c. Lingkungan Hidup (W-08)
 - d. Sosial (W-13)
 - e. Tenaga Kerja (W-14)
 - f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
 - g. Kebudayaan (W-17)
 - h. Pemuda dan Olahraga (W-18)
 - i. Statistik (W-23)

- j. Komunikasi dan Informatika (W-25)
 - k. Pariwisata (P-04)
 - l. Kelautan dan Perikanan (P-05)
4. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan Pengembangan Teknopreneur :
- a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
 - b. Tenaga Kerja (W-14)
 - c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
5. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan Penguatan Tematik Sistem Inovasi :
- a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
 - b. Tenaga Kerja (W-14)
 - c. Komunikasi dan Informatika (W-25)

BAB VIII PENUTUP

8.1. MEKANISME PENGINTEGRASIAN ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KE DALAM RPJMD KOTA PEKALONGAN

Implementasi penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan untuk lima tahun ke depan dapat dilakukan melalui pengintegrasian penguatan sistem inovasi daerah yang terdapat di dalam dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) fase ketiga tahun 2016-2020 dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Pengintegrasian ini sesuai dengan amanah Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam pengintegrasian ke dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2020, muatan penguatan sistem inovasi daerah tercermin di dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah dan secara eksplisit ditegaskan mulai dari Misi Pembangunan Jangka Menengah.

Visi RPJMD Kota Pekalongan merupakan cita-cita dan harapan segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan yang akan diwujudkan dan sekaligus diperlukan untuk dijadikan sebagai arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Berdasarkan pada segenap kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, potensi, modal dasar dan berbagai isu strategis yang dihadapi Kota Pekalongan, maka Visi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

“PEKALONGAN KOTA BATIK YANG INOVATIF, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka salah satu alternatif Misi Pembangunan Jangka Menengah yang bisa digulirkan ialah : *Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi guna pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.*

Untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, maka perlu didukung oleh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, strategi yang digunakan untuk penguatan sistem inovasi daerah dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi sesuai dengan konteks sasaran. Sedangkan arah kebijakan, yang bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan Inovasi sesuai dengan konteks sasaran yang akan dicapai.

Adapun mekanisme pengadopsian muatan penguatan sistem inovasi daerah ke dalam RPJMD Kota Pekalongan dapat dilakukan melalui salah satu misi. Bagan alurnya dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Masuk Melalui Misi

Jika penguatan sistem inovasi daerah dimulai dari salah satu Misi Pembangunan Jangka Menengah, maka akan menjadi loncatan besar bagi pemimpin daerah serta akan mempengaruhi pengambilan langkah dan strategi kebijakan di bawahnya. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 akan sinkron dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan penguatan sistem inovasi daerah dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

Manfaat implementasi penguatan sistem inovasi daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah adalah terpeliharanya konsistensi dalam menjalankannya. Pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah di daerah memiliki peluang tidak konsisten mengingat sering bergantinya unsur pimpinan daerah yang berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Akan tetapi, hal ini dapat dihindari sejauh unsur-unsur penting penguatan sistem inovasi daerah itu sudah dapat masuk dalam RPJMD dimana rakyat di daerah bisa berperan sebagai penjaganya. Artinya, rakyat melalui perwakilannya harus tahu pentingnya upaya penguatan sistem inovasi daerah dan menjaganya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah.

8.2. TINDAK LANJUT

Hasil penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020, dan akan sangat baik apabila diintegrasikan mulai dari level salah satu Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN



SLAMET PRIHANTONO

Cap.

ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID